

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

MUHAMMAD AFDAL KARIM

E12112273

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR**

Yang disusun oleh

Muh. Afdal Karim

E 121 12 273

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 20 November 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Indar Arifin, M.Si.
NIP.19630407 198903 2 003

Pembimbing II



Rahmatullah S.I.P, M.Si
NIP.19770513 200312 1 002

Mengetahui:

**Ketua Departemen Ilmu Politik
Dan Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP.19641231 198903 1 027

**Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan FISIP Unhas**



Dr. Nurlinah, M.Si
NIP.19630912 198702 2 001

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Muh. Afdal Karim

E 121 12 273

Telah Diperbaiki

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Senin Tanggal 20 November 2017

Menyetujui

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. Indar Arifin, M.Si
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si
Anggota	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si
Anggota	: A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
Pembimbing I	: Dr. Indar Arifin, M.Si
Pembimbing II	: Rahmatullah, S.IP, M.Si



KATA PENGANTAR

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh”

Puji syukur kehadiran Allah SWT dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan sampai pada hari ini serta tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang menderang, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas kahir yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang Tua tercinta Ayah, Drs. Abdul Karim dan Ibu, Musdalifah H.M yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, mengikhlaskan cucuran keringat dan air mata, serta ketulusan untaian doa

dan pengorbanan tiada henti demi keberhasilan penulis, yang hingga kapanpun penulis tak mampu membalasnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya
3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan beserta seluruh staf pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan beserta seluruh staf pegawai di lingkungan prodi Ilmu Pemerintahan.
5. Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si selaku pembimbing 1 dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf Prodi Ilmu Pemerintahan Mursalim, S.IP terima kasih telah membantu dalam menyelesaikan segala keperluan administratif penulis.
9. Pemerintah Kota Makassar, khususnya Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, KASI Rehabilitasi Penyandang Cacat, Ketua P2TP2A Kota Makassar, Sekretaris P2TP2A Kota Makassar dan Ketua HWDI Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan membantu memberikan data kepada penulis terkait penelitian ini.
10. Saudara-saudara penulis, Nasri Karim, Nasir Karim, S.Sos, St. Hardiyanti Karim, S.Pt, Muammar Karim, SKM, Akmal Karim, Farhan Karim, Khusnul Khatimah Karim dan Ayatul Husna Karim, Terima kasih telah menjadi saudara sekaligus teman terbaik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga kita selalu bisa membahagiakan kedua orangtua baik di kehidupan dunia dan akhirat.
11. Khusus kepada Sdri Cindy Israeni A, S.Sos, terimakasih atas semangat dan dukungannya selama ini.
12. Terimakasih kepada Keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightenment 2011, Lebensraum 2013. Terkhusus Fidelitas 2014,

Federasi 2015, Verenigen 2016 dan Kaizen 2017, jaga rumah jingga,
Jayalah HIMAPEMKU Jayalah HIMAPEM Kita Salam Merdeka Militan!

13. Untuk Fraternity Terima kasih telah bersama-sama mengukir
kenangan selama dijenjang perkuliahan sampai penulis selesai.
Terkhusus kepada teman-teman wattunami squad 2012 yang saya
dahului.

14. Teman-teman Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Periode 2016-2017,
Rewo, Andre, Ichal, Kila, Adhi, Iqbal, Nunu, Wilhem, Ibnu, Hasyim,
Oskar, Hidan. Terima kasih atas Ilmu, waktu dan semangatnya
Bersama Bersatu Berjaya.

15. Teman-teman HASTEMI Makassar, SMK SMTI Makassar Angkatan
46, RESPIRASI, kawan-kawan Daya Keos, DBS, Booster Ravers,
terima kasih atas pertemanan yang menyenangkan untuk penulis.

16. Teman-teman KKN Gelombang 93 Kecamatan Liliriaja, Kelurahan
Appanang, Misbah, Arisman, Sudin, Lisa, Titis, Tina dan Noe .

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta
panjatkan doa,. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat
bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya.
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Makassar, 16 November 2017

MUHAMMAD AFDAL KARIM

Daftar Isi

Ha laman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Matriks	viii
Intisari	ix
Abstract.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi	9
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2. Konsep Kebijakan.....	11
2.3. Kebijakan Publik	12

2.4. Bentuk dan Macam Kebijakan.....	16
2.5. Tahapan Kebijakan.....	17
2.6. Implementasi Kebijakan.....	21
2.7. Model-model Implementasi Kebijakan.....	22
2.8. Faktor-faktor dalam Implementasi Kebijakan.....	29
2.9. Penyandang Disabilitas.....	33
2.10. Ragam Penyandang Disabilitas.....	34
2.11. Pemenuhan hak Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.....	35
2.12. Kerangka Konsep.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian	42
3.2. Tipe Penelitian.....	42
3.3. Sumber Data	43
3.4. Informan Penelitian	43
3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
3.6. Defenisi Operasional	45

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
4.1.1. Letak geografis Kota Makassar.....	52

4.1.2. Letak Administratif Kota Makassar	54
4.1.3. Kepadatan Penduduk	55
4.1.4. Visi dan Misi Kota Makassar.....	56
4.2. Profil Dinas Sosial Kota Makassar.....	59
4.3. Profil P2TP2A kota Makassar.....	69
4.4 Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di kota Makassar.....	76
4.5 Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar	80
4.5.1 Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas	82
4.5.1.1 Analisis Komunikasi	94
4.5.1.1.1 Metode Komunikasi Wawancara Pada Tahap Pengaduan dan Pelaporan Korban	96
4.5.1.1.2 Metode Komunikasi Pendampingan Pada Tahap Assessment dan Pencatatan Kasus	100
4.5.1.1.3 Metode Komunikasi Koordinasi Pada Proses Hukum dan Pendampingan Korban	101
4.5.1.1.4 Metode Komunikasi Outreach dan Konseling Pada Tahap Rehabilitasi dan Pemulangan Korban	102

4.5.1.1.5 Metode Komunikasi Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pada P2TP2A kota Makassar	103
4.5.1.2. Analisis Sumber Daya.....	104
4.5.1.2.1 Fasilitas Khusus Pada Proses Perlindungan dan Pendampingan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas.....	104
4.5.1.2.2 Sumber Informasi Pada Proses Perlindungan dan Pendampingan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas.....	107
4.5.1.2.3 Anggaran Operasional Pelaksanaan Perlindungan dan Pendampingan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas	109
4.5.1.3 Analisis Disposisi	110
4.5.1.3.1 Tingkat Komitmen dan Konsistensi Pelaksana Pada P2TP2A kota Makassar	110
4.5.1.4 Analisis Struktur Birokrasi	114
4.5.1.4.1 Efektivitas Struktur Birokrasi Pada Tim Gugus Kerja P2TP2A kota Makassar	114
4.5.1.4.2 Standar Operasional Prosedur Pada Proses Perlindungan dan Pendampingan Korban di P2TP2A kota Makassar.....	117
4.5.1.5 Analisis Aspek Eksternal (Kondisi Lingkungan Sosial)	119

4.5.2	Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas di kota Makassar	125
4.5.3	Tujuan Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas	128
4.5.4	Program-Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial kota Makassar	128
4.5.5	Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita Pada Dinas Sosial kota Makassar.....	131
4.5.5.1	Perencanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita di kota Makassar.....	137
4.5.5.1.1	Analisis Komunikasi	137
4.5.5.1.2	Analisis Sumber Daya.....	142
4.5.5.1.3	Analisis Disposisi	146
4.5.5.1.3	Analisis Struktur Birokrasi	149
4.5.5.2	Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pelatihan Keterampilan Perempuan Penyandang Disabilitas.....	151
4.5.5.2.1	Analisis Komunikasi	153
4.5.5.2.2	Analisis Sumber Daya.....	154
4.5.5.2.3	Analisis Disposisi	156
4.5.5.2.4	Analisis Struktur Birokrasi	159

4.5.5.2.5 Analisis Aspek Eksternal (Kondisi Lingkungan Sosial)	159
4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar	166
4.6.1 Faktor Pendukung	166
4.6.1.1 Komunikasi.....	166
4.6.1.2 Sumber Daya (Staf Pelaksana)	169
4.6.1.3 Disposisi.....	172
4.6.2 Faktor Penghambat.....	174
4.6.2.1 Struktur Birokrasi (Fragmentasi).....	175
4.6.2.2 Struktur Birokrasi (Standar Operasional Prosedur)	180
4.6.2.3 Sumber Daya (Anggaran)	180
4.6.2.4 Aspek Eksternal (Kondisi Lingkungan Sosial)	182
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	188
5.2 Saran	191
5.3 Daftar Pustaka.....	194

Daftar Tabel

1. Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Makassar.....	54
2. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar.....	55
3. Tabel 4.3 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Tahun 2016.....	77
4. Tabel 4.4 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Tahun 2017.....	77
5. Tabel 4.5 Jumlah Kasus kekerasan di P2TP2A kota Makassar.....	88
6. Tabel 4.6 Jumlah target pelaksanaan program khusus Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial kota Makassar.....	158
7. Tabel 4.7 Data Jumlah Sementara Bantuan Dinas Sosial kota Makassar terhadap Penyandang Disabilitas.....	160

Daftar Gambar

1. Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik.....	18
2. Gambar 2.2 Tahapan kebijakan Publik Menurut Ripley.....	19
3. Gambar 2.3 Kerangka Konsep.....	40
4. Gambar 4.1 Peta administrasi kota Makassar.....	53
5. Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar.....	62
6. Gambar 4.3 Struktur P2TP2A kota Makassar.....	73
7. Gambar 4.4 Skema Pendampingan dan Pelayanan Korban Kekerasan di P2TP2A kota Makassar.....	91
8. Gambar 4.5 Data Presentase Jumlah Laporan yang Masuk dengan korban Penyandang Disabilitas.....	120
9. Gambar 4.6 Alur Program Pemberdayaan Perempuan Disabilitas Dinas Sosial kota Makassar.....	134
10. Gambar 4.7 Skema Pelaksanaan program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial kota Makassar.....	152

Daftar Grafik

1. Grafik 4.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Umur....63
2. Grafik 4.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Anak dan Dewasa di
kota Makassar.....72
3. Grafik 4.3 Jumlah Presentase Jenis Tindak Kekerasan Terhadap
Anak dan Dewasa di kota
Makassar.....87
4. Grafik 4.4 Presentase Penyandang Disabilitas Menurut Status
Pekerjaan yang sudah di olah.....126

Daftar Matriks

1. Matriks 4.1 Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.....122
2. Matriks 4.2 Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.....163
3. Matriks 4.3 Hasil Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar 186

INTISARI

Muhammad Afdal Karim, Nomor Pokok E121 12 273, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar”** di bawah bimbingan **Dr. Indar Arifin, M.Si** dan **Rahmatullah, S.IP, M.Si**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 di Kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait dengan pemenuhan hak pemberdayaan, pemberdayaan dilaksanakan melalui program kerja Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita, dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan tangan. Proses perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A), perlindungan diberikan melalui proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penyalahgunaan. Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pemberdayaan dan perlindungan pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor pendukung dan penghambat; Pertama, faktor pendukung adalah faktor komunikasi, sumber daya (staf) dan disposisi, Kedua, faktor penghambat adalah faktor Struktur Birokrasi (SOP dan Fragmentasi), sumber daya (anggaran) dan faktor eksternal (lingkungan sosial).

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

Muhammad Afdal Karim, Student Identification Number E 121 12 273, Study program of Governance Science, Department of Political and Governance Science, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University, writing her thesis with the title **"Implementation of the Policies to Fulfill the Rights of Persons with Disabilities in Makassar City"**, Under the guidance of **Dr. Indar Arifin, M.Si** and **Rahmatullah, S.IP, M.Si**.

The purpose of this research is to know and analyze the implementation process of Regional Regulation Number 6 of 2013 in Makassar about the fulfillment of the rights of people with disability in Makassar city, and also factors that influence the process of implementation of the regulation.

The method used is a qualitative research method, that is giving description or explanation about data acquisition research procedure, data obtained from interview, observation, and archive

Based on the results of the research, the role of Makassar city government in giving protection rights and the right of empowerment of women and children with disability has been implemented by the regional work units into the sample in the research, namely the Social Department of Makassar, empowerment implemented through empowerment program for women with disability, skills such as sewing, baking and crafting. The process of protecting women and children with disabilities is implemented by the Center for Integrated Women Empowerment and Children of Makassar (P2TP2A), protection is provided through the process of assistance and handling cases of violence, exploitation, discrimination and neglect. Overall implementation of the policy of fulfilling the right of empowerment and the protection of its implementation has not been maximally due to several factors. The supporting and inhibiting factors; First, the supporting factors are communication factor, resource (staff) and disposition; Secondly, inhibiting factors are Bureaucracy Structure (SOP and Fragmentation), resources (budget) and external factors (social environment).

Keywords : Implementation, Policy, Fulfillment of Rights of Persons with Disabilities

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia.

Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.

Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu

terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena Penyandang Disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.

Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” (Pasal 41)

Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya dan identitas perempuan yang melekat

mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas (Pasal 2, Bab 1).

Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Masyarakat kota Makassar berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku pelaksana teknis dan Penyandang Disabilitas

serta pengadaan sarana penunjang untuk Penyandang Disabilitas (Bab 10,pasal 50) seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut.

Unsur lain yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yakni Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, lembaga-lembaga masyarakat, perusahaan swasta dan kelompok-kelompok masyarakat, dalam bentuk kerjasama dan kemitraan guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

Namun realisasi peraturan daerah ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pada sektor pemberdayaan penyandang disabilitas, isu disabilitas sangat jarang untuk menjadi pembahasan di setiap lini kehidupan, penyandang disabilitas hanya dipandang melalui sudut pandang proyek bantuan dan pemberian jaminan bukan pada pemberdayaan potensi-potensi yang dimilikinya, hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas sangat tergantung pada orang lain.

Jumlah Penyandang disabilitas di kota Makassar sebanyak 1.715 orang (Data Dinas Sosial kota Makassar, Tahun 2017) mayoritas menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak seperti fenomena pengemis eks-kusta dan penjual kaki lima yang tuna netra, mata pencaharian tersebut bahkan hanya menambah masalah sosial dan permasalahan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Penyandang disabilitas kerap disandingkan dengan kemiskinan dikarenakan keterbatasan fisik dan kemampuan yang menjadikan potensi terhadap penyandang disabilitas tidak mampu diaktualisasikan. Maka pemerintah dalam artian Pemerintah kota Makassar wajib untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas pun perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar, dikarenakan perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat beresiko diterima oleh Anak dengan disabilitas. Anak dengan disabilitas di jadikan objek *bullying*, objek perlakuan tidak pantas oleh orang-orang disekitarnya, maka pantas pun perlindungan dan perlakuan khusus sangat dibutuhkan oleh Anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga dianggap “aib” oleh keluarganya, “aib” yang tereduksi dan melembaga di persepsi masyarakat dan menjadi indikator penyebab perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas, dengan alasan perbedaan fisik dan mentalitas dengan anak-anak lain pada umumnya, tak pelik hal ini mengakibatkan ke eksklusifitasan yang dibangun oleh keluarga mengakibatkan anak penyandang disabilitas termarginalisasikan pada lingkungan sosialnya, dan hal ini menjadi salah satu sumbangan terbesar perlakuan diskriminatif, kekerasan yang diterima oleh penyandang disabilitas.

Tingkat pengetahuan keluarga yang rendah dalam memperlakukan anggota keluarganya yang disabilitas pun menjadi penyebab tindak kekerasan seksual dan sebagainya diterima oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu alas hukum Peraturan Daerah No.6 tahun 2013 kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas perlu diukur pelaksanaannya dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimakah implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar?
2. Faktor – faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat pada penulisan ini maka tujuannya adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan bahan pemikiran tentang konsep pengembangan ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah kota Makassar dalam menjalankan kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar secara efektif.
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka dibutuhkan teori-teori sebagai pedoman kerangka berpikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Pedoman tersebut disebut kerangka teori. Kerangka teori merupakan bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau masalah pokok yang ada dalam penelitian (Arikunto, 2002: 92).

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, pendapat, gagasan yang akan dijadikan titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

2.1 Implementasi

1 Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan penerapan. Implementasi diartikan sebagai sebuah pelaksanaan atau penerapan suatu program ataupun kebijakan yang telah dirancang atau didesain dan dijalankan secara keseluruhan. Secara singkat, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan, perwujudan dalam tindak nyata. *Van Master dan Van Horn* dalam (Wahab,

2002), merumuskan proses implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: *“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”*. Pengertian implementasi dalam pengertian luas adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan. Dijelaskan bahwa suatu proses interaksi diantara merancang dan menentukan sasaran yang diinginkan.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan (Wahab,2002).

Program kebijakan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program kebijakan akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat dalam berbagai aspek antara lain :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil dalam mencapai tujuan itu.
3. Adanya aturan-aturan yang harus di pegang dan prosedur yang harus di lalui.
4. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

2.2 Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Carl J. Federick (Tangkilisan, 2003) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan (kesulitan – kesulitan) dan kesempatan – kesempatan (tantangan) terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan

oleh Pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh Pemerintah.

Menurut Woll (Tangkilisan, 2003) kebijakan merupakan aktivitas Pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Kebijakan mencakup seluruh bagian aturan – aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

Dari pandangan ahli yang telah dijelaskan, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan mencakup seluruh bagian aturan – aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

2.3 Kebijakan Publik

Menurut Parsons (Wayne Parsons, 2005) kata “publik” berisi kegiatan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur dan diintervensi oleh Pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Publik itu dipandang sebagai suatu ruang atau domain

dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Sedangkan kata “kebijakan” menurut Heclo (Wayne Parsons, 2005) adalah istilah yang banyak disepakati bersama. Dalam penggunaan yang umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang “lebih besar” ketimbang keputusan tertentu, tetapi “lebih kecil” ketimbang gerakan sosial. Jadi, kebijakan (policy) adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Pengertian konsep publik dan kebijakan diatas, dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan maupun keputusan yang Pemerintah lakukan atau tidak dengan tujuan untuk mengatur masyarakat di suatu wilayah. Untuk keperluan analisis ada beberapa batasan kebijakan publik yang dapat digunakan salah satunya menurut Robert Eyestone, ia mengatakan kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit Pemerintah dengan lingkungannya.

Konsep kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (Budi Winarno, 2002) ini mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh Pemerintah, bukan swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak untuk dilakukan oleh badan Pemerintah. Batasan lain juga disebutkan oleh James Anderson, ia mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan publik ini

kemudian mempunyai beberapa implikasi yakni ; *Pertama*, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan sendiri. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh Pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan Pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat Pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang melibatkan Pemerintah.

Menurut Charles O. Jones (Tangkilisan, 2003) kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Goals* atau tujuan yang diinginkan,
2. *Plans* atau rancangan yang spesifik untuk mencapai tujuan,
3. *Program* yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,
4. *Decision* atau keputusan yaitu tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, dan

5. *Effect* yaitu dampak dari program baik disengaja maupun tidak dan primer maupun sekunder.

Lokus Pemerintahan, menurut Hoogerwerf kebijakan harus dipahami sebagai kebijakan Pemerintah yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh Pemerintah atas dasar kekuasaan yang dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka Pemerintah tidak punya arti apa – apa. Sementara substansi dari kebijakan Pemerintah adalah membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan tindakan oleh Pemerintah secara bersama – sama dengan pihak rakyat yang dikuasi dan diatur dan atau secara sepihak oleh Pemerintah terhadap rakyat.

Integritas seorang pemimpin atau pimpinan, pengakuan atas kekuasaan yang dimiliki akan melahirkan kewenangan untuk dapat berbuat. Demikian pula dengan kemampuan penciptaan tujuan yang sama dengan cara berpikir yang sama. Kekuasaan melahirkan kewenangan bagi Pemerintah untuk bisa mengeluarkan suatu kebijakan. Berbicara tentang kekuasaan, maka substansi yang harus diperhatikan adalah *influencing* atau sejauhmana kita mampu mempengaruhi publik memberikan dukungan terhadap kehendak yang diinginkan. Disinilah faktor kepemimpinan sebagai hal strategis.

Konsep “kewenangan”, substansi yang harus diperhatikan adalah *the willingness to serve* atau sejauhmana kemampuan dalam menciptakan kesediaan publik untuk membantu. Maka dari itu diperlukan kemampuan

yang dapat menciptakan 3 (tiga) faktor utama, yaitu: (1) *intergrity* (kejujuran), (2) *Common purpose* (tujuan yang sama), (3) *Common method of thinking* (metode berpikir yang sama).

Setiap kehendak yang dinyatakan, pada hakikatnya adalah merupakan hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang ada dan atau tersedia guna melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sejalan dengan konsep kebijakan yang dikemukakan oleh Dye (Tangkilisan, 2003).

2.4 Bentuk dan Macam Kebijakan

Keputusan yang dihasilkan oleh aktor kebijakan tersebut diturunkan dalam berbagai bentuk variasi (AG Subarsono, 2005). Adapun bentuk-bentuk kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

Bentuk kebijakan ditinjau berdasarkan pembuatnya:

1. Pusat: dibuat oleh Pemerintah atau lembaga Pemerintahan yang berkedudukan di pusat dan digunakan untuk mengatur seluruh warga negara dan wilayah Indonesia.
2. Daerah: dibuat oleh Pemerintah atau lembaga Pemerintahan yang berkedudukan di daerah dan digunakan untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Bentuk kebijakan ditinjau berdasarkan tujuannya:

1. *Law Order* adalah Kebijakan mengenai hukum dan tatanan hukum. Adapun bentuk kebijakan ini umumnya berupa undang-undang atau peraturan-peraturan yang diumumkan oleh Pemerintah.
2. *Distributive Order* adalah kebijakan yang bersifat mengarahkan penguasa dalam mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan oleh negara. Misalnya perijinan usaha, kekuasaan kepada kepolisian, Kejaksaan, dan lain-lain.
3. *Re-Distributive Order* adalah kebijakan yang bersifat mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap pelaksanaan tata Pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan negara secara umum. Bentuk kebijakan ini umumnya berupa kewajiban pembayaran pajak bagi warga negara.

Bentuk kebijakan ditinjau berdasarkan wujud nyata nya:

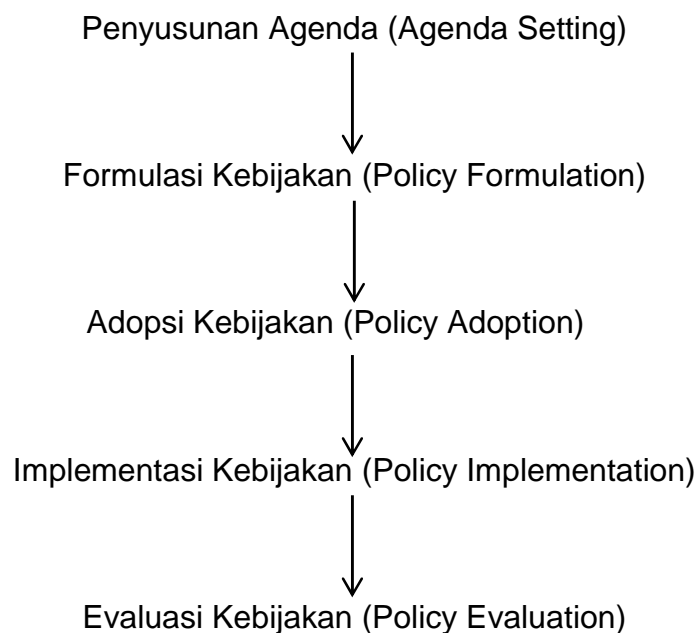
1. Gerakan (contohnya): Gerakan Makassar Gemar Membaca
2. Peraturan perundangan: Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
3. Pidato atau pernyataan pejabat publik: Pidato Walikota
4. Program: Program Makassar Tidak Rantasa'
5. Proyek: Proyek Center Point of Indonesia (CPI)

2.5 Tahapan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Seperti tahapan-tahapan kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1998) berikut ini.:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

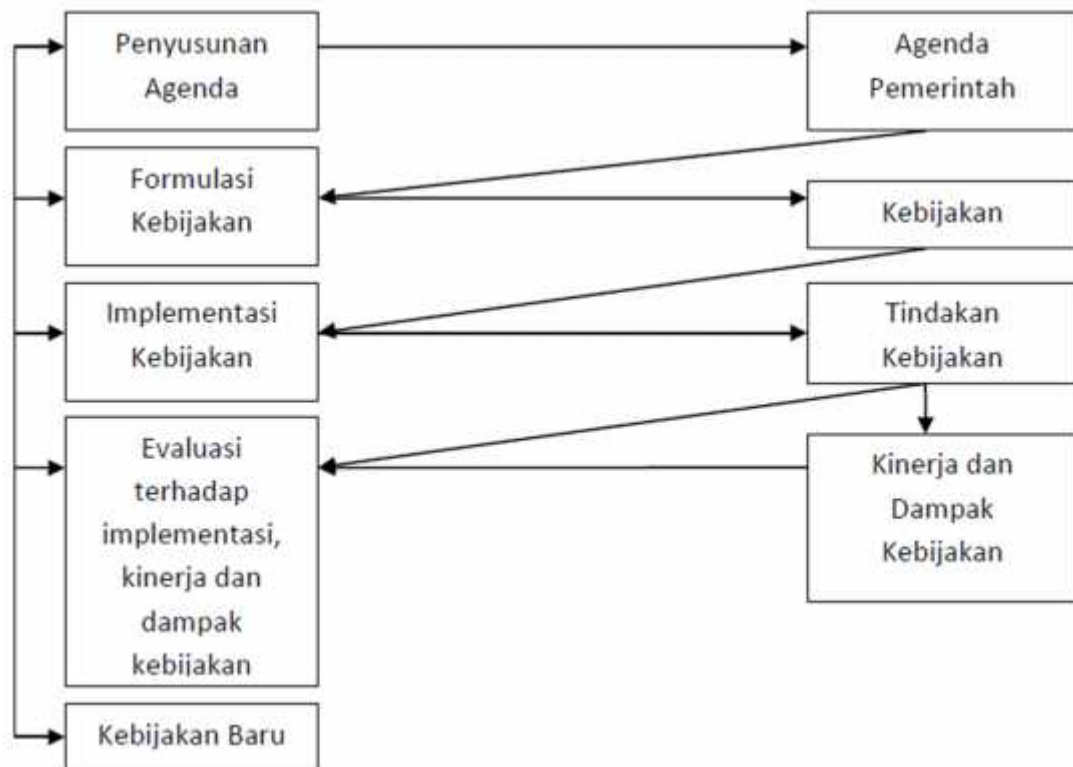


Gambar 2.1 Tahapan kebijakan Publik

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif kebijakan. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan 'bermain' untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Tahapan kebijakan publik juga dapat kita lihat dari pandangan Ripley (1985) berikut ini : (AG Subarsono, 2005)



Gambar 2.2 Tahapan kebijakan Publik Menurut Ripley

3. Tahap adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang banyak ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen Pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.6 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud bilamana tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dalam arti luas dapat diartikan sebagai alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 102) menyebutkan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) Pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan yang besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program pada tujuan kebijakan yang diinginkan.

Menurut Jones (Tangkilisan, 2003:17) terdapat tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi, yaitu:

1. Penafsiran: yaitu kegiatan yang menerjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. Organisasi: merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program kedalam tujuan kebijakan.
3. Penerapan: berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lainnya.

2.7 Model-Model Impelementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Kita akan melihat beberapa teori implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Model George C. Edward III (1980)

Menurut George C. Edwards III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi dan (d) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a) Komunikasi

Syarat pertama dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi, ada suatu kejelasan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya dalam komunikasi perlu adanya konsistensi dari aspek komunikasi yaitu bagaimana penetralisiran tugas dan fungsi tertentu yang akan dilakukan. Agar implementasi menjadi efektif maka mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Sukses tidaknya implementasi yang dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimanaaa pentransmisian tugas atau fungsi tertentu yang akan dilakukan.

b) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, serta sumber daya finansial.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka menjadi tidak efektif.

d) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (standart operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor yang bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Model ini disebut sebagai model kerangka analisis implementasi. Mazmanian dan Sabatier (Arpansiregar-wordpress) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems) sering disebut dengan variabel independen. Indikatornya adalah:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang (ability of statute to structure implementation) sering disebut dengan istilah variabel intervening, indikatornya adalah:
 - a) Kejelasan isi kebijakan
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.

- g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation)

sering disebut dengan istilah dependen. Indikatornya adalah:

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

3. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Teori ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002) menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Mereka menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini adalah:

- a. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi.

- b. Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah dalam organisasi yang bersangkutan.
- c. Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi (masalah kepatuhan).

Dari pandangan tersebut maka Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut:

- a. Jumlah masing-masing perubahan yang akan terjadi.
- b. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya hal ini adalah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari para implementor dolapangan relatif tinggi. Hal lain yang dikemukakan mereka bahwa yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel bebas itu adalah:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen implementasi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia seperti dana yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan.

3. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semua hal tersebut akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni menolak atau mendukung, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementor

Ini mencakup tiga hal, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, pemahaman para agen pelaksana terhadap

kebijakan, dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

4. Model Merilee S. Grindle (1980)

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dan konteks implementasinya. Kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Indikator isi kebijakan menurut Grindle adalah (1) Kepentingan yang dipengaruhi; (2) Tipe manfaat; (3) Derajat perubahan yang diharapkan; (4) Letak pengambilan keputusan; (5) Pelaksanaan program; (6) Sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi indikator – indikatornya adalah: (1) Kekuasaan, strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga penguasa; (3) Kematangan daya tanggap (Winarno, 2002).

Dari beberapa penjelasan model implementasi kebijakan yang telah dipaparkan di atas, Implementasi yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan teori model George C. Edward III (1980) dengan menggunakan 4 variable yang mempunyai korelasi antara objek penelitian yakni para pelaksana kebijakan dengan penyandang disabilitas perempuan dan anak itu sendiri.

2.8 Faktor- faktor dalam Implementasi Kebijakan

Faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut George C. Edwards III (2009:58) adalah sebagai berikut :

1. Faktor Komunikasi

Dalam implementasi, menurut George C Edwards III (2009:58) , komunikasi ini memiliki peranan penting, tidak hanya bagi para implementor, tapi juga bagi *policy maker*. Karena bagaimanapun juga dalam implementasi yang efektif, para *policy maker* dalam meminta para pelaksana (*implementor*) tidak sekedar dengan suatu petunjuk yang jelas, tetapi yang penting adalah adanya konsisten komunikasi dari atas ke bawah, dalam arti arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimana pun jelas dan konsisten ketentuan -ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan tentang suatu kebijakan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan

pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Faktor Kecenderungan (*Disposisi*)

Disposisi ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4. Faktor Struktur Birokrasi

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan harus juga memperhatikan faktor struktur organisasi ini, dimana struktur organisasi birokrasi juga mempengaruhi derajat keberhasilan implementasi kebijakan program.

1. Faktor- faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang sunggono (1994), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat,yaitu:

a) Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup

terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d) Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- 1) Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu :
- 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan Pemerintah.
- 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.

- 4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik
- 5) Apa bila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dimuat masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

2.9 Penyandang Disabilitas

Disabilitas atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksud adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, sedangkan yang dimaksud pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshidiqie (2012), bahwa secara etimologi, konsep- konsep Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas mental, Penyandang Disabilitas fisik dan mental merupakan tiga konsep yang berbeda-beda pengertiannya. Karena itu perkataan Penyandang Disabilitas tidak dipahami sebagai satu kesatuan konsep seperti yang sering di salah pahami dalam praktik. Kata Penyandang Disabilitas berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan.

2.10 Ragam Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas di bagi menjadi 4 ragam. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Penyandang Disabilitas fisik yang dimaksud ialah :

- 1 tidak dapat melihat atau buta (tunanetra)
- 2 tidak dapat mendengar atau tuli (tunarungu)
- 3 tidak dapat berbicara atau bisu (tunawicara)

- 4 cacat tubuh (tunadaksa)
- 5 cacat suara dan nada (tunalaras).

Penyandang Disabilitas Intelektual yang dimaksud yakni :

- a. sukar mengendalikan emosi dan sosial (tunalaras),
- b. cacat pikiran dan lemah daya tangkap atau idiot (tunagrahita)

sedangkan Penyandang disabilitas mental atau sensorik sebagaimana yakni penderita cacat lebih dari satu kecacatan (tunaganda).

2.11 Pemenuhan hak Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar

Penyandang Disabilitas di Indonesia cukup banyak jumlahnya sehingga tidak boleh diabaikan keberadaannya. Berdasarkan catatan Kementerian Kesejahteraan Sosial, jumlah populasi Penyandang Disabilitas di Indonesia mencapai 2.126.000 jiwa pada tahun 2012, dengan klasifikasi jenis kecacatan berbeda-beda. Sedangkan berdasarkan data Dinas Sosial kota Makassar tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah penyandang disabilitas yang hidup di kota Makassar sebanyak 1.715 orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Makassar No.6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar, Pemerintah daerah diamanatkan menjalankan tugas yakni ;

- a) menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;

- b) melaksanakan kebijakan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas ;
- d) memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e) mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemenuhan hak - hak Penyandang Disabilitas; dan
- f) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Sedangkan hak-hak yang dijamin didalam Peraturan Daerah kota Makassar No. 6 Tahun 2013, Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a) Kesamaan dan Kesempatan
- b) Aksesibilitas
- c) Habilitasi & Rehabilitasi
- d) Pemeliharaan taraf kesejahteraan
- e) Perlindungan khusus
- f) Perlindungan dan pemberdayaan perempuan Penyandang Disabilitas dan anak Penyandang Disabilitas;

Segala hak yang sejatinya dimiliki oleh warga negara maka berlaku pula bagi penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas kerap

mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tindakan kesewang-wenangan dari orang yang menganggap penyandang disabilitas tidak berdaya.

Perlakuan diskriminatif dan tindakan kekerasan tersebut sangat beresiko diterima oleh penyandang disabilitas perempuan dan anak, selain karena keterbatasan fisik dan kemampuannya, penyandang disabilitas perempuan dan anak juga menjadi objek tindakan kriminalitas sebab identitas perempuan yang melekat pada diri penyandang disabilitas. Melalui Peraturan Daerah kota Makassar, perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak penyandang disabilitas di kota Makassar, dijamin pada poin perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.

Pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan yang dimaksudkan adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi:

- a) Pelatihan kerja;
- b) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c) bantuan permodalan.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap

penyandang disabilitas perempuan. Sedangkan perlindungan penyandang disabilitas anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah No.6 tahun 2013 adalah perlindungan dari tindak ;

- 1.Diskriminasi
- 2.Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3.Penelantaran;
- 4.Kekejaman, kekerasan fisik, dan penganiayaan;
- 5.Ketidakadilan; dan
- 6.Pperlakuan salah lainnya.

2.12 Kerangka Konsep

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam melihat sistem kebijakan, terdapat 3 (tiga) elemen yang saling terkait, yaitu;

- a) Kebijakan
- b) Pelaku kebijakan dan
- c) Lingkungan kebijakan.

Kebijakan dikeluarkan Pemerintah dikeluarkan untuk melakukan pengaturan dalam masyarakat. Para pelaku kebijakan bertugas untuk menjalankan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan dari Pemerintah. Sedangkan lingkungan kebijakan mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut. Sedangkan pada proses pengimplementasian kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.



Gambar 2.3 : Kerangka konsep

Berangkat dari peraturan daerah No. 6 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar maka ada beberapa poin penting dalam melihat bagaimana implementasi kebijakan tersebut. Adapun indikator penilaian dalam pengimplementasi kebijakan

diantaranya ; adanya upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas berupa, pelatihan kerja, usaha ekonomis produktif dan bantuan permodalan bagi penyandang disabilitas, sedangkan perlindungan bagi penyandang perempuan dan anak penyandang disabilitas, adalah perlindungan berupa pendampingan dan pelayanan perempuan dan anak penyandang disabilitas dari tindak kekerasan fisik maupun non fisik, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi.

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III di tentukan oleh 4 variable yakni ; Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Birokrasi, selanjutnya dalam analisis akan di sesuaikan dengan hasil input data pada saat penelitian dilaksanakan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar, berdasarkan 4 variable tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada :

- Dinas Sosial kota Makassar,
- Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar serta
- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi selatan.

pemilihan lokasi tersebut dikarenakan objek tersebut merupakan instansi dan organisasi yang bertanggung jawab dalam hal terselenggaranya atau tidaknya pemenuhan hak pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Kualitatif yaitu merujuk pada "cara-cara" mempelajari aspek kualitatif dari objek yang hendak diteliti nantinya, penulis nantinya akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang implemetasi kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Penelitian ini akan lebih

menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut.

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara).

Informan adalah orang-orang yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait penelitian tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, catatan – catatan, arsip – arsip, materi – materi, serta *literature* lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dinas Sosial kota Makassar, Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat)
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)
3. Penyandang Disabilitas Perempuan Pada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan (Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Sulawesi Selatan)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.
- d. Penelusuran data online, yaitu data diperoleh dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3.7 Defenisi Operasional

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk memudahkan peneliti dikemukakan garis besar definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar adalah kebijakan yang menuntut terpenuhinya kebutuhan dasar hidup Penyandang Disabilitas secara layak dan manusiawi di segala aspek kehidupan.
- 2) Pemerintah kota adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di kota Makassar; dalam hal ini Dinas Sosial kota Makassar pada bidang Rehabilitasi Sosial dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A kota Makassar) yang berada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, bertanggungjawab dalam pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.
- 3) Adapun indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap korban penyandang disabilitas.

- Perlindungan Penyandang Disabilitas anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dari perlakuan :
 1. diskriminasi;
 2. eksploitasi,
 3. penelantaran;
 4. Kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan;
- Penyandang Disabilitas perempuan dan Penyandang Disabilitas anak korban kekerasan adalah Perempuan dan Anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
- Pemberdayaan penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
- Bentuk pemberdayaan penyandang disabilitas perempuan dan penyandang disabilitas anak meliputi:
 - a. pelatihan kerja sebagaimana dimaksud yakni pelatihan keterampilan wirausaha dan pendampingan pelaksanaan usaha;

b. bantuan permodalan sebagaimana yang dimaksud meliputi: bantuan sarana dan prasarana kerja dan fasilitasi bantuan modal kerja.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah sebagai berikut:
 1. Komunikasi (*Communication*) merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
 2. Sumber Daya (*Resources*) mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Sumber Daya Manusia (*Staff*). Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan

kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

- b) Fasilitas (*facility*) atau sarana dan prasarana yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
 - c) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*) juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
2. Disposisi (*Disposition*) adalah kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.
3. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek

pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

3.7 Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengelolaan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengelolaan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang panjang. Data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

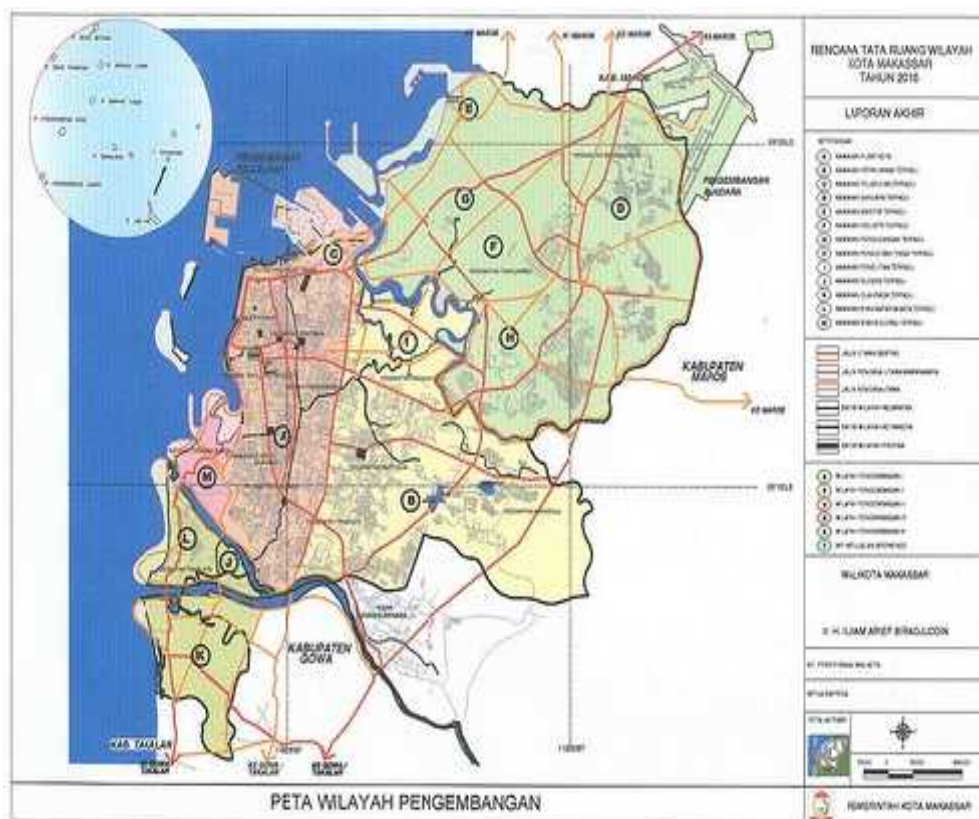
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak geografis Kota Makassar

Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat $119^{\circ} 18' 30,18''$ sampai dengan $119^{\circ} 32' 31,03''$ BT dan $5^{\circ} 00' 30,18''$ sampai dengan $5^{\circ} 14' 6,49''$ LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya.



Gambar 4.1

Peta administrasi kota Makassar

Adapun luas wilayah kota Makassar berdasarkan luas kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Makassar

Kecamatan	Luas Wilayah dan Persentase	
	Luas Area (km2)	Persentase (%)
Mariso	1,82	1,04
Mamajang	2,25	1,28
Tamalate	20,21	10,15
Rappocini	9,23	5,25
Makassar	2,52	1,43
Ujung Pandang	2,63	1,50
Wajo	1,99	1,13
Bontoala	2,10	1,19
Ujung Tanah	5,94	3,38
Tallo	5,83	3,32
Panakukang	17,05	9,70
Manggala	24,14	13,73
Biringkanaya	48,22	27,43
Tamalanrea	31,84	18,12
Kota Makassar	17,577	100,00

Sumber : RPDJM kota Makassar 2014

4.1.2 Letak Administratif Kota Makassar

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros

- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

4.1.3 Kepadatan penduduk

Kota Makassar kini berkembang tidak lagi sekedar *gateway* namun diposisikan sebagai ruang keluarga (*living room*) di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, yang salah satunya adalah jumlah penduduk. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar

Kecamatan	Populasi	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
	2012	2013	
Mariso	56.989	56.578	0,59
Mamajang	60.172	58.087	- 0,35

Tamalate	174.282	182.939	2,89
Rappocini	154.101	156.665	1,81
Makassar	83.328	81.054	- 0,25
Ujung Pandang	27.440	26.477	- 0,94
Wajo	24.942	27.556	- 1,76
Bontoala	55.278	52.631	- 0,88
Ujung Tanah	47.618	46.836	0,21
Tallo	136.972	138.419	1,10
Panakukang	144.199	144.997	0,94
Manggala	119.409	130.943	4,24
Biringkanaya	171.084	195.906	5,88
Tamalanrea	105.249	108.984	2,14
Kota Makassar	1.361.063	1.408.072	1,78

Sumber : RPJDM Kota Makassar 2014

4.1.4 Visi dan Misi Kota Makassar

Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada akhir periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi Kota Makassar dalam RPJPD 2005-2025 dan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

Visi Kota Makassar 2005-2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Terhadap visi Kota

Makassar dalam RPJMPD 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2013- 2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang relevan dengan isu strategis Kota Makassar.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintah kota Makassar 2014-2019 adalah:

”Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua”

Visi Pemerintah kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan “orientasi global”, dalam RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi dalam RPJPD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi dalam RPJMD 2014-2019. Pokok visi “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi dalam RPJPD, pada visi dalam RPJMD 2014-2019 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018, relevansi visi Pemerintah kota Makassar 2014-2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama

Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Pernyataan visi Pemerintah kota Makassar 2019 memiliki tiga pokok visi yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode 2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.

Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar dunia”.

Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.

Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial dan kemampuan diri (termasuk kelompok

disabilitas). Pokok visi ini dapat diristalkan sebagai terwujudnya “pelayanan publik standar dunia dan bebas korupsi”.

Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah sebagai berikut:

- Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera standar dunia
- Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berstandar dunia
- Mereformasi tata Pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi

4.2 Profil Dinas Sosial Kota Makassar

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Organisasi Departemen dan keputusan Presiden NO. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu

dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten / Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di Jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung pandang Baru, kecamatan Tallo Kota Makassar, berada pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ujung Pandang Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah:

"Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat"

Makna dari visi yang dimiliki tersebut adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan

kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

Misi Dinas Sosial diterapkan sebagai berikut:

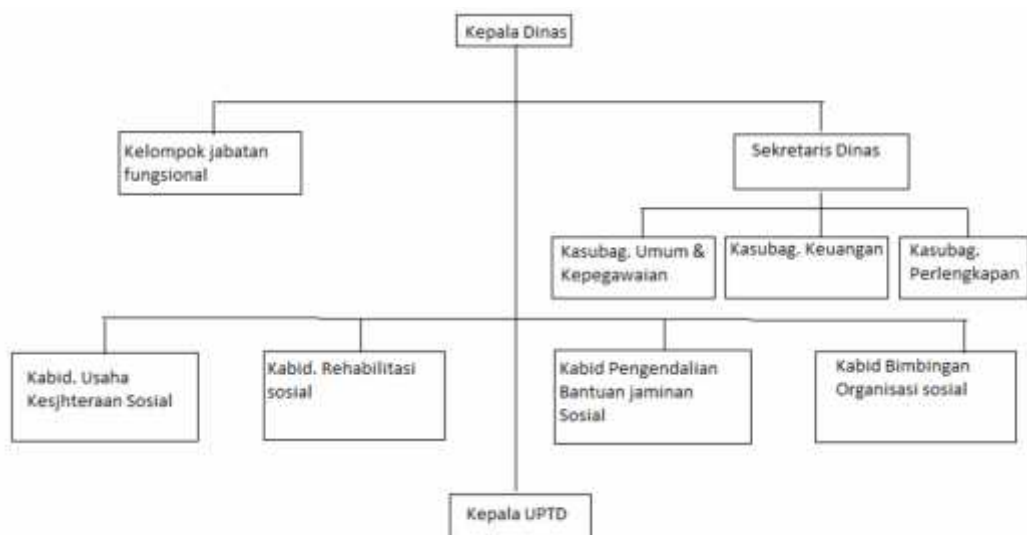
1. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat.
2. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan tidak beruntung.
3. Mengembangkan sistem perlindungan sosial.
4. Melakukan jaminan sosial
5. pelayanan rehabilitasi sosial secara optimal.
6. Mengembangkan pemberdayaan sosial.

Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan.

2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.
 3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/*stakeholders* khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut :



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perlenngkapan
3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Pembinaan Keluarga dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Bimbingan Karang taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - c. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
 - b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial

6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- b. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
- c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar.

4. Tugas Pokok

1. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundangundangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada point 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi partisipan sosial masyarakat, perlindungan sosial, jaminan

sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.

- Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, serta pembinaan organisasi sosial.
- Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta bimbingan organisasi sosial
- Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

3. Bidang Usaha Kesejahteraan sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, kegiatan dibidang penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan pelaksanaan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial, dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran.

5. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat fakir miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar.

6. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap organisasi sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta kesetiakawanan.

5. Bidang Kewenangan Dinas Sosial

1. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah kabupaten/kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Penyuluhan dan bimbingan sosial
3. Pembinaan nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan
4. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti)
5. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup kabupaten/kota
6. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti)
7. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat
8. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis dan eks narapidana)

9. Pemberdayaan keluarga miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi
10. Pemberdayaan karang taruna/organisasi kepemudaan
11. Pemberdayaan organisasi sosial/LSM lingkup kabupaten/kota
12. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat
13. Pemberdayaan dunia usaha (partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial)
14. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup kabupaten/kota
15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup kabupaten/kota
16. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia)
17. Penanggulangan korban napza
18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga
19. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja
20. Penelitian dan uji coba pembangunan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota. Penyelenggaran sosial informasi kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota
21. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota
22. Penyelenggaran koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial lingkup kabupaten/kota

23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

4.3 Profil Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan

Perempuan dan Anak kota Makassar

Sesuai pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Oleh karena itu, Pemerintah harus melindungi warga negaranya dari praktek penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia termasuk di dalamnya apraktek perdagangan orang.

Untuk itu Pemerintah melalui Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat mandat sebagai pelaksana untuk memastikan hak-hak Perempuan dan Anak tersebut terpenuhi. Ada beberapa target yang ingin dicapai dari pelaksanaan mandat ini. Setiap pencapaian output sudah ada indikatornya masing-masing. Dan ketentuan tersebut diatur dalam persturan No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan. Dan atas dasar inilah maka dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh provinsi di Indonesia.

Di Makassar, P2TPA didirikan pada tahun 2010 melalui Surat Keputusan Walikota Makassar No. 463./250/Kep/II/2010 tentang

Peembentukan Tim Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kota Makassar Tahun 2010. Berdasarkan regulasi ini sehingga berjejaring dengan organisasi non Pemerintah dalam membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (P2TP2A) Kota Makassar, yang dapat menjadi acuan bagi seluruh petuaran serta mitra kerja yang terkait dalam (P2TP2A). Dengan adanya Kantor P2TPA Kota Makassar pada tahun 2015 yang berada di luar kantor Kedinasan BPPPA membutuhkan keberpihakan Pemkot Makassar terhadap Perempuan dan Anak. Sehingga Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perlindungan Anak berinisiatif untuk membentuk Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A).

1. Dasar Hukum Terkait KTP/KTA

2. UU No. 32 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 35 / 2014 tentang Perlindungan Anak
4. UU No. 23 /2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. UU No. 13 / 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
6. UU No. 21 / 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPO)
7. UU No. 11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

8. INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang GNAKSA
9. Permenkes tentang Pelaporan Indikasi Kekerasan oleh Nakes
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Kesehatan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk belanja urusan wajib)

2. Tujuan Pembentukan

1. Memfasilitasi kebutuhan Perempuan dan Anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan
2. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan Perempuan dan Anak secara menyeluruh

3. Sasaran

1. Perempuan dan Anak yang memerlukan peningkatan mutu pendidikan diberbagai bidang
2. Perempuan dan Anak yang memerlukan peningkatan mutu kesehatan
3. Perempuan dan Anak yang memerlukan peningkatan mutu ekonomi

4. Perempuan dan Anak yang memerlukan perlindungan terhadap kekerasan
5. Perempuan dan Anak yang memerlukan data dan informasi tentang trafficking
6. Warga masyarakat yang memerlukan akses informasi
7. Pengambilan Kebijakan Pemerintah
8. Lembaga Pemberi layanan (SKPA, Lembaga Vertikal, LSM)

4. Kriteria Petugas Dalam Melakukan Pelayanan P2TP2A kota Makassar Petugas yang menangani pengaduan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan tentang gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Memiliki pengetahuan tentang penerimaan dan manajemen kasus
3. Memiliki pengetahuan tentang cara-cara penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang langsung maupun telepon



Gambar 4.3

Struktur P2TP2A kota Makassar

5. Divisi-Divisi dalam Struktur P2TP2A kota Makassar :

1. Divisi pengaduan dan pendampingan bertugas menerima pengaduan dan melakukan registrasi korban, melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan, dan memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.
2. Divisi kesehatan dan konseling, bertugas menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis,

konseling melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya.

3. Divisi rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bertugas memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman, (shelter) bagi korban kekerasan, memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban, memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal, memfasilitasi reintegrasi sosial.
4. Divisi bantuan dan pendampingan hukum, bertugas memfasilitasi perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan, melakukan pendampingan ke lembaga bantuan hukum, kepolisian, pengadilan, memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melapor terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

6. Keanggotaan Dalam Divisi P2TP2A kota Makassar

a. Divisi Pengaduan dan Pendampingan

Koordinator : Kepala Sub. Bidang Perlindungan Anak Badan

Pemberdayaan Perempuan Anak kota Makassar.

Anggota :

- Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan
- Ketua Lembaga Hukum (LBH) APIK

- Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)
- Widyaprasetya
- UMT Pemberdayaan Perempuan Kopertis Wilayah IX (UP2K)

b. Divisi Kesehatan dan Konseling

Koordinator : Dinas Kesehatan Kota Makassar

Anggota :

- RSUD Daya kota Makassar
- Lembaga Psikologi UNM
- Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI Sul-Sel)
- Departemen Gama kota Makassar
- Institusi Saribattang
- Psikiater: dr. Ifa Tunisya, SPKJ

c. Divisi Reabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi

Koordinator : Dinas Sosial kota Makassar

Anggota :

- Dinas Tenaga Kerja Makassar
- YAPTA-U
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar
- Forum Pemerintah Masalah Perempuan Sulawesi Selatan

d. Divisi Bantuan dan Penegakan Hukum.

Koordinator : Bagian Hukum Sekretariat kota Makassar

Anggota :

- Polrestabes kota Makassar
- Polretabes Pelabuhan
- Kejaksaan Negeri Makassar
- LBH APIK
- LBH Makassar
- Fik Ornop Sulawesi Selatan

4.4 Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar jumlah Penyandang Disabilitas dari tahun 2016 hingga tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 30%, dari total Penyandang Disabilitas tahun 2016 sebesar 1.390 orang menjadi 1.715 orang di tahun 2017.

Tabel 4.3**Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Tahun 2016**

NO	JENIS KECACATAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TUNA DAKSA	7	15	22 orang
2	TUNA NETRA	108	66	174 Orang
3	TUNA RUNGU WICARA	24	25	49 Orang
4	DISABILITAS BERAT	264	181	445 Orang
5	EKS KUSTA	405	295	700 Orang
	JUMLAH	808	582	1.390 Org

Sumber; Data Sekunder Dinas Sosial kota Makassar, 2016

Tabel 4.4**Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Tahun 2017**

NO	JENIS KECACATAN	JUMLAH		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TUNA DAKSA	7	15	22 orang
2	TUNA NETRA	108	66	174 Orang
3	TUNA RUNGU WICARA	93	72	165 Orang
4	TUNA RUNGU	68	41	109 Orang
5	DISABILITAS RINGAN	264	181	445 Orang
6	DISABILITAS BERAT	64	36	100 Orang
7	EKS KUSTA	405	295	700 Orang
	JUMLAH	1009	706	1.715 Org

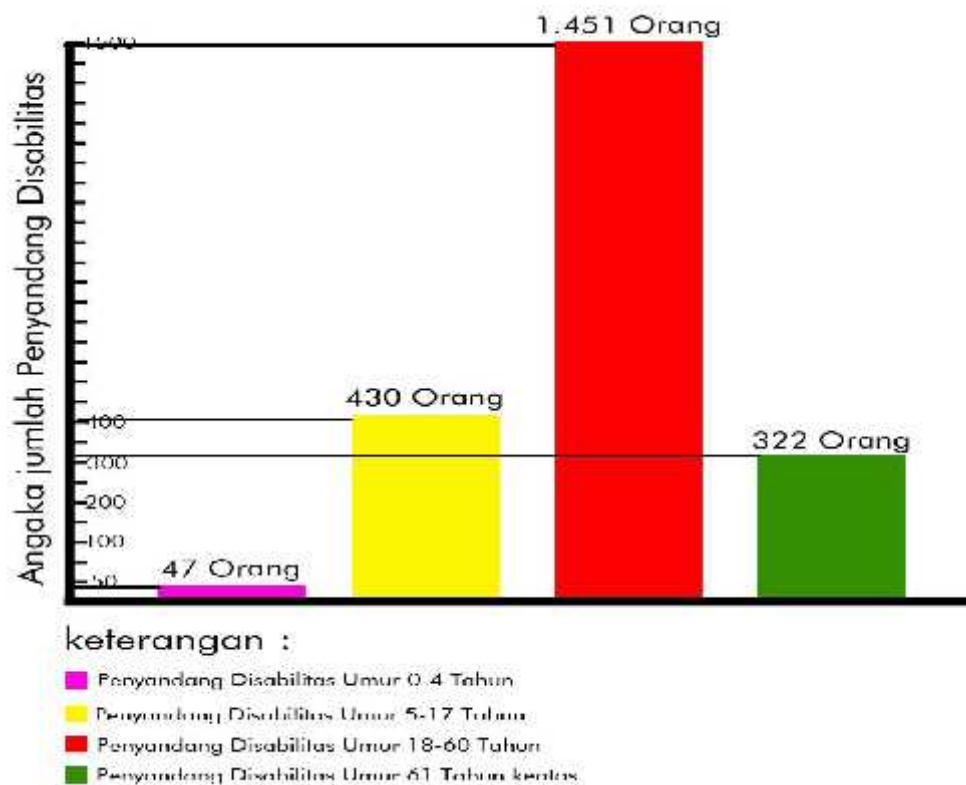
Sumber; Data Sekunder Dinas Sosial kota Makassar, 2016

Bertambahnya jumlah Penyandang Disabilitas salah satunya di indikasikan oleh imigrasi Penyandang Disabilitas dengan kategori

penyandang kusta, penyandang kusta dari daerah biasanya ke Kota Makassar dengan tujuan untuk melakukan pengobatan dan pasca pengobatan Penyandang Disabilitas tersebut memilih untuk menetap di Kota Makassar seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

“Jadi di Makassar itu kan ada Rumah Sakit Kusta, jadi biasanya Penyandang eks-kusta yang sudah berobat di Makassar itu tidak kembali kekampungnya, mereka kebanyakan diampung oleh teman-temannya sesama kusta di kampung kusta itu, nah selama di Makassar mereka biasanya memilih bekerja sebagai pengemis-pengemis kursi roda dan mereka sudah tidak mau kembali ke daerah asalnya dengan alasan tidak ada pekerjaan yang bisa mereka kerjakan disana dan penghasilan mereka selama bekerja di Makassar terbilang banyak ” (wawancara, 10 Mei 2017)

Kondisi sosial Penyandang Disabilitas umumnya di nilai rentan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan. Kebanyakan masyarakat terlalu melihat pada kedisabilitasannya tanpa mempedulikan potensi lain yang menonjol dari mereka. Stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas menyebabkan mereka kesulitan mengembangkan potensinya secara maksimal, sehingga mereka tak bisa mendayagunakan dirinya dan menjadikan dirinya tergantung pada orang lain. Berikut jumlah Penyandang Disabilitas di kota Makassar berdasarkan golongan umurnya;



Grafik Data 4.1

Grafik Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Umur

Masalah fenomena sosial yang timbul terkhusus bagi para Penyandang Disabilitas yang tingkat pendidikannya rendah, sarana pendidikan yang sangat terbatas dan jauh dari pendidikan inklusif mengakibatkan banyaknya Penyandang Disabilitas yang hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Luar Biasa dan tak sedikit dari mereka yang tidak bersekolah karena sarana dan prasarana yang tidak aksesibel dan tidak ramah untuk Penyandang Disabilitas. Kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan

terjadinya masalah sosial untuk Penyandang Disabilitas seperti kebiasaan hidup bergelandangan, mengemis di jalan raya dan tempat-tempat ibadah, dan ketergantungan sosial lainnya.

Salah satu permasalahan yang serius dihadapi Pemerintahan Kota Makassar adalah pendataan tentang jumlah Penyandang Disabilitas yang tersebar di Kota Makassar. Sejauh ini ada 2 versi yang ditemukan terkait jumlah Penyandang Disabilitas yakni versi dari Instansi Pemerintah yang dimaksudkan Dinas Sosial Kota Makassar dan versi Organisasi Masyarakat yang dimaksudkan yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan. Permasalahan Pendataan ini berdampak pada tidak terjangkaunya Penyandang Disabilitas yang seharusnya mendapatkan bantuan khusus oleh Pemerintah Kota.

4.5 Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud bilamana tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan sesuai yang diinginkan.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena negara berkewajiban dalam menjamin dan melindungi kesejahteraan hidup warga negaranya.

Upaya Pemerintah kota Makassar dalam memperhatikan Penyandang Disabilitas Kota Makassar telah terlihat dengan adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Negara melalui Peraturan Daerah kota Makassar telah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah kota Makassar untuk menjamin terwujudnya hak-hak Penyandang Disabilitas agar setara dengan orang-orang lainnya. Hak-Hak yang dimaksudkan di dalam Peraturan Daerah tersebut ialah Hak ;

1. Kesamaan dan Kesempatan
2. Aksesibilitas
3. Habilitasi & Rehabilitasi
4. Pemeliharaan taraf kesejahteraan
5. Perlindungan khusus
6. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan Penyandang Disabilitas dan anak Penyandang Disabilitas;

Persoalan Penyandang Disabilitas bukan hanya menjadi permasalahan di sektor sosial saja melainkan hal ini menjadi persoalan multi sektor baik pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi dan berbagai macam sektor penghidupan lainnya, termasuk hal yang sangat rentan terjadi yaitu perlakuan tindak kekerasan terhadap disabilitas Perempuan dan Anak dengan kedisabilatasannya. Perlakuan yang kerap terjadi yakni kekerasan seksual, penyiiksaan, dan perlakuan diskriminatif seperti *bullying* yang sering dialami oleh anak Penyandang Disabilitas, maka dari itu peneltian ini memfokuskan pada poin Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas dan Anak Penyandang Disabilitas.

4.5.1 Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar sebagai daerah dengan komposisi jumlah penduduk yang beragam, menyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduknya memiliki masalah spesifik yang beragam. Salah satu masalah yang menjadi keperihatinan Pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan Perempuan dan Anak. Faktor kemiskinan, beragamnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan makin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat Perempuan dan Anak rentan terhadap permasalahan trafficking dan kekerasan lainnya.

Perempuan yang hidup dengan disabilitas, bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami menjadi berlapis. Artinya diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami tidak hanya karena mereka adalah Penyandang Disabilitas, tapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan, yang sebagian besar dari mereka hidup dengan kemiskinan.

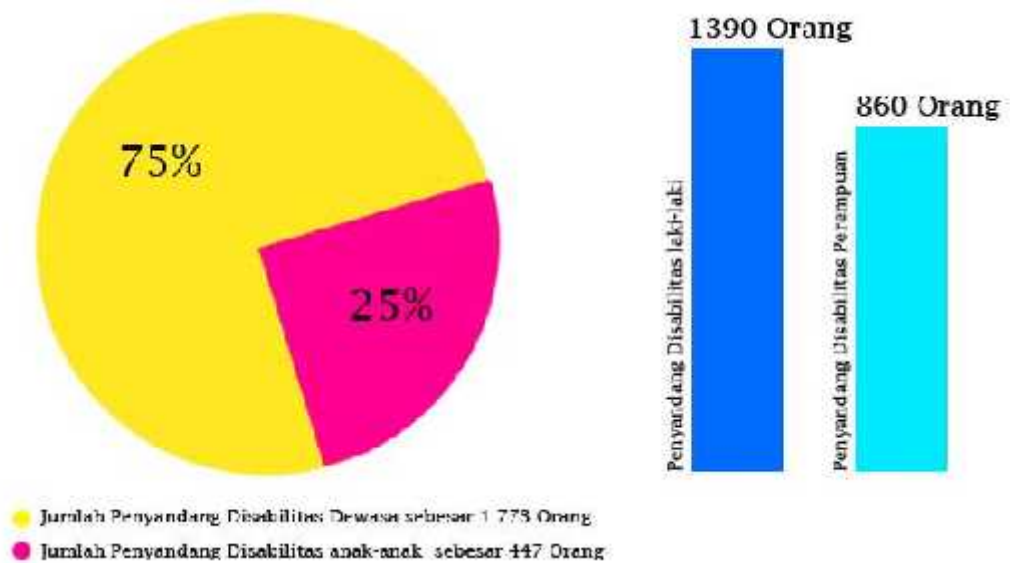
Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas diwujudkan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2010 dibawah Badan Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk Pemerintah atau berbasis masyarakat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Makassar mempunyai peran sebagai berikut:

1. Sebagai pusat pelayanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan
2. Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

3. Sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan

Sejak Oktober 2016 sampai dengan April tahun 2017 jumlah kasus yang berhasil dicatat dan didampingi P2TP2A kota Makassar sebanyak 128 kasus dan 2 kasus diantaranya dialami oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas yang terjadi diranah domestik dan publik dengan berbagai jenis kekerasan dengan rincian dan jenis penanganan layanan psikologis bantuan hukum serta penguatan ekonomi. Hal ini mendorong Pemerintah kota Makassar agar terus berupaya untuk melindungi Perempuan dan Anak serta memenuhi hak-hak mereka yang menjadi korban dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A.

Berikut presentase jumlah perbandingan penyandang disabilitas perempuan dan anak di kota Makassar menurut data Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan.



Grafik Data 4.2

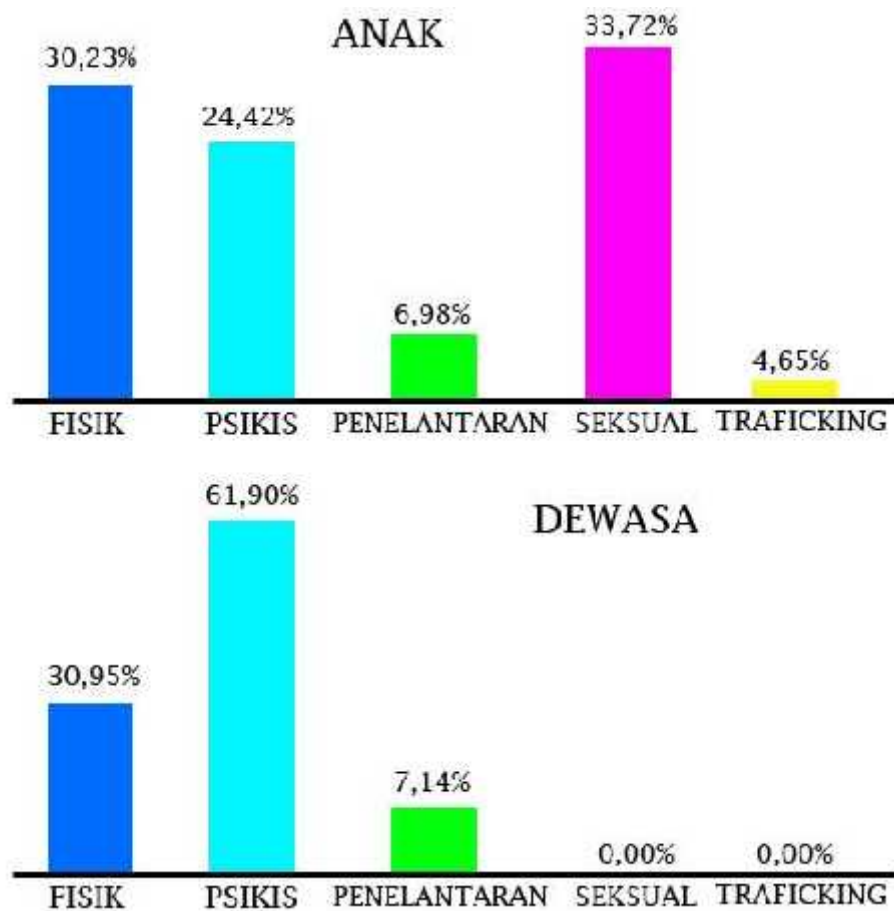
**Grafik jumlah Penyandang Disabilitas anak dan dewasa di kota
Makassar**

Data diatas menunjukkan bahwa ada jumlah signifikan terkait keberadaan penyandang disabilitas perempuan dan anak di kota Makassar, hal tersebut pun menjadi acuan mengapa perlindungan khusus untuk perempuan dan anak perlu dijamin oleh Pemerintah. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas perempuan.

Perempuan penyandang disabilitas sangat rawan akan perlakuan kekerasan seksual dari orang lain. Pelecehan terhadap anak-anak *disable* sering terjadi. Kekerasan terhadap anak perempuan *disable* juga sangat beragam seperti temuan kasus di lapangan. Para penyandang disabilitas perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, baik pelecehan seksual, perkosaan, bahkan menjadi "*addicted*" dengan perilaku seksual yang dialaminya, oleh orang terdekatnya, baik masih keluarga maupun pekerja di rumah keluarga tersebut. Salah satu temuan kasus yang pernah ditangani oleh P2TP2A kota Makassar disampaikan oleh Pak Makmur selaku koordinator Tim Reaksi cepat Tanggap P2TP2A kota Makassar.

"Kasus yang khusus korbannya penyandang disabilitas itu kemarin yang kami tangani adalah kasus pencabulan anak disabilitas yang mengalami hambatan bicara di pasar terong, dan yang terakhir kasus penyandang disabilitas yang dibawa lari oleh pacarnya". (wawancara, 12 Mei 2017)

Selama bulan Oktober 2016 s/d April 2017 jumlah kasus yang ditangani langsung oleh P2TP2A kota Makassar sebanyak 128 dengan rincian kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terjadi di ranah publik dan domestik. Berikut presentasi tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di kota Makassar berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar.



Grafik Data 4.3

Grafik Jumlah Presentase Jenis Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Dewasa di kota Makassar

Data diatas menunjukkan bahwa presentase jumlah jenis kekerasan yang terjadi pada anak tersebut lebih rentan diterima dibandingkan jenis kekerasan yang diterima oleh orang dewasa. Perkiraan risiko menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas secara signifikan berisiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka tanpa disabilitas: 3,7 kali lebih besar untuk berbagai

macam bentuk kekerasan, 3,6 kali lebih besar untuk kekerasan fisik, dan 2.9 kali lebih besar untuk kekerasan seksual. Anak-anak dengan disabilitas mental atau intelektual ditemukan 4,6 kali lebih besar kemungkinannya untuk menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan rekan-rekan mereka tanpa disabilitas. Berikut data jenis kekerasan yang dicatat P2TP2A kota Makassar selama kurun tahun 2016.

Tabel 4.5
Jumlah Kasus kekerasan di P2TP2A kota Makassar

NO	JENIS KEKERASAN	JUMLAH
1	Fisik Dewasa	60 kasus
2	Penelantaran Dewasa	7 kasus
3	Seksual Dewasa	7 kasus
4	Trafficking Dewasa	0
5	Psikis Dewasa	58 Kasus
	JUMLAH	132 kasus
1	Fisik Anak	38 kasus
2	Penelantaran Anak	6 kasus
3	Psikis Anak	24 kasus
4	Seksual Anak	41 kasus
5	Trafficking Anak	8 kasus
	JUMLAH	117 kasus

Sumber; Data Sekunder P2TP2A kota Makassar, 2016- April 2017

Sedangkan jenis kekerasan pada perempuan dewasa yaitu kekerasan fisik 13 kasus, fisikis 26 kasus, seksual 0 kasus, pelantaran 3 kasus, trafikking 0 kasus. Sementara pada kekerasan anak yaitu kekerasan fisik 26 kasus, fisikis 21 kasus, seksual 21 kasus, penelantaran 6 kasus, trafikking 4 kasus.

Jumlah Kasus kekerasan penyandang disabilitas di P2TP2A kota Makassar

NO	JENIS KEKERASAN	JENIS KEDISABILITASAN	DEWASA	ANAK
1	Fisik	-	-	-
2	Penelantaran	-	-	-
3	Psikis	-	-	-
4	Seksual	Tuna Grahita	-	1 Kasus
5	Trafficking	Tuna Wicara	1 Kasus	-
	JUMLAH			2 KASUS

Sumber; Data Primer 2017

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa terhitung hingga April 2017 jumlah korban kekerasan penyandang disabilitas yang diterima oleh P2TP2A kota Makassar sebanyak 2 kasus diantaranya dialami oleh penyandang disabilitas tuna grahita dan tuna wicara.

Jumlah kasus yang ditangani hampir semua korban mengalami dampak yang lebih dari sesuai dengan jenis kekerasannya, dan secara umum antara lain :

- Dampak fisik ; luka memar, patah, lebam, lecet vagina, benjolan dikepala terganggu saat buang air kecil dan sakit tenggerokan, demam panas dan sariawan.
- Dampak fisikis ; malu, trauma, takut, kesal, sedih, labil, putus asa, marah, kecewa, tidak percaya diri, daya ingat kurang, dll.
- Dampak sosial ; terganggu interaksi dengan orang lain, menyendiri, dikucilkan dan jadi omongan tetangga.
- Dampak pendidikan ; pindah sekolah, malas belajar, malu dan kurang konsentrasi belajar.
- Dampak seksual ; hamil, terganggu hubungan seksual dan kecanduan seks

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Makassar memiliki 4 proses tahapan perlindungan korban dengan cara pendampingan korban yang diterima oleh P2TP2A kota Makassar, 4 Tahapan ini kemudian menjadi tugas setiap divisi yang ada di P2TP2A kota Makassar, berikut 4 Tahapan proses perlindungan dan pendampingan korban berkaitan dengan tugas kerja 4 divisi di P2TP2A kota Makassar :

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan ;

Divisi ini bertugas melayani dan merespon laporan korban, yang masuk ke P2TP2A, umumnya divisi ini melayani Tahapan proses registrasi korban dan Tahapan Assessment kebutuhan korban.

5 Divisi Bantuan dan Pendampingan korban ;

Divisi ini bertugas memberikan pendampingan proses hukum korban baik melalui jalur litigasi dan non litigasi, untuk kebutuhan medis korban pada proses hukum divisi ini bekerja dibantu dengan divisi;

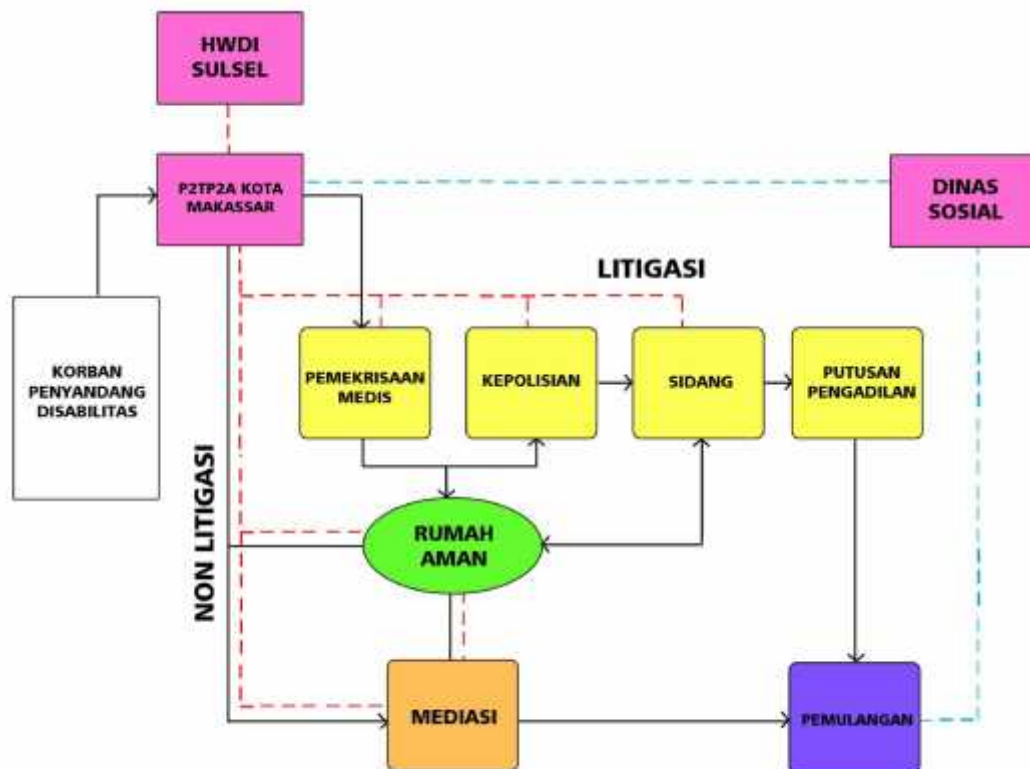
6 Divisi Kesehatan dan Konseling

Divisi ini bertugas memberikan pelayanan kesehatan dan konseling pada saat proses hukum korban hingga pasca proses hukum korban sampai korban dinyatakan pulih dari trauma atau gangguan kesehatannya.

7 Divisi Rehabilitasi Sosial dan Pemulangan

Divisi ini bertugas pada tahapan proses pemulangan korban yang kasusnya telah dinyatakan di tutup, dan korban dinyatakan aman dari intimidasi pihak lain.

Berikut alur perlindungan dan pendampingan korban perempuan dan anak penyandang disabilitas dalam penanganan kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar



Gambar 4.4

Skema Pendampingan dan Pelayanan Korban Kekerasan di P2TP2A kota Makassar

- **Tahap registrasi korban**

Laporan yang masuk ke P2TP2A kota Makassar maupun korban yang secara langsung melapor ke P2TP2A kota Makassar akan diregistrasi terlebih dahulu dengan melampirkan surat-surat identitas korban dan mengisi formulir pengaduan korban apabila yang masuk itu adalah laporan kasus maka pihak dari P2TP2A kota Makassar akan menjangkau atau mendatangi korban, dalam melakukan penjangkauan P2TP2A memperhatikan aspek

keamanan baik bagi korban, keluarga korban ataupun petugas unit pelayanan, penjangkauan dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan korban tidak dalam keadaan yang buruk .

Korban dengan kondisi fisik yang luka-luka dan sakit ataupun dalam keadaan trauma dan tertekan akan ditangani oleh psikologi ataupun diberikan penanganan medis terlebih dahulu, dibawa dan diperiksa sebelum memasuki tahapan Assessment dan proses pendampingan hukum.

- **Tahap Assessment dan Rapat kasus**

Korban yang telah diregistrasi oleh pihak P2TP2A kota Makassar ataupun yang telah diberikan penanganan medis, kemudian dilakukan proses Assessment atau pengkajian kasus dan pengenalan kebutuhan-kebutuhan korban oleh pihak P2TP2A, hasil dari proses assessment kemudian akan di rapatkan oleh pihak P2TP2A agar dapat menghasilkan putusan bersama dalam rangka penanganan kasus korban.

- **Tahap Bantuan Hukum dan Pendampingan Korban**

Korban yang telah siap untuk dimintai keterangan kemudian di wawancarai agar mendapatkan kronologi ataupun bukti-bukti penting untuk memperkuat proses hukum korban. Proses ini di dampingi oleh pihak-pihak terkait seperti, psikologi, pengacara, ataupun kepolisian.

Untuk mendapatkan alat bukti yang mendukung P2TP2A kota Makassar bersama pihak-pihak terkait melakukan investigasi misalnya ke lokasi perkara.

Setelah alat bukti dan segala syarat-syarat didapatkan untuk kebutuhan persidangan, selama proses persidangan korban ditempatkan di Rumah Aman, Rumah Aman ini berfungsi untuk melindungi korban dari ancaman atau intimidasi dari luar, sambil menunggu hasil persidangan selesai. Akses Rumah Aman sangat tertutup bagi siapapun hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan korban.

Jika kasus korban dapat ditempuh melalui jalur kekeluargaan (non litigasi), P2TP2A kota Makassar bersama pihak terkait seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama, LSM, Organisasi Masyarakat dan pihak kepolisian ataupun paralegal di wilayah tersebut melakukan mediasi antara korban dan pihak pelaku.

- **Tahap Rehabilitasi, Pemulihan dan Reintegrasi**

Kasus dari korban yang telah menghasilkan putusan persidangan dan dinyatakan ditutup, kemudian korban akan diberikan layanan rehabilitasi agar korban dapat pulih dari gangguan traumatis ataupun dari kondisi psikologi hingga pulih, korban akan di dampingi selama proses pemulihan dan dipantau oleh pihak P2TP2A kota Makassar.

Proses pemantauan korban dilakukan dengan cara konseling, korban yang dinyatakan pulih dan dalam kondisi yang benar-benar

aman akan dipulangkan dengan didampingi oleh beberapa pihak seperti penegak hukum (polisi, jaksa & pengacara) pekerja sosial dari Dinas Sosial dan LSM atau NGO. Saat pemulangan korban diberikan formulir pengembalian korban dengan ditanda tangani oleh pihak-pihak terkait.

4.5.1.1 Analisis Komunikasi (Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas)

Pengimplementasian kebijakan tidak selamanya berjalan dengan baik apabila salah satu komponen tidak mampu memahami maksud dari kebijakan tersebut salah satunya dialami oleh Penyandang Disabilitas, keterbatasan fisik dan perbedaan kemampuan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas menjadi salah satu faktor sulit tersampainya isi kebijakan ke kelompok sasaran kebijakan.

Merealisasikan kebijakan tersebut diperlukan kerjasama dan kesadaran oleh komponen masyarakat, hal tersebut menjadi tugas penting untuk para pelaksana kebijakan dalam membangun ruang-ruang komunikasi dan mengintensifkan komunikasi dengan kelompok sasaran kebijakan ataupun dengan kelompok masyarakat, karena Penyandang Disabilitas adalah kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada untuk terkena diskriminasi dan sasaran kriminalisasi, maka membangun komunikasi antara kelompok sasaran dan kelompok

masyarakat penting untuk menjadi prioritas seperti yang diungkapkan oleh Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan;

“Kami mengharapkan Pemerintah kota Makassar mampu memperhatikan teman-teman kami disabilitas, bukan untuk menspesialkan tapi lebih untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami dalam setiap program-program yang dijalankan dengan cara membangun komunikasi yang intensif karena jelas kami disabilitas adalah salah satu kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada untuk terkena diskriminasi”.
(wawancara, 12 Mei 2017)

P2TP2A kota Makassar sejauh ini memiliki beberapa metode komunikasi baik dengan korban maupun dengan pihak-pihak lintas sektoral yang tergabung dalam tim gugus kerja P2TP2A kota Makassar, komunikasi yang dibangun baik secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung diantaranya seperti wawancara pelaporan kasus, sosialisasi, rapat koordinasi, konseling dan *outreach*, sedangkan model komunikasi secara tidak langsung melalui perantara organisasi masyarakat, *shelter* warga yang tersedia, ataupun melalui media-media komunikasi lainnya. Untuk perlakuan korban dengan jenis-jenis kasus baik itu kekerasan fisik, seksual, diskriminasi eksploitasi ataupun penelantaran penanganannya sama yang membedakan nantinya kebutuhan korban pada saat proses penggalan informasi apabila korbannya adalah penyandang disabilitas.

4.5.1.1.1 Metode Komunikasi (wawancara) pada Tahap Pengaduan dan Pelaporan Korban.

Selama Periode Oktober 2016 sampai April tahun 2017 sebanyak 128 laporan kasus yang masuk ke P2TP2A kota Makassar, korban diterima oleh petugas P2TP2A kota Makassar yang ditugaskan khusus untuk mengidentifikasi cepat terhadap korban kekerasan. Pada tahap penerimaan laporan kasus, pengaduan dan korban yang datang melapor ke P2TP2A akan di dalayani oleh beberap petugas diantaranya;

- Staf Adminstrasi
- Staf Pelayanan hukum
- Staf Pengarsipan dan Pendokumentasian
- Pendamping Anak
- Layanan kritis (Apabila kondisi fisik korban parah)
- Dan Layanan Rujukan (Apabila korban butuh penanganan medis)

Bila saat itu korban dalam keadaan tertekan, luka parah, dan sebagainya, maka identifikasi cepat dapat dilakukan berdasarkan keterangan keluarga atau pendamping lainnya. Apabila identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadu adalah korban kekerasan dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara.

Kasus-kasus yang korbannya adalah penyandang disabilitas, P2TP2A kota Makassar mengikut sertakan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan (HWDI Sul-Sel), dalam menangani kasus, informasi-informasi ataupun laporan kasus yang dialami oleh Penyandang

Disabilitas direspon oleh kedua organ tersebut dengan menjalin komunikasi yang bersifat koordinatif dan kooperatif, jika laporan masuk ke P2TP2A kota Makassar maka pihak P2TP2A kota Makassar akan menghubungi HWDI Sul-Sel untuk mendampingi korban seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un. Selaku Ketua HWDI Sul-Sel.

“Kalo misalnya laporan ke P2TP2A kota Makassar masuk tentu mereka akan menghubungi kami HWDI tapi selama ini kami juga aktif menghubungi, jadi kita pengurus harus pro aktif untuk mengikuti informasi-informasi dan merespon secara cepat informasi yang berkaitan dengan kekerasan Perempuan & Anak Penyandang Disabilitas”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya komunikasi yang baik dilakukan oleh P2TP2A kota Makassar dengan HWDI Sul-Sel terkait informasi dan laporan kasus penyandang disabilitas yang masuk. Keseriusan P2TP2A kota Makassar dalam memperhatikan perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas terbukti dengan tergabungnya HWDI Sul-Sel dalam gugus kerja P2TP2A kota Makassar, kecenderungan yang biasanya dilakukan para pelaksana kebijakan dalam mengirimkan komunikasi-komunikasi implementasi yang jelas, dilakukan dengan usaha menghindari kelompok-kelompok yang menentang dalam masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, namun dari hasil wawancara tersebut tidak menunjukkan hal yang seperti dikatakan oleh Edward III tersebut.

Ada beberapa cara layanan pelaporan dan pengaduan yang dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar diantaranya;

- Pengaduan melalui telepon, penerimaan pengaduan korban kekerasan juga dapat diakses melalui nomor kontak P2TP2A, pengaduan melalui telepon diperlukan bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan dengan datang langsung. Serta bagi korban yang tidak mampu mengakses layanan dengan datang langsung. Serta bagi korban yang merasa belum siap bertemu langsung dengan penerimaan pengaduan
- Pengaduan melalui surat, P2TP2A kota Makassar juga menerima pengaduan melalui surat memberikan kesempatan kepada korban atau pelapor yang rumahnya jauh dari tempat layanan ataupun jauh dari prasarana telepon untuk dapat mengakses layanan pengaduan. Layanan penerimaan pengaduan melalui surat juga memberikan kesempatan kepada korban yang belum siap untuk membuka identitasnya secara penuh untuk melakukan peninjauan penyelesaian kasusnya.
- Penanganan pengaduan dari rujukan jaringan P2TP2A kota Makassar, apabila korban datang karena rujukan oleh jaringan dan lembaga-lembaga lain maka korban diterima sebagaimana korban yang datang secara langsung. Sebelum mewawancarai

korban petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat ataupun data-data yang dikirimkan oleh lembaga atau individu perujuk. Dalam hal tidak ada surat rujukan ataupun data-data penyerta, maka langkah-langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.

- Penjangkauan korban pada P2TP2A kota Makassar, apabila korban tidak bisa datang langsung. P2TP2A kota Makassar akan mengirimkan petugas untuk melakukan penjangkauan dan menawarkan pelayanan kepadanya. Penjangkauan dilakukan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit pelayanan (termasuk rumah sakit). Penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS, atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitahuan media massa. Dalam melakukan penjangkauan selalu memperhatikan aspek-aspek keamanan bagi korban, keluarga atau petugas unit pelayanan. Penjangkauan dilakukan dengan lebih terencana dan hati-hati untuk memastikan bahwa penjangkauan tidak akan menyebabkan korban dalam situasi yang lebih buruk.

4.5.1.1.2 Metode Komunikasi (Pendampingan) Pada Tahap Asesment dan Pencatatan Kasus.

Assesment korban bertujuan untuk mengenali kebutuhan layanan yang akan diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Proses *assessment* kebutuhan korban ini dilakukan oleh beberapa staf dan tenaga ahli, diantaranya Ketua P2TP2A kota Makassar, pendamping anak dan tenaga ahli dari LSM, Ormas sesuai dengan latar belakang kebutuhan korban.

Mengapa penting untuk memperhatikan kebutuhan korban dikarenakan kesan trauma dan ketakutan yang diderita oleh korban terlebih lagi anak-anak tersebut membutuhkan perlakuan khusus dari tim P2TP2A kota Makassar, jika halnya korban adalah Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak, maka tim P2TP2A kota Makassar akan berkoordinasi dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia untuk memberikan pendampingan khusus.

“Jika korban yang sedang ditangani oleh P2TP2A kota Makassar adalah Perempuan dan Anak Disabilitas, maka kami dari HWDI akan cepat bereaksi dengan memberikan pendampingan dan menyediakan kebutuhan khusus dari korban itu sesuai dengan informasi yang kami dapatkan dari P2TP2A kota Makassar ataupun sebaliknya, misalnya korbannya tuna rungu maka proses komunikasi dan proses memberikan keterangan akan sulit jadi kita memberikan interpreter supaya jalannya proses menggali informasi itu jelas”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa responsibilitas antara P2TP2A kota Makassar dengan HWDI Sul-Sel yang dibangun melalui

hubungan komunikasi yang intensif berdasarkan laporan kasus yang masuk mampu mengurangi probabilitas pentransmisian kebijakan yang sering terjadi akibat informasi yang melewati berlapis-lapis hirarkis birokrasi, kemudian tingkat pengetahuan pelaksana kebijakan yang mampu memahami maksud kebijakan dan kebutuhan-kebutuhan korban penyandang disabilitas sejalan dengan kejelasan isi kebijakan dalam memberikan kebutuhan interpreter ataupun segala hal yang menjadi kebutuhan proses *assessment* korban.

4.5.1.1.3 Metode Komunikasi (Koordinasi) Pada Proses Hukum dan Pendampingan Korban.

Metode komunikasi selanjutnya yang dilakukan oleh P2TP2A kota Makassar pada proses hukum dan pendampingan adalah pada gelar kasus eksploitasi dan pemukulan anak proses ini bertujuan untuk mendapatkan jalan keluar secara bersama (*kasus spesifik*).

Gelar kasus dilakukan dengan mengundang SKPD lintas sektoral, jaringan P2TP2A, kelompok perempuan, polisi dan LSM pemerhati anak. Sebagai upaya membangun hubungan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam gelar kasus tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapidah Djalante, Selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan;

“Kami biasanya membangun komunikasi dengan memanggil beberapa pihak yang berkaitan pada gelar kasus tindak

eksploitasi ataupun kekerasan seperti dari pihak kepolisian, LSM, dan kelompok perempuan seperti HWDI Sulawesi Selatan, komunikasi ini kami harapkan dapat menghasilkan pemeriksaan yang akurat untuk proses hukum korban ".
(wawancara, 12 Mei 2017)

Pasca gelar kasus tim P2TP2A kota Makassar mencatat perkembangan kasus dan rencana tindak lanjut, bagian ini juga setiap semester tim membuat catatan perkembangan kasus dan penyusunan rencana tindak lanjut. Hasil dari ini membantu tim untuk melakukan tindakan lanjutan serta dapat terus mengawal proses yang belum berhasil.

4.5.1.1.4 Metode Komunikasi (Outreach & Konseling) Pada Tahap Rehabilitasi dan Pemulangan Korban.

Sebagai bagian dari proses pemulihan bagi korban maka secara rutin memberikan konseling untuk semua klien baru serta konsultasi lanjutan klien lama. Hal ini dilakukan untuk persiapan korban saat kasusnya akan diselesaikan baik secara litigasi, dan teknisnya ada jadwal yang disepakati antara klien dan tim P2TP2A misalnya dengan home visit (*outreach*) atau klien yang datang langsung ke kantor.

Konsultasi ini merupakan ruang komunikasi yang dibangun P2TP2A kota Makassar sebagai jalan untuk korban menceritakan perkembangan kasusnya baik secara psikis maupun kondisi *real* lingkungannya.

4.5.1.1.5 Metode Komunikasi Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pada P2TP2A kota Makassar

Selain penanganan kasus P2TP2A Kota Makassar juga melakukan upaya pencegahan baik melalui kegiatan sosialisasi dan promosi, workshop, Focus Group Discussion, penyebaran leaflet, poster dan seminar di tingkat masyarakat, kelompok perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, lingkungan pelajar, UPTD (kepolisian, puskesmas, rumah sakit, kecamatan). Khusus pada pemenuhan hak perlindungan penyandang disabilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A kota Makassar rutin setiap tahunnya mengadakan sosialisasi terkait dengan pemenuhan hak perlindungan kota Makassar, sebanyak 2 kali dalam kurun setahun, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hapidah Djalante.

“Tiap tahun itu kita selalu melakukan sosialisasi untuk kelompok disabilitas, tujuannya agar penyandang disabilitas itu tahu bagaimana cara melakukan tindakan terhadap korban kekerasan, atau cara melaporkan kasus tindak kekerasan, eksploitasi ataupun diskriminasi, seperti bullying, yang dialami oleh korban, tahun 2016 kemarin kami melakukan sosialisasi selama 2 kali”. (wawancara, 07 Agustus 2017)

Selanjutnya untuk peningkatan kerjasama atau kemitraan antara tim P2TP2A dalam upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di level komunitas maka dilakukan kegiatan rapat koordinasi. Kegiatan ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan P2TP2A dalam melakukan pencegahan dan pelayanan terhadap korban kekerasan Perempuan dan

Anak. Kemudian untuk pelaporan bidang layanan Perempuan dan Anak korban kekerasan P2TP2A juga melakukan koordinasi lintas sektoral serta asistensi pada jaringan P2TP2A kota Makassar. Koordinasi lintas sektoral serta asistensi pada jaringan P2TP2A bertujuan untuk penerimaan pengaduan dan pencatatan. Termasuk mengumpulkan data dan informasi terkait layanan di seluruh jaringan P2TP2A kota Makassar.

4.5.1.2 Analisis Sumber Daya (Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar)

Sumber-sumber menurut Edward III terdiri dari berbagai komponen yakni staf, Informasi, wewenang dan fasilitas, ruang lingkup sumber-sumber ini bergantung pada kemampuan implementor terkait pemahaman terhadap tujuan program, kemampuan menyampaikan dan mengarahkan, kemudian ketersediaan dana, fasilitas, serta informasi-informasi yang mendukung terealisasinya program.

4.5.1.2.1 Fasilitas Khusus Pada Proses Perlindungan dan Pendampingan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas

Implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas ini sangat bergantung kepada sumber-sumber yang menyokong pelaksanaan program dikarenakan, tiap kebutuhan ragam penyandang

disabilitas berbeda, seperti staf pendamping khusus dan fasilitas yang diperlukan pada proses pendampingan kasus korban.

Selama proses pemeriksaan dan jalannya kasus berlangsung untuk memberikan rasa aman terhadap korban dari intimidasi dari luar, pihak P2TP2A kota Makassar memberikan perlindungan kepada korban di Rumah Aman, akses dari Rumah Aman ini sangat dirahasiakan oleh pihak P2TP2A kota Makassar, dan informasi mengenai Rumah Aman inipun tertutup dari media, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapidah Djalante, selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan.

“Selama proses hukum korban tersebut kami tempatkan di Rumah Aman untuk memberikan perlindungan korban dari intervensi dan intimidasi dari luar, dan informasi terkait Rumah Aman ini sangat-sangat tertutup dari luar”. (wawancara, 07 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya ketersediaan fasilitas khusus yang memang sangat diperlukan pada saat proses pemeriksaan kasus, Rumah Aman yang bersifat eksklusif ini kemudian menjadi kebutuhan khusus bagi korban disabilitas yang sangat sensitif terhadap kondisi psikis korban ataupun intimidasi dari pihak-pihak luar.

Fasilitas yang mendukung juga disediakan P2TP2A kota Makassar pada tahap rehabilitasi dan pemulangan korban, layanan rehabilitasi sosialisasi yang dilakukan P2TP2A adalah dengan menyediakan *shelter* warga untuk korban baik perempuan maupun anak. *Shelter* warga ini merupakan program inovasi P2TP2A kota Makassar yang memudahkan

korban untuk menjangkau dan mencegah kasus yang dialami, tugas *shelter* ini memberikan rehabilitasi sosial juga memberikan pelayanan psikologis untuk pemulihan kepada korban, dengan harapan korban bisa kembali atau pulih seperti semula. Korban akan didampingi, korban akan dipantau secara berkelanjutan, beberapa hari dan apabila psikolog menyatakan bahwa korban telah pulih maka korban siap untuk dilakukan pemulangan atau pengembalian ke daerah asalnya, Apabila korban berada diluar kota Makassar, maka kordinasi dengan pihak P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan serta dinas sosial kota Makassar. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hapidah Djalante selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan P2TP2A kota Makassar.

“Untuk memudahkan dan membantu korban dalam melaporkan kasusnya kami punya inovasi dengan mengadakan *shelter* warga, shelter ini sekaran sudah ada di 5 kecamatan dan 6 kelurahan, ada kelurahan maccini parang, manggala, pannampu, tamamaung dan maccini sombala”. (wawancara, 07 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa P2TP2A kota Makassar mampu menyediakan fasilitas yang memudahkan korban dalam melaporkan dan menangani kasusnya dengan memperhatikan kondisi-kondisi psikologi korban yang dalam keadaan tertekan ataupun trauma.

4.5.1.2.2 Sumber Informasi Pada Proses Perlindungan dan Pendampingan Korban Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Pada P2TP2A kota Makassar

Sulitnya mendapatkan informasi-informasi terkait kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas perempuan dan anak menjadi salah satu kendala yang kerap ditemui dalam proses pelaksanaan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas, hal ini membuat P2TP2A kota Makassar dan HWDI Sulawesi Selatan membangun komunikasi yang intensif untuk merespon laporan-laporan yang mereka dapatkan, sejauh ini kasus-kasus terkait penyandang disabilitas didapatkan melalui media yang memberitakan kasus tersebut dan ditanggapi dengan cepat oleh HWDI dan P2TP2A kota Makassar seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un.

“Biasanya informasi tentang kekerasan dari banyak informasi, kita biasanya mengetahui dari penyandang disabilitas itu sendiri, bisa juga justru media yang mengangkatnya sehingga akhirnya kita tahu atau bisa juga korban yang datang atau orang melapor ke P2TP2A, tapi untuk keseluruhan kami lebih banyak mendengar dari media ketimbang korban penyandang disabilitas yang melaporkan kasusnya, Ketika laporan masuk ke P2TP2A maka P2TP2A akan mengirimkan (TRC) tim reaksi cepat untuk meng-cross check dan setelah itu mulai di tindak lanjuti oleh tim. Didalam tim itu ada beberapa orang yang punya tugas untuk mengawal kasus-kasus ini”. (wawancara, 07 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan yang dialami penyandang disabilitas sangat bergantung pada informasi-informasi terkait kasus kekerasan korban disabilitas, kondisi fisik

dan kemampuan penyandang disabilitas menjadi faktor kurangnya kasus yang masuk, dalam kurun setahun terakhir hanya ada 2 kasus yang ditangani P2TP2A kota Makassar dengan korban penyandang disabilitas, meskipun P2TP2A mempunyai tim TRC dan *shelter* warga yang bertugas menjangkau dan memberikan respon cepat terhadap isu maupun kasus yang diterima, namun hal tersebut mesti membutuhkan informasi-informasi dari sumber lain, ada beberapa faktor kemudian yang menjadi alasan mengapa angka kasus penyandang disabilitas sangat kurang diterima, hal tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi korban disabilitas.

Persoalan berikutnya dalam proses hukum korban perempuan dan anak penyandang disabilitas adalah pada jalur litigasi, sulitnya melengkapi dokumen dan alat bukti lainnya dikarenakan trauma dan ketakutan yang dialami korban ataupun keterbatasan kemampuan fisik korban pada saat menceritakan kronologi kasusnya. Disisi lain sulitnya mendapatkan informasi dari keterangan saksi korban dikarenakan belum adanya badan khusus yang mampu melindungi saksi-saksi korban, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapidah Djalante, selaku Sekretaris P2TP2A kota Makassar dan Ketua Bidang Perlindungan Perempuan BPPPA;

“kesulitan kita pada proses litigasi itu biasanya mendapatkan keterangan dari korban dan alat bukti pendukung, kasus yang dialami penyandang disabilitas itu musti di dampingi oleh tenaga khusus dalam menggali informasi, faktornya biasa itu karena tekanan psikis korban yang berbeda dengan korban-korban lainnya, kemudian kita juga sulit menggali informasi dari saksi,

banyak saksi yang takut membeberkan informasi karena mereka takut adanya intimidasi dan ancaman, belum lagi kita tidak punya lembaga khusus yang bisa melindungi saksi korban”. (wawancara, 07 Agustus 2017)

4.5.1.2.3 Anggaran Pelaksanaan Operasional Perlindungan dan Pendampingan Pada P2TP2A kota Makassar

Sumber-sumber lain seperti anggaran ataupun dana pelaksanaan proses perlindungan dan pendampingan korban cukup untuk mengoperasionalkan kebutuhan-kebutuhan jalannya program kebijakan, walaupun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendukung pada saat pendampingan korban, seperti yang dikatakan oleh Ibu Hapidah Djalante;

“Untuk Anggaran sepertinya cukup untuk mengoperasionalkan kerja-kerja P2TP2A kota Makassar, tapi sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan pendukung pada saat korban kita tangani, karena biasanya tiap korban atau klien itu berbeda kebutuhan-kebutuhan khususnya, tapi biasanya kita dimudahkan dengan keberadaan pihak-pihak seperti kepolisian, psikologi, orang kesehatan yang jadi bagian dari P2TP2A kota Makassar”. (wawancara, 07 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa anggaran pengoperasian pada pendampingan dan perlindungan korban belum maksimal dikarenakan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan khusus korban yang tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran yang di miliki oleh P2TP2A kota Makassar, melihat faktor dari persoalan ini kadang kala suatu program kebijakan seringkali di prakarsai oleh badan-badan

legislatif dan pembiayaan mengenai program diserahkan kepada eksekutif. Akibatnya, para administrator kebijakan seringkali tidak menerima dana yang memadai untuk mengalokasikan kebutuhan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

4.5.1.3 Analisis Disposisi (Kecenderungan) (Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Kecenderungan atau disposisi yang dimaksudkan disini ialah karakter pelaksana seperti konsistensi dan sifat-sifat kejujuran dan demokratis dari para pelaksana kebijakan. Hal ini erat kaitannya dengan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang di inginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4.5.1.3.1 Tingkat Komitmen dan Konsistensi Para Pelaksana Pada P2TP2A kota Makassar

Komitmen Pemerintah kota Makassar dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak terlihat dengan digandengnya beberapa elemen-elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, psikolog, kepolisian dan ahli medis dalam memberikan pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan, hubungan kerjasama tersebut diikat kedalam sebuah tim

gugus kerja P2TP2A kota Makassar seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un, yang juga masuk dalam tim gugus kerja P2TP2A kota Makassar.

“Sudah sejak tahun 2012 kami dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan, membangun komunikasi intensif guna membicarakan isu-isu penting berkaitan dengan perempuan dan anak disabilitas agar bisa terintegrasi dengan program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen para pelaksana kebijakan diantaranya P2TP2A kota Makassar dengan kelompok masyarakat penyandang disabilitas HWDI Sulawesi Selatan memiliki komitmen erat guna memperhatikan hak perlindungan penyandang disabilitas perempuan dan anak di kota makassar, terbukti sejak tahun 2012 komunikasi intensif tersebut telah dibangun.

Dengan menggandeng elemen-elemen yang mampu menunjang kinerja P2TP2A kota Makassar tersebut diharapkan kinerja P2TP2A kota Makassar mampu berjalan dengan optimal dengan memperhatikan kebutuhan korban selama pengawalan kasus-kasus korban yang masuk.

HWDI Sulawesi Selatan memiliki konsistensi dalam memperhatikan kebutuhan dan kondisi psikologi korban dalam mendampingi proses hukum korban, terlihat melalui tahapan proses hukum dan pendampingan korban, Setelah pra kondisi korban kemudian korban siap untuk melapor maka HWDI Sul-Sel bersama P2TP2A kota Makassar juga mendampingi

proses BAP, pemeriksaan saksi dan saat persidangan serta pembuatan gugatan baik di pengadilan negeri maupun pengadilan Agama Kota Makassar dengan berkoordinasi pada pihak Hakim dan Jaksa Penuntut untuk mendapatkan informasi akurat seputar proses persidangan, namun sebelumnya proses penggalian informasi tidak dapat dilaksanakan sebelum korban sudah difasilitasi kebutuhan khususnya, seperti yang disampaikan Ibu Maria Un, yang tergabung dalam tim koordinasi penanganan kasus P2TP2A kota Makassar;

“Nah ketika kasus masuk kita sudah bisa mengidentifikasi siapa korbannya, kami dari organisasi harus mencari pendamping teknisnya, misalnya ketika korbannya tuna rungu, maka kami harus mencari penerjemah karena tidak boleh melakukan BAP atau menggali informasi apapun dari korban atau pelaku disabilitas kalo dia tidak didampingi, itu melanggar, sangat melanggar jika itu terjadi kami akan proses, intinya proses pengambilan informasi apapun tidak boleh dilakukan apabila setelah di klarifikasi disabilitas ini memerlukan pendampingan teknis yang lain diluar dari psikolog, diluar dari pendamping yang lain misalnya. Jadi kerjasamanya atau keterlibatannya sampai pada proses hukum karena itu yang kami minta, hanya HWDI itu tidak terbiasa berbicara di media, apa yang biasa kami lakukan, tapi dalam diam kami mengikuti prosedur dari menyediakan semua kebutuhan spesifik yang dibutuhkan oleh disabilitas dan kami bersyukur karena Dinas Pemberdayaan Perempuan itu merespon itu bahwa ketika tuna rungu yang bermasalah berarti kita butuh interpreter dan mereka juga tidak akan melakukan proses-proses itu kalo tidak ada interpretornya, itu yg kami kerjasamai selama ini”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Komitmen tinggi juga dilihat melalui hasil wawancara dengan Ketua HWDI Sulawesi Selatan berkaitan dengan Keterlibatan HWDI Sulawesi

Selatan dalam penanganan kasus tersebut, komitmen tinggi dapat dilihat dari sikap para pelaksana dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan guideline yang ditentukan, dan karakteristik demokratis dapat dilihat dari seberapa intensnya pelaksana dalam merespon ataupun melakukan proses sharing dengan korban, yang terlihat dari penyampaian oleh Ibu Maria Un. Selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.

“Misalnya kasus yang saat ini ditangani dan di proses di pengadilan atau sudah disidang itu adalah kasus pencabulan anak dengan gangguan bicara (hambatan bicara) sekarang itu sudah mulai sidang, ketika berita itu terangkat P2TP2A merespon kasus itu dan kami juga dari disabilitas langsung berkunjung, ke kanit PPA polrestabes untuk mengawal dan memberikan dorongan agar kasus ini di proses secara hukum jadi kasus ini harus di proses secara pelan-pelan”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran aktif dilakukan oleh HWDI Sulawesi Selatan dan P2TP2A kota Makassar dalam merespon kasus yang ditangani oleh P2TP2A kota Makassar, P2TP2A pun tidak hanya berfokus pada korban, jika kasusnya itu ada keterlibatan perempuan dan anak sebagai pelaku, maka tetap perspektif yang digunakan adalah perspektif korban, hal ini erat kaitannya dengan karakteristik pemahaman para pelaksana dalam melihat korban, penyandang disabilitas perempuan dan anak adalah korban, dari tindakan-tindakan oleh oknum meskipun posisinya adalah pelaku, contohnya pada kasus kekerasan rumah tangga. Untuk kasus-kasus tertentu seperti KDRT, tim juga mengupayakan proses mediasi antara

klien dan suami atau keluarga dengan melibatkan paralegal yang ada di wilayah tersebut, tergantung dari jenis kasus yang ditangani apabila ada itikat baik untuk memediasi korban maka P2TP2A kota Makassar akan memfasilitasi jalannya proses mediasi tersebut.

4.5.1.4 Analisis Struktur Birokrasi (Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup 2 hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi biasanya sudah ditetapkan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur). Kemudian sifat kedua dari struktur birokrasi adalah Fragmentasi, fragmentasi mampu mempengaruhi pelaksanaan organisasi, tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi diakibatkan oleh sifat multi dimensi dari banyak kebijakan.

4.5.1.4.1 Efektivitas Struktur Birokrasi Pada Tim Gugus Kerja P2TP2A kota Makassar

Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar memiliki 4 Divisi diantaranya Divisi Pengaduan dan Reaksi Cepat, Divisi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Konseling, Divisi Bantuan Hukum dan

Pendampingan dan Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi dan Pemberdayaan. Struktur birokrasi yang ada pada gugus kerja P2TP2A kota Makassar terdiri dari berbagai pihak lintas sektoral seperti dinas-dinas di kota Makassar, organisasi masyarakat, psikolog, LSM, Kepolisian dan lembaga bantuan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapidah Djalante.

“P2TP2A kota Makassar membentuk tim untuk mengawal kasus-kasus kekerasan dari berbagai macam latar belakang termasuk didalamnya bantuan hukum dari LBH, psikologi termasuk dari organisasi penyandang disabilitas, lembaga perlindungan anak, pemerhati perempuan dari kepolisian , dan semua itu untuk merespon kasus-kasus yang ada”.
(wawancara, 07 Agustus 2017)

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendampingan korban terkait kebutuhan-kebutuhan korban, dengan membentuk tim P2TP2A kota Makassar ini bertujuan untuk mengefektifkan dan menefesiensikan koordinasi dengan badan-badan lain yang mempunyai keterkaitan dalam proses penanganan kasus di P2TP2A kota Makassar. Tim koordinasi ini pun mampu menghindari struktur-struktur organisasi yang berbelit-belit panjang dan kompleks dalam menjalankan koordinasi. Struktur P2TP2A kota Makassar yang di desain ringkas dan fleksibel ini menghindari “Virus Weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis, Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapidah Djalante selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, P2TP2A kota Makassar.

“Tupoksi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kota Makassar itu

memberikan perlindungan kepada semua perempuan dan anak di kota Makassar, termasuk diantaranya Penyandang Disabilitas jadi kami pikir banyak elemen yang harus terlibat langsung dalam penanganan kasusnya, karena kita melihat ada beberapa hal terkait kebutuhan korban yang harus diberikan untuk memaksimalkan perlindungan yang kami berikan". (wawancara, 07 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas menepis konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat fragmentasi birokrasi, konsekuensi terburuk dari fragmentasi birokrasi diantaranya adalah usaha untuk menghambat koordinasi dengan para birokrasi lainnya, para birokrat karena alasan-alasan prioritas yang berbeda-beda, mendorong birokrasi menghindari koordinasi dengan badan-badan lain.

Tahapan terakhir setelah proses hukum berakhir ialah proses pemulangan korban, proses ini dilakukan setelah korban menjalani proses rehabilitasi social. Apabila kasusnya dianggap berat seperti kasus-kasus kekerasan seksual, maupun KDRT, layanan ini melibatkan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa & Pengacara), selain itu melibatkan juga unsur pemerintahan seperti dinas sosial (pekerja sosial), LSM/NGO sebagai pendamping serta RT/RW, tokoh masyarakat, pada saat pemulangan, diberikan juga formulir pengembalian korban dengan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkaitan. Korban akan dipulangkan apabila tim P2TP2A kota Makassar menganggap korban telah dinyatakan aman.

4.5.1.4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pada proses Perlindungan dan Pendampingan Korban Pada P2TP2A kota Makassar

Standar Operasional Prosedur yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh siapapun, sejauh ini SOP yang diterapkan oleh P2TP2A kota Makassar sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas, mulai dari tahapan proses pengaduan dan pelaporan, pencatatan kasus dan assessment korban hingga pada proses pendampingan hukum, rehabilitasi dan pemulangan korban.

Ketersediaan SOP pada setiap mekanisme penanganan kasus korban, memudahkan para pelaksana yang ada pada P2TP2A kota Makassar dalam melakukan pendampingan korban, ada 16 Mekanisme yang memiliki Standar Operasional prosedur dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada korban diantaranya ;

1. Prosedur penerimaan laporan kasus
2. Prosedur penanganan kasus (korban yang datang langsung)
3. Prosedur pengisian formulir pelayanan penanganan.
4. Prosedur persetujuan klien
5. Prosedur pelayanan pengaduan masyarakat
6. Prosedur analisis kebutuhan
7. Prosedur jalur litigasi

8. Prosedur rujukan dari lembaga layanan
9. Prosedur rujukan ke lembaga layanan
10. Prosedur wawancara lembaga layanan bantuan hukum
11. Prosedur pendampingan masyarakat dalam proses reintegrasi anak dari lembaga layanan
12. Prosedur jalur non litigasi
13. Prosedur penilaian kasus oleh LBH
14. Prosedur pendampingan anak untuk reintegrasi tingkat layanan
15. Prosedur penyiapan keluarga dalam rangka reintegrasi anak
16. Prosedur pemantauan

Para pelaksana yang ada di P2TP2A kota Makassar sangat memperhatikan prosedur pada setiap mekanisme penanganan kasus dan pendampingan korban, dikarenakan dampak yang akan terjadi apabila para pelaksana tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapidah Djalante;

“Kami itu sangat memperhatikan SOP pada saat mekanisme pelaksanaan kerja-kerja kami di P2TP2A, kalo tidak memperhatikan SOP yang ada kami akan kesulitan untuk mempersiapkan kebutuhan, menganalisis masalah, ataupun melakukan koordinasi pada setiap divisi-divisi di P2TP2A, untuk persoalan prosedur semua unit pelaksana di P2TP2A bekerja dengan luwes itupun kalo ada kendala pasti ada di kendala teknis saja”. (wawancara, 07 Agustus 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pemahaman akan standar operasional prosedur di P2TP2A kota Makassar mampu dipahami dengan

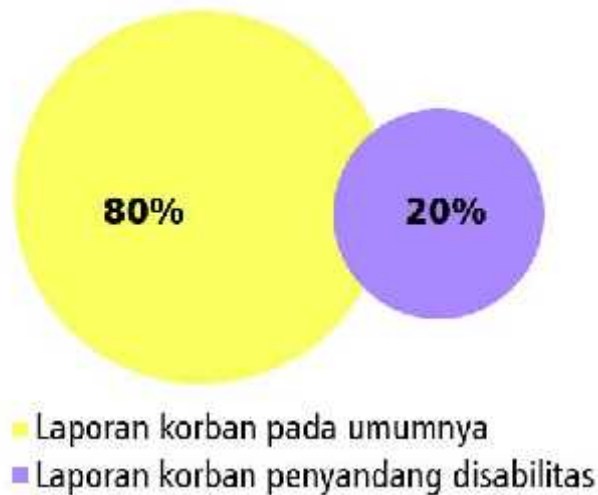
baik oleh setiap unit pelaksana kerja, hal ini mampu berdampak pada pemahaman-pemahaman para pelaksana dalam memahami maksud dari kebijakan dan mampu menghindari interpretasi-interpretasi pelaksana, yang dapat menjauhkan maksud kebijakan dari tujuan kebijakan tersebut.

4.5.1.5 Analisis Aspek Eksternal (Kondisi Lingkungan Sosial) Pada Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Ada beberapa hal yang menjadi bahan perhatian terkait dengan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi penyandang disabilitas yang mempengaruhi proses perlindungan penyandang disabilitas.

Berdasarkan data jumlah kasus penyandang disabilitas yang ditangani pada tahun 2017 hanya sebanyak 2 kasus berikut presentase jumlah kasus penyandang disabilitas yang masuk ke P2TP2A kota Makassar;



Gambar 4.5
Data Presentase Jumlah Laporan yang Masuk dengan korban
Penyandang Disabilitas

Angka laporan kasus khusus penyandang disabilitas tidak menjadi kesimpulan bahwa angka kekerasan yang diterima penyandang disabilitas di kota Makassar minim, hal lain disampaikan oleh Ibu Maria Un. Selaku Ketua HWDI Sulawesi Selatan.

“Kasus yang paling sering kami temui yakni kasus kekerasan dimana kasus kekerasan seksual pencabulan, banyak orang tua yang belum mengerti bahwa justru anaknya yang rentan ini atau mereka yang mempunyai keterbatasan fisik justru mereka harus mendapatkan perlindungan khusus (lebih) dalam keluarga dari pada saudara-saudara yang lain, artinya pemerintah dan masyarakat perlu memberikan pemahaman bagaimana melindungi anggota keluarganya yang disabilitas dan yang kedua semua keluarga mau mengangkat kasus-kasus kekerasan yang dialami keluarganya dan dilaporkan dan perlu penguatan untuk keluarga agar lebih berani melaporkan kasus kasus yang dialami karena kasus yang dialami pelakunya kebanyakan dari orang-orang yang dia kenal bisa juga dari anggota keluarganya, dari tenaga pengajar, atau juga orang terdekatnya”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas ada indikasi yang mencul melihat angka kasus kekerasan yang minim, faktor pelaku yang biasanya adalah anggota keluarga atau orang terdekat dari korban, menjadi kunci banyaknya keluarga korban yang tidak ingin melaporkan kasusnya ke P2TP2A kota Makassar, hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan Ibu Hapidah Djalante selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan.

“kita lihat data yang kami punya itu menggambarkan bahwa jumlah laporan dan kasus yang masuk di P2TP2A kota Makassar khususnya penyandang disabilitas itu kecil, kalo kita lihat data penyandang disabilitas itu banyak, saya pikir faktornya adalah bagaimana peran keluarga kemudain memperhatikan anggota keluarganya yang disabilitas dan kebanyakan kasus memang orang tua atau keluarganya tidak berani melaporkan kasusnya karena pelakunya biasa adalah orang-orang disekitarnya malahan orang terdekat dari korban”.
(wawancara, 12 Mei 2017)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peran keluarga sangatlah penting dalam memperhatikan anggota keluarganya yang disabilitas, perlakuan yang tidak menyenangkan seperti pelecehan sangat beresiko diterima oleh penyandang disabilitas perempuan dan anak.

seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un.

“Untuk ragam disabilitas tertentu itu tidak mudah mempercayai orang jadi ketika dia sudah merasa nyaman dengan orang itu karena penyandang disabilitas terutama anak-anak itu tidak diberikan pemahaman tentang bentuk-bentuk pelecehan, bentuk komunikasi atau perilaku yang mengarah kearah pencabulan seksual dan tidak menyadari bahwa itu bagian dari pencabulan hal tersebut kemudian menagapa anak dngan disabilitas sangat beresiko,nah yang kita dorong adalah siapapun pelakunya, orang tua itu harus berani untuk

melaporkan kasus yang dialami anaknya.”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan anak penyandang disabilitas lebih berisiko terhadap kekerasan, beberapa penjelasan telah dicoba untuk dikemukakan: Pertama, mengasuh anak penyandang disabilitas memberikan tekanan tambahan bagi pengasuh, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Kedua, sejumlah anak penyandang disabilitas masih ditempatkan di pengasuhan rumah, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyalahgunaan seksual dan fisik. Terakhir, kecacatan yang mempengaruhi komunikasi membuat beberapa anak jadi sangat rentan, karena mereka mungkin tidak akan bisa mengungkapkan tentang pengalaman yang abusif.

Matriks 4.1
Matriks Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak
Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di
kota Makassar

NO	ASPEK	TEMUAN WAWANCARA	HASIL ANALISIS	KESIMPULAN
1	Komunikasi	P2TP2A kota Makassar memiliki beberapa metode komunikasi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak penyandang disabilitas diantaranya, Wawancara, Pendampingan, Koordinasi, Penjangkauan,	Setiap tahapan proses pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar, P2TP2A sangat memperhatikan kebutuhan korban, keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas menjadi faktor pelayanan yang dimiliki oleh P2TP2A kota Makassar dapat dikatakan ramah untuk para penyandang	Komunikasi yang dibangun oleh P2TP2A dan kelompok sasaran kebijakan berjalan dengan baik

		konseling, sosialisasi dan rapat koordinasi	disabilitas.	
2	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. P2TP2A kota Makassar memiliki fasilitas khusus dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. 2. Keterbatasan informasi yang dimiliki dan di terima oleh P2TP2A kota Makassar menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan proses pemberian perlindungan mengalami kendala 3. Anggaran pelaksanaan yang dimiliki oleh P2TP2A dianggap belum maksimal 	Sumber daya yang dimiliki oleh P2TP2A kota Makassar sejauh ini tidak menjadi kendala berarti dalam pelaksanaan meskipun beberapa aspek terkait sumber daya yang dianggap belum maksimal sepenuhnya dalam mendukung proses pemberian perlindungan	Aspek-aspek Sumber daya terhadap perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas mendukung pelaksanaannya meskipun dianggap belum maksimal
3	Disposisi	Para Pelaksana yang ada di P2TP2A kota Makassar memiliki tingkat komitmen yang tinggi dalam penanganan kasus dan pendampingan perempuan dan anak penyandang disabilitas	Komitmen dan konsistensi pelaksana di P2TP2A kota Makassar terbukti melalui prioritas, responsibilitas dan proteksi yang diberikan oleh pelaksana dalam memberikan pelayanan khusus terkait kebutuhan penyandang disabilitas melalui hubungan koordinasi dengan HWDI SulSel	Disposisi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan mendukung proses pemberian perlindungan terhadap penyandang disabilitas

4	Struktur Birokrasi	<p>1. Struktur P2TP2A kota Makassar terdiri dari beberapa elemen-elemen yang masuk dalam tim gugus kerja P2TP2A. Seperti Psikolog, kepolisian, bantuan medis, LSM, LBH dll</p> <p>2. Prosedur dalam penanganan kasus korban sangat diperhatikan diantaranya; Proses hukum tidak dapat dilakukan apabila kebutuhan khusus korban terpenuhi.</p>	Efektivitas struktur yang terdapat di P2TP2A kota Makassar terwujud dengan digandengnya beberapa elemen-elemen yang berkaitan dengan proses pemberian perlindungan, struktur ini dianggap efektif dalam proses pendampingan dan penanganan kasus, serta hal tersebut mampu menepis konsekuensi-konsekuensi yang muncul akibat fragmentasi birokrasi. Serta prosedur dalam setiap tahap pelaksanaan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan setiap tahapan tahapan proses pemberian perlindungan	Aspek-aspek Struktur Birokrasi berjalan dengan efektif
5	Kondisi eksternal (lingkungan Sosial)	Penyandang Disabilitas tidak dibekali pengetahuan terhadap bentuk-bentuk perlakuan yang mengarah ke tindakan kekerasan/pelecehan Laporan jumlah kasus dengan korban penyandang disabilitas perempuan dan anak di P2TP2A kota Makassar sangat minim	Keluarga dari korban takut untuk melaporkan kasusnya dikarenakan pelaku tersebut biasanya adalah anggota keluarga bahkan orang terdekat korban. Penyandang disabilitas mudah mempercayai seseorang yang membuatnya merasa nyaman	Kondisi eksternal sangat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap penyandang disabilitas

Sumber ; hasil analisis primer, 2017

4.5.2 Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan sendiri menunjuk pada (*skill*) kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan (*power*) dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 1987).

Pemberdayaan yang dimaksudkan selalu merujuk pada pemberdayaan kelompok-kelompok rentan, dimana Penyandang Disabilitas menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan dan sangat perlu diberdayakan. Selanjutnya upaya pemberdayaan tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas itu sendiri. Dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas peran Pemerintah dan lembaga sosial sangat diperlukan, demikian juga

dalam pemberdayaan disabilitas. Pemberdayaan disabilitas akan lebih efektif jika dilakukan oleh tenaga atau komunitas bukan oleh individu tertentu. Pemberdayaan disabilitas dititik beratkan kepada penguatan dan pengembangan potensi atau daya yang dimiliki oleh disabilitas sehingga disabilitas dapat mengaktualisasikan dirinya didalam masyarakat, minimal mereka tetap eksis ditengah-tengah persaingan yang makin kuat.

Penduduk Disabilitas adalah salah satu yang termiskin dari yang miskin, tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai, Penyandang Disabilitas tidak memiliki posisi tawar yang memadai untuk membantu mereka keluar dari kemiskinannya. Jumlah Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang begitu banyak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah Penyandang Disabilitas yang tidak mempunyai pekerjaan dan hidup dengan bergantung pada bantuan Pemerintah saja, berikut data presentase Penyandang Disabilitas yang bekerja dan tidak bekerja.



Grafik 4.4

Grafik Data Presentase Penyandang Disabilitas Menurut Status

Pekerjaan yang sudah di olah

Disabilitas masih jarang dijadikan sebagai bahan perbincangan dalam isu gender dan kemiskinan. Banyak orang yang masih berfikir bahwa isu disabilitas hanya sebatas persoalan kedisabilitasan dan perawatannya. Padahal disabilitas merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi. Kemiskinan berawal dari keluarga, masyarakat dan negara yang disebabkan masih kuatnya stigma mereka terhadap eksistensi Penyandang Disabilitas. Stigma bahwa disabilitas adalah orang yang lemah, sakit, tidak berdaya, tidak mampu bekerja dan tidak bisa mandiri membuat disabilitas sulit keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjratnya.

Secara umum Penyandang Disabilitas di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Di dalam keluarga, Penyandang Disabilitas sangat tergantung bagaimana keluarga memperlakukan kehidupannya sehari-hari. Keluarga merupakan tonggak utama dalam pertumbuhan jiwa dan perkembangan kapasitas. Jika keluarga tidak memiliki wawasan bagaimana memperlakukan anaknya yang disabilitas, sangat mungkin si Penyandang Disabilitas tidak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana mestinya.

Peran Pemerintah kota Makassar dalam memberdayakan Penyandang Disabilitas melalui Peraturan Daerah Kota Makassar No.6 Tahun 2013 sangat jelas dititik beratkan pada Bab 9 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perempuan dan Penyandang Disabilitas Anak.

4.5.3 Tujuan Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas bertujuan untuk ;

- Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, serta kelangsungan hidup dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
- meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi Penyandang Disabilitas;
- meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab dunia usaha.
- meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan Penyandang Disabilitas.

4.5.4 Program-Program Bagi Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Makassar.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan.

Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Di Indonesia, Penyandang Disabilitas telah menjadi salah satu sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena kecacatan (baik fisik atau mental) merupakan permasalahan kesejahteraan sosial yang dapat menghambat proses sosialisasi dan resosialisasi ke dalam masyarakat. Sementara itu upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan melalui pemberdayaan Penyandang Disabilitas bertujuan agar terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pembangunan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas seharusnya dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian Penyandang Disabilitas itu sendiri.

Pendekatan dengan cara pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar dilaksanakan oleh Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar. Segala hal yang menyangkut penanganan, pemberdayaan, memberikan pelayanan dan bantuan kepada Penyandang Disabilitas ditangani oleh Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat di bawah koordinasi Bidang Rehabilitasi Sosial.

Secara khusus Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat bertugas melakukan pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penyandang cacat, dengan uraian tugas sebagai berikut;

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
- b. Menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian rehabilitasi penyandang cacat
- c. Melakukan bimbingan dan pelatihan keterampilan penyandang cacat dan eks kusta
- d. Melakukan pelayanan dan pemberian bantuan pemberdayaan kepada penyandang cacat dalam bentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- e. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok pemberdayaan bagi penyandang cacat

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah No.6 tahun 2013

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial sangat konsen untuk memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas, kehadiran Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar ini membuat Dinas Sosial Kota Makassar meraih penghargaan dipenghujung tahun 2016 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan gelar kota dengan komitmen dan kepedulian terhadap Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kota Makassar.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, ibu Hasnah A.

“Diakhir bulan Desember tahun lalu Dinas Sosial mendapatkan penghargaan oleh Kementerian Sosial

Republik Indonesia, indikatornya dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas tersebut”(wawancara, 10 Mei 2017)

Sejatinya setiap program atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah mustilah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada dasarnya tahapan dalam sebuah kebijakan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan kebijakan mustilah rasional dan sesuai dengan kondisi *real* dari lingkungan kebijakan, agar nantinya seluruh komponen dan mekanisme kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar menghasilkan 5 program kerja khusus untuk penanganan Penyandang Disabilitas diantaranya ;

- Pemberian Jaminan Sosial Disabilitas Berat dan Sedang
- Pembinaan Disabilitas Menuju Kemendarian
- Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita
- Pemberian Jaminan Sosial Disabilitas Eks-Kusta
- Pemberian Rekomendasi untuk Mengikuti Pelatihan di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya

Sedangkan dari kelima program tersebut yang khusus berbicara tentang Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas hanya Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita. Jenis Program Kerja Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas ini meliputi ; pelatihan keterampilan usaha ekonomis (pelatihan membuat keset kaki,

membuat bros, menjahit dan membuat kue) & bantuan modal usaha atau paket usaha.

4.5.5 Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita pada Dinas Sosial;

Program pemberdayaan bagi perempuan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, ini merupakan program yang dibuat dan didesain untuk penyandang disabilitas agar mampu mengoptimalkan kemampuannya dari segi kemandirian ekonomi dan kapabilitas potensi-potensi untuk peningkatan taraf kesejahteraan hidup para perempuan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas ini meliputi;

1. Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Usaha Ekonomis dan;
2. Bantuan Permodalan

Program Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Wanita ini bertujuan untuk;

1. Mengoptimalkan kapasitas *Life Skill* Penyandang Disabilitas agar Penyandang Disabilitas Wanita tersebut mampu memberdayakan kemampuannya.
2. Meningkatkan taraf kesejahteraan hidup Penyandang Disabilitas melalui pemberian dan pelatihan keterampilan baru yang memiliki harga jual, sesuai dengan kemampuan kedisabilitasannya.

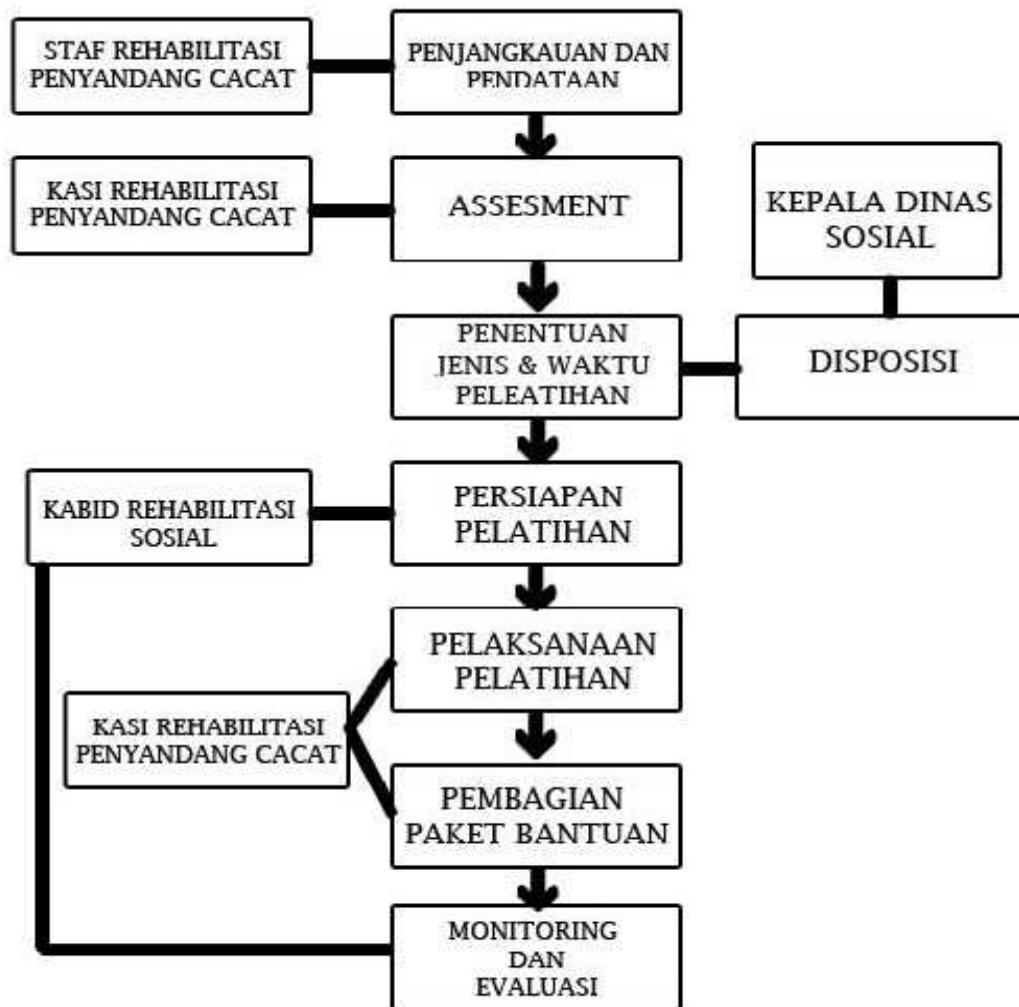
3. Menghasilkan kemandirian bagi Penyandang Disabilitas Wanita.
4. Meningkatkan kepercayaan diri para Wanita Penyandang Disabilitas yang tergerus akibat stigma negatif masyarakat.

Untuk Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Dinas Sosial melakukan kegiatan pelatihan keterampilan, pelatihan keterampilan tersebut beragam sesuai dengan kemampuan Penyandang Disabilitas tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh Ibu Hasnah A. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Kami memberikan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas yang masih potensial, misalnya seperti kemarin itu membuat keset kaki, membuat bros, semua itu dilihat dari jenis kedisabilitasnya apakah dia mampu atau tidak, misalnya apakah ia mampu mengembangkan potensi dirinya atau sudah tidak mampu lagi, seperti Penyandang Disabilitas berat atau lumpuh layu kalau itu tinggal diberikan jaminan hidup saja”. (wawancara, 10 Mei 2017)

Jenis program pelatihan keterampilan yang biasanya dilaksanakan diantaranya adalah; 1) Pelatihan membuat keset kaki, 2) Pelatihan membuat bros, 3) Pelatihan menjahit, 4) Pelatihan membuat kue.

Berikut alur pelaksanaan Program Pemberdayaan bagi Wanita Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Makassar ;



Gambar 4.6

**Alur Program Pemberdayaan Perempuan Disabilitas Dinas
Sosial kota Makassar**

- Tahap Penjangkauan dan Pendataan

Tahap penjangkauan dan pendataan ini dilakukan oleh staf pendataan pada Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, prasyarat untuk mengikuti pelatihan keterampilan adalah perempuan penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan khusus atau usaha kecil yang dapat

dikembangkan dengan menunjukkan kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Setelah pendataan selesai kemudian tahap selanjutnya adalah proses pengkajian (*Assessment*) peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

- Tahap *Assessment*

Data peserta yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan pertimbangan seperti kesesuaian potensi dengan jenis pelatihan yang diberikan, kemampuan ekonomi peserta, kebutuhan khusus peserta dan hal-hal yang dijadikan pertimbangan saat melaksanakan pelatihan keterampilan, output dari proses *Assessment* ini adalah data hasil *Assessment*.

- Tahap Penentuan Jenis, Waktu dan Jadwal Pelatihan Penyandang Disabilitas

Pada tahap ini output dari proses *Assesment* yang berupa data kebutuhan Penyandang Disabilitas diolah hingga ditentukan jenis pelatihan keterampilan dengan kesesuaian potensi yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas.

Data hasil *Assesment* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan Penyandang Disabilitas berdasarkan saran dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan data temuan Dinas Sosial dilapangan kemudian menghasilkan penentuan waktu pelaksanaan dan tempat pelatihan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,

selanjutnya Staf Rehabilitasi Penyandang Cacat membuat surat pelaksanaan program kegiatan yang menghasilkan draft surat permohonan disposisi Kepala Dinas Sosial yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kota Makassar yang selanjutnya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan persiapan pelaksanaan pelatihan Penyandang Disabilitas.

- Tahap Persiapan Pelaksanaan Program

Tahapan ini memperhatikan kebutuhan-kebutuhan teknis dari pelatihan seperti tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan hal-hal teknis lainnya. Staf Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat kemudian membuat surat pelaksanaan program yang akan di disposisi ke Kepala Dinas Sosial yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Sekretaris Dinas Sosial.

- Pelaksanaan Program

Pelaksanaan ini berupa pelatihan keterampilan usaha ekonomis produktif dan pemberian bantuan modal usaha.

- Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan program seharusnya mampu di ukur dengan baik, hal tersebut harus disesuaikan dengan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu program, seperti Sumber Daya, anggaran, pola komunikasi dan hal-hal lain. Begitupun dengan pelaksanaan program pemberdayaan Penyandang Disabilitas, dibutuhkan peran administrasi suatu pendekatan

yang dinamis, agar kiranya kita mampu mengukur pelaksanaan program tersebut (Kartasasmita Ginanjar, 1996). Maka dari hal tersebut penulis secara sederhana bertitik tolak dari teori pokok manajemen, administrasi dengan memperhatikan variable-variable implementasi kebijakan yang disebutkan oleh Edward III yang terdiri dari :

4.5.5.1 Perencanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita di kota Makassar

Perencanaan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program nantinya. Perencanaan yang berorientasi kepada pemberdayaan meliputi pokok-pokok sebagai berikut. *Pertama*, mengenali masalah mendasar yang menyebabkan kesenjangan pada Penyandang Disabilitas; *Kedua*, mengidentifikasi alternatif untuk memecahkan masalah dengan mengusulkan jenis pemberdayaan yang sesuai dengan kemampuan Penyandang Disabilitas; dan *Ketiga*, menetapkan beberapa alternatif yang dipilih dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dapat dimanfaatkan, serta potensi yang dapat dikembangkan.

4.5.5.1.1 Analisis Komunikasi (Perencanaan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Sejauh ini Dinas Sosial berupaya untuk mengefektifkan proses komunikasi terkait Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Wanita baik itu berupa hal-hal yang terkait perencanaan pelaksanaan hingga terlaksananya program tersebut.

Dinas Sosial kota Makassar menjalin hubungan kemitraan yang bersifat konsultatif dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi selatan (PPDI Sul-Sel) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan (HWDI Sul-Sel) terkait kepersertaan dalam pelatihan keterampilan.

Hubungan komunikasi yang bersifat konsultatif pada tahap perencanaan pelaksanaan biasanya berkaitan dengan peserta yang nantinya akan mengikuti pelatihan keterampilan. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan memberikan saran dan nama-nama yang mampu mengikuti pelatihan keterampilan tersebut. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;

“PPDI Sul-Sel dan HWDI Sul-Sel biasanya memberikan kami proposal yang biasanya ada nama-nama peserta dan jenis-jenis pelatihan keterampilan di dalamnya”. (wawancara, 10 Juni 2017)

Hal itu senada yang disampaikan oleh Ibu Maria Un, Selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan.

“Kami di HWDI itu sebenarnya mitra di kepersertaan jadi bukan pelaksana, kami biasanya memberikan usulan kepada Pemerintah Kota terkait peserta-peserta untuk di ikutkan dalam pelatihan keterampilan”. (wawancara, 12 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat hubungan kooperatif terkait kepersertaan yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas

Indonesia Sulawesi Selatan dianggap menjadi langkah efektif dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan upaya Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dengan memperhatikan jenis keterampilan yang dibutuhkan dan peserta-peserta yang dianggap layak untuk diikutsertakan dalam pelatihan.

Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar di upayakan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, sejauh ini Dinas Sosial Kota Makassar merumuskan program – program yang memang menjadi kebutuhan Penyandang Disabilitas dan sesuai dengan kemampuan Penyandang Disabilitas. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Kalo menurut saya program-program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Makassar saat ini sesuai, sangat sesuai dengan kebutuhan, karena apa, misalnya, kami menerima saran dan laporan bahwa kebanyakan Penyandang Disabilitas membutuhkan bantuan kaki palsu, jadi kami berikan kaki palsu, begitupun dengan pelatihan keterampilan, tapi lagi-lagi kita terbatas, kita selalu dibatasi oleh anggaran yang ada saya kira semua kegiatan sangat sesuai kebutuhan Penyandang Disabilitas”. (wawancara, 10 Mei 2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan, Ibu Maria Un.

“Sejauh ini Pemerintah kota Makassar memberikan keterampilan alternatif agar Penyandang Disabilitas mampu meng-*combine* keahlian-keahlian yang telah dimiliki, saya pikir hal tersebut sudah cukup untuk kami disabilitas”. (wawancara, Mei 2017)

Upaya Dinas Sosial kota Makassar dalam membangun komunikasi yang baik dengan kelompok sasaran kebijakan terlihat dari penuturan yang berkaitan antara pihak pelaksana kebijakan (Dinas Sosial kota Makassar) dengan Ketua HWDI Sulawesi Selatan, menurut Edward III (1980) hal penting yang harus ada pada proses komunikasi diantaranya adalah konsistensi, langkah yang diambil dengan membangun komunikasi bersama organisasi penyandang disabilitas (HWDI) secara langsung merupakan bentuk konsistensi para pelaksana.

Jika para pelaksana kebijakan yang terlibat dalam berbagai tahap implementasi menyetujui suatu kebijakan, maka mereka lebih cenderung meneruskan komunikasi kebijak dengan cermat.

Hal yang Berbeda disampaikan oleh ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan, terkait jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh panti-panti khusus penyandang disabilitas.

HWDI Sulawesi Selatan menilai bahwa sistem pemberian keterampilan yang biasanya dilaksanakan oleh panti-panti sosial di kota Makassar dinilai monoton, keterampilan yang diberikan dari waktu ke waktu sama, dan hal tersebut tidak cukup untuk mengasah kemampuan dan keterampilan Penyandang Disabilitas yang lain. Berikut Penuturan Ibu Maria Un, Selaku Ketua HWDI Sulawesi Selatan;

“Sistem perantian di Indonesia selama ini hanya memberikan atau mengajarkan keterampilan-keterampilan yang sangat standar yang memang dari dulu sampai sekarang sudah ada, nah kami mengusulkan keterampilan-keterampilan lain yang justru bisa dilakukan oleh

Penyandang Disabilitas kemudian tidak membutuhkan biaya yang besar ketika kita memulainya dan yang paling mereka butuhkan sebenarnya bagaimana Pemerintah ikut berpartisipasi mempromosikan atau memasarkan mereka punya hasil karya ”. (wawancara, 12 Juni 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan yang biasanya dilaksanakan oleh Panti-Panti Sosial di kota Makassar selama ini memberikan pelatihan-pelatihan yang monoton dan dianggap tidak cukup untuk mengembangkan potensi lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, dari hasil wawancara inipun terlihat bagaimana peran para pelaksana Dinas Sosial yang terlebih dahulu membangun komunikasi dengan HWDI SulSel selaku organisasi perempuan penyandang disabilitas dalam memberikan jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Keterkaitan antara Peraturan Daerah no. 6 Tahun 2013 terkait Jenis keterampilan usaha ekonomis produktif pun dapat dilihat dari program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, dimana program yang diberikan adalah pelatihan program ekonomis dalam artian tidak membutuhkan biaya atau modal yang cukup besar untuk memulai dan membangun usaha pasca pelatihan tersebut.

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial melakukan konsultasi dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan, tentunya saran yang masuk selalu dijadikan bahan utama dalam mempertimbangkan program apa yang kemudian disepakati untuk dijadikan program kerja diluar hasil atau

keputusan yang lahir pada Musrembang atau Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan daerah.

4.5.5.1.2 Analisis Sumber Daya (Perencanaan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Sumber-sumber yang menjadi pusat perhatian dalam melaksanakan tahap perencanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas ini mampu mempengaruhi variable-variable lain dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan, seperti bagaimana sumber daya mampu mempengaruhi sikap para implementor dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan interpretasi-interpretasi para pelaksana karena keterbatasan anggaran misalnya, kemudian Guideline Standar Operasional Prosedur yang tidak sesuai dengan kondisi sumber daya ataupun penransmisian komunikasi akibat staf pelaksana yang belum mampu mengetahui maksud dari kebijakan.

Berikut beberapa hal yang ditemukan dari proses penelitian berdasarkan variable sumber daya pada tahap perencanaan pelaksanaan program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Wanita pada Dinas Sosial kota Makassar;

1. Sumber-Sumber (Informasi) pada Tahap Pendataan dan Penjangkauan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Wanita.

Data menjadi salah satu komponen penting dan persyaratan penting dalam melaksanakan sebuah program. Ketidak validan dan ketidak sesuaian data akan berdampak pada kesulitan dalam memetakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan ataupun program.

Data atau informasi menurut Edward III (1980) masuk kedalam aspek sumber-sumber informasi, informasi berupa data sangat di butuhkan guna menunjang keakurasian capaian pelaksanaan program yang ada. Hal tersebut di dukung oleh statement dari Ibu Maria Un, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan.

“Sebenarnya masalah yang paling penting di Kota Makassar terkait Penyandang Disabilitas adalah masalah data, data tentang Disabilitas belum akurat sehingga ada diantara mereka yang terlewatkan, misalnya ada program jaminan sosial yang seharusnya mereka dapat, tapi malah mereka akhirnya tidak mendapatkan karena tidak ada data mereka yang benar selain ada persoalan teknis, jadi ketika ada program jaminan sosial seperti, KIS, KIP, RASKIN mereka tidak mendapatkannya”. (wawancara, 12 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa data menjadi salah satu acuan penting dalam proses merencanakan program kerja, sejauh ini HWDI Sulawesi Selatan menganggap bahwa data yang dimiliki pemerintah saat ini belum akurat, sehingga hal tersebut berdampak pada pelaksanaan program yang menimbulkan ketidaksesuaian program yang

ditujukan terhadap kelompok sasaran kebijakan yang dianggap belum efektif.

2. Sumber daya (Anggaran) pada Tahap Pendataan dan Penjangkauan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Wanita.

Anggaran menjadi salah satu tolak ukur terlaksananya hal-hal yang diharapkan terhadap suatu program, anggaran yang memadai akan mampu mendorong keberhasilan suatu program, dan sebaliknya anggaran yang memadai dari suatu program bukan menjadi salah satu poin penting keberhasilan suatu program apabila tidak dibarengi dengan pelaksana yang cakap.

Dari total jumlah keseluruhan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar yakni sebesar 1.715 orang hanya sekitar 70 orang yang biasanya mampu diikuti dalam Pelatihan Keterampilan tersebut, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Hasnah A. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Kalo jumlah peserta pelatihan itu tidak banyak, sekitar 70 orang, kami hanya mampu merencanakan jumlah peserta maksimal 70 orang saja, hal itu dikarenakan oleh anggaran kita yang terbatas dan kemudian persoalan tenaga pendamping dan faktor tempat pelatihan yang biasanya jadi masalah”. (wawancara, 14 Juni 2017)

Pernyataan diatas berkaitan dengan sumber-sumber yang mendukung berjalannya suatu kebijakan diluar staf, informasi dan wewenang. Sumber-sumber seperti anggaran yang tidak cukup akan menghambat pelaksanaan kebijakan, proses komunikasi yang dibangun antara HWDI Sulawesi Selatan dan Pemerintah kota Makassar terkait kepersertaan merupakan langkah teknis dalam mengefektifkan Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Wanita, dengan memberikan usulan peserta yang berpotensi dan sesuai kebutuhan peserta penyandang disabilitas yang akan mengikuti pelatihan.

Umumnya peserta yang mengikuti pelatihan adalah penyandang disabilitas potensial. Potensial yang dimaksudkan adalah penyandang disabilitas yang kemampuan fisik dan kesanggupannya dianggap mampu untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan jenis kedisabilitasiannya, sedangkan penyandang disabilitas yang tidak potensial akan dijadikan sasaran program-program yang lain.

Penyandang Disabilitas yang tidak dapat diberdayakan hanya diberikan jaminan hidup berupa bantuan kebutuhan pokoknya, dan pemberian bantuan dana, seperti yang diutarakan oleh KASI Rehabilitasi Penyandang Cacat ini.

“Untuk Penyandang Disabilitas yang sudah tidak dapat kami berdayakan biasanya kami berikan bantuan jaminan hidup berupa sembako, sembako yang kita berikan itu setiap bulan dan yang dapat biasanya penyandang kusta, sedangkan untuk Penyandang Disabilitas Berat kita berikan bantuan dana sebesar Rp.300.000, perkepala setiap keluarga,

bantuan tersebut langsung dari Kementrian Sosial".
(wawancara, 10 Juni 2017)

4.5.5.1.3 Analisis Disposisi (Perencanaan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan dapat dilihat dari seberapa besar dukungan pelaksana terhadap suatu kebijakan. Kendala dalam pengimplementasian kebijakan terhadap kecenderungan pelaksana di akibatkan oleh perintah-perintah yang tidak mereka setuju atau maksud kebijakan yang tidak sesuai kepentingan-kepentingan pribadi atau dari organisasi pelaksana. Dalam kasus seperti ini para pelaksana akan menggunakan keleluasaan-keleluasaan mereka.

Sikap dan kecenderungan implementor terlihat dalam melaksanakan program dari pernyataan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat pada proses Penjangkauan dan Pendataan Peserta Program Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas.

Pada tahap ini penjangkauan Penyandang Disabilitas yang memang layak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan didasarkan dengan data yang ada pada petugas seleksi dan pelaksana administrasi dengan persyaratan; Penyandang Disabilitas yang mempunyai keterampilan atau usaha kecil yang masih dikembangkan dan berdomisili di Kota Makassar dengan menunjukkan Kartu identitas.

Namun tidak secara keseluruhan Penyandang Disabilitas mampu diberikan Pelatihan Keterampilan, Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat ;

“Jadi dari keseluruhan Penyandang Disabilitas yang kami data, kami mengutamakan Penyandang Disabilitas yang mempunyai kemampuan ekonomi ke bawah dan memang miskin atau membutuhkan pemberdayaan dari Dinas Sosial”.
(wawancara, 14 Juni 2017)

Langkah yang diambil para pelaksana kebijakan tersebut menunjukkan kecenderungan-kecenderungan sikap seperti yang dijelaskan oleh Edward III (1980) dimana turunan isi kebijakan yang tidak terlalu jelas tertuang dalam SOP pelaksanaan program di interpretasikan oleh para implementor dalam mengambil suatu langkah yang dianggap demokratis dan adil sesuai dengan asas kebutuhan kelompok sasaran.

Pelaksana program pemberdayaan di Dinas Sosial kota Makassar, mengutamakan penyandang disabilitas yang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa implementor pun di harapkan mampu mengambil keputusan-keputusan yang dinilai baik dalam menjalankan program, jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan tersebut akan mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, dan hal tersebut akan menimbulkan pandangan parokial dalam suatu perangkat kerja.

Komitmen implementor terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Dinas Sosial kota Makassar terlihat dari

keputusan-keputusan yang diambil kemudian tidak bertentangan dengan SOP program pemberdayaan.

Proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang diawali dengan prosedur pendataan dan pemilihan Penyandang Disabilitas yang masih potensial dilakukan berdasarkan jenis kedisabilitas dan keterampilan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas, seperti yang diungkapkan oleh ibu Hasnah A. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

“Untuk kegiatan khusus Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial itu disesuaikan dengan kemampuan dan jenis kedisabilitasannya, atau hanya Penyandang Disabilitas Potensial saja yang kami berdayakan, sisanya yang tidak potensial kami berikan jaminan hidup” (wawancara, 10 Mei 2017)

Berdasarkan hasil pernyataan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat tersebut menguatkan komitmen pelaksana untuk tidak melakukan hal-hal yang jauh dari tujuan program dan tidak mengambil sebuah tindakan yang bertentangan dengan prosedur yang ada. Bahkan keputusan yang diambil tersebut dianggap mampu mengefektifkan hasil dari program pemberdayaan sesuai dengan keputusan yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Sedangkan untuk Penyandang Disabilitas yang tidak potensial seperti Penyandang Disabilitas Lumpuh Layu atau orang yang sudah tidak mampu mengoptimalkan gerakanya, tidak mampu berdiri, berjalan dan hanya terbaring diberikan bantuan berupa dana dan sembako tiap

bulannya sesuai dengan program lain yang ada di Dinas Sosial kota Makassar.

4.5.5.1.4 Analisis Struktur Birokrasi (Perencanaan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan dalam perumusan program kerja untuk Penyandang Disabilitas. Tidak serta merta segala program yang dibuat oleh Dinas Sosial tersebut sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas tertentu, perbedaan kedisabilitasannya akan sejalan dengan perbedaan kebutuhan khususnya, hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat bahwa ada 2 kategori Penyandang Disabilitas yang ditangani oleh Dinas Sosial yakni Penyandang Disabilitas yang dapat diberdayakan (potensial) dan tidak dapat diberdayakan.

Pembagian tersebut tidak dijelaskan di dalam SOP pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita, berbeda dengan kelompok-kelompok sasaran pada program yang lain, penyandang disabilitas diperhadapkan pada kondisi yang satu sama lainnya berbeda-beda, ada banyak hal dan kebutuhan yang kompleks yang perlu diperhatikan, misalnya beda kebutuhan penyandang disabilitas daksa dan netra begitupun yang lumpuh layu dan penyandang yang masih mampu mengoptimalkan kemampuannya.

Aspek Standar Operasional Prosedur menjadi bagian dari struktur organisasi dimana organisasi-organisasi yang mempunyai prosedur yang luwes dan jelas sasarannya akan mampu menyesuaikan tanggung jawabnya.

Berdasarkan tahap perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan terlihat ketidakjelasan waktu pelaksanaan program. Ketidakjelasan waktu pelaksanaan ini dipengaruhi oleh faktor lain diluar prosedur yang ada, yakni anggaran yang terlalu lama teralokasikan.

Pelatihan keterampilan biasanya dilaksanakan sesuai alur kas anggaran Dinas Sosial seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Ibu Hasnah A.

“Waktu pelaksanaan kegiatan diliat berdasarkan alur kasnya, misalnya kegiatan keterampilan menjahit dilaksanakan selama 4 triwulan, dan setiap tahunnya kita melaksanakan pelatihan keterampilan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan dan saran yang kami terima”. (wawancara, 10 Juni 2017)

Dan hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan, Ibu Maria Un.

“Kalo peningkatan kapasitas itu sendiri tiap tahunnya kami ikut serta rata-rata setahun sekali, kegiatan yang khusus untuk Wanita Penyandang Disabilitas”. (wawancara, 12 Juni 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan keterkaitan antara 2 aspek yang saling berpengaruh yakni struktur birokrasi (SOP) akan mempengaruhi alokasi anggaran (sumber daya), ketidakjelasan prosedur ini

mengakibatkan pelaksanaan program menjadi tidak efisien dalam menentukan waktu pelaksanaan program, di sisi lain penyandang disabilitas sangat membutuhkan pemberdayaan dengan segera.

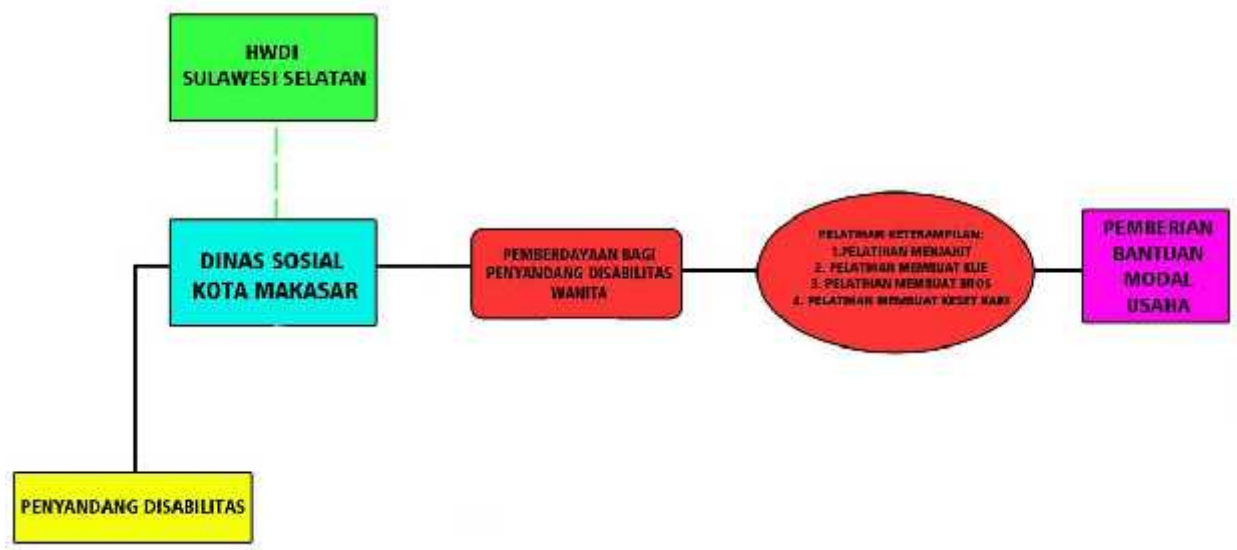
4.5.5.2 Pelaksanaan Program Pemberdayaan Pelatihan Keterampilan Perempuan Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat perlu memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, kegiatan yang dilaksanakan terarah, menguntungkan masyarakat yang lemah. *Kedua*, pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dimulai dengan apa yang ingin dilakukan. *Ketiga*, upaya pemberdayaan menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama. *Keempat*, mengembangkan partisipasi yang luas dari masyarakat dalam hal ini organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan lain sebagainya.

Dalam pemberdayaan masyarakat peran Pemerintah dan lembaga sosial sangat diperlukan, demikian juga dalam pemberdayaan Disabilitas. Pemberdayaan Disabilitas akan lebih efektif jika dilakukan tenaga atau komunitas bukan oleh individu tertentu. Pemberdayaan Disabilitas dititik beratkan kepada penguatan dan pengembangan potensi atau daya yang dimiliki oleh Disabilitas sehingga Penyandang Disabilitas dapat mengaktualisasikan dirinya didalam masyarakat, minimal mereka tetap eksis ditengah-tengah persaingan yang makin kuat.

Upaya Pemberdayaan tersebut menjadi tugas penting oleh Pemerintah Kota dalam mewujudkan maksud dari Peraturan Daerah kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, komitmen Pemerintah disokong dengan terjalinnya komunikasi antara Dinas Sosial kota Makassar dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan. Program Dinas Sosial kota Makassar yang berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan yakni Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita berupa pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan.

Berikut gambaran pelaksanaan program pemberdayaan dan pembinaan Disabilitas menuju kemandirian:



Gambar 4.7

Skema Pelaksanaan program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial kota Makassar

4.5.5.2.1 Analisis Komunikasi (Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Model pendekatan komunikasi yang digunakan pada tahap pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita adalah pendampingan, pendampingan ini dimaksudkan agar peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan dapat dengan mudah memahami tata cara mengerjakan keterampilan tersebut, setiap peserta yang didampingi kemudian akan diberikan pembinaan dalam mendirikan usaha yang nantinya akan diteruskan pasca pelatihan.

Seperti yang dituturkan oleh KASI Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Ibu Hasnah A.

“Kalau berbicara model komunikasi yang kami lakukan pada saat pelaksanaan itu, adalah model pendampingan, jadi kami akan dampingi peserta yang ikut pelatihan keterampilan, kami dampingi dan kami berikan pembinaan agar mereka mampu mengembangkan usahanya nanti sesuai keterampilan yang kami berikan”. (wawancara, 10 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan pada pelaksanaan program pemberdayaan merupakan langkah teknis dalam membangun jalur komunikasi yang optimal bagi pelaksana dan kelompok sasaran, berbeda dengan model komunikasi pada program-program lain yang memiliki jarak ataupun media perantara antara pelaksana dan kelompok sasaran, seperti program pemberian bantuan atau pemebrian jamninan.

4.5.5.2.2 Analisis Sumber Daya (Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Aspek-aspek yang menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelaksanaan Program Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Wanita yang ditemukan yakni persoalan sumber daya, keberadaan staf dan fasilitas yang belum mendukung.

1. Staf Pelaksana Pada Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita di Dinas Sosial kota Makassar

Pelaksanaan program pelatihan terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap pelatihan keterampilan dan tahap pasca pelatihan.

Pada tahap pelatihan, para peserta Penyandang Disabilitas yang mengikuti pelatihan akan didampingi oleh tim pelaksana program pemberdayaan tersebut, tim ini terdiri dari:

- Pelaksana administrasi 5 orang
- Petugas seleksi 5 orang
- Tenaga pendamping 5 orang
- Petugas monitoring & evaluasi 4 orang

Pelaksanaan program pemberdayaan peningkatan kapasitas Penyandang Disabilitas ini dilakukan di panti sosial yang sudah ditentukan oleh tim pelaksana, kemudian proses pelatihan tersebut didampingi oleh tenaga ahli yang kompeten dalam memberikan keterampilan kepada Penyandang Disabilitas.

Kuota jumlah peserta yang tidak berbanding lurus dengan tenaga pendamping pelatihan menjadi kendala tersendiri bagi pelaksana untuk melayani pendampingan untuk peserta pelatihan.

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 70-75 orang dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Dinas Sosial kota Makassar, seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, ibu Hasnah A.

“Jumlah peserta biasanya kami tentukan sebanyak 70 orang, peserta keterampilan itu ditujukan untuk Penyandang Disabilitas potensial, misalnya seperti kemarin membuat keset kaki, bros, itu dilihat dari jenis kedisabilitasnya, apakah dia mampu atau tidak, biasanya kendala kami dalam melaksanakan program yakni pada proses pendampingan, pendamping yang kami punya hanya 5 orang, kesulitannya itu untuk merekrut tenaga-tenaga pendamping yang terampil dalam mendampingi peserta yang mempunyai kebutuhan khusus ini”. (wawancara, 10 Juni 2017)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kekurangan tenaga pendampingan mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada peserta yang mengikuti pelatihan, meskipun demikian, kesulitan tersebut tidak menjadi sebuah kendala yang berarti untuk para pelaksana program pelatihan keterampilan, kapasitas pendamping yang memadai menjadi kunci proses pendampingan tidak mengalami kendala berarti, hal ini sesuai dengan penjelasan Edward III yakni jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong keberhasilan pengimplementasian, kompetensi yang dimiliki oleh pelaksana adalah poin penting agar suatu program kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

2. Fasilitas Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita.

Hambatan berikutnya adalah persoalan fasilitas pendukung, fasilitas dalam pelaksanaan program Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas Wanita yang dimaksud adalah tempat pelaksanaan pelatihan.

Hambatan yang ditemui biasanya adalah dalam menentukan tempat dengan beberapa pertimbangan yakni kapasitas dalam menampung para peserta dan akses yang mudah bagi penyandang disabilitas, tempat pelaksanaan pelatihan biasanya dilakukan di panti-panti sosial yang sudah ditetapkan sejak tahap perencanaan.

4.5.5.2.3 Analisis Disposisi (Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Sosial kota Makassar mengupayakan pemerataan kesempatan untuk para Penyandang Disabilitas di kota Makassar agar dapat tersentuh oleh program-program yang dibentuk Dinas Sosial kota Makassar salah satunya dengan cara mengganti peserta-peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Pembinaan keterampilan itu tiap tahun ada dengan orang yang berbeda-beda supaya kita mengupayakan pemerataan potensi untuk semua Penyandang Disabilitas yang masih berpotensi”.
(wawancara, 10 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan sikap demokratis yang dimiliki oleh implementor dalam melaksanakan program kebijakan tersebut. Mengikutsertakan peserta yang berbeda tiap tahunnya diharapkan mampu pemeratakan potensi para penyandang disabilitas dalam mengasah keterampilan dan potensi yang dimiliki. Pengaruh variable lain juga terlihat dari pernyataan diatas, dimana anggaran yang tidak memadai mengakibatkan implementor mengambil keputusan-keputusan yang dianggap adil dengan mengganti peserta setiap melaksanakan program pemberdayaan.

Pasca pelatihan, para peserta pelatihan keterampilan diberikan pembinaan usaha dan pemberian paket bantuan untuk mendukung kemandirian Penyandang Disabilitas, pemberian paket tersebut berupa bantuan penunjang kemandiriannya sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A.

“Bantuan untuk peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan itu berupa bahan-bahan atau alat-alat sesuai dengan pelatihan yang mereka ikuti, misalnya keterampilan menjahit, dikasih mesin jahit, keterampilannya membuat kue ya dikasih alat-alat kue”.
(wawancara, 10 Mei 2017)

Pemberdayaan tersebut sangat membantu Penyandang Disabilitas agar mampu meningkatkan taraf hidupnya ini sebab Penyandang Disabilitas sangat tergantung dengan orang lain. Pemberdayaan ini sangat diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi para Penyandang Disabilitas agar turun kejalan bukan lagi menjadi pilihan

hidup Penyandang Disabilitas yang kemudian menambah ranah permasalahan Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

Berikut target pelaksanaan Program-Program di Dinas Sosial kota Makassar tahun 2017 :

Tabel 4.6
Jumlah target pelaksanaan program khusus Penyandang Disabilitas
di Dinas Sosial kota Makassar

NO	NAMA KEGIATAN	TARGET	JUMLAH YANG AKAN DIBANTU	KETERANGAN
1	JAMINAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS BERAT	5 %	25 ORANG	SASARAN DISABILITAS BERAT
2	JAMINAN SOSIAL EKS KUSTA	20%	700 ORANG	PENYANDANG KUSTA & EKS KUSTA
3	PEMBINAAN DAN PELAYANAN DISABILITAS MENUJU KEMANDIRIAN	16 %	50 orang	DISABILITAS POTENSIAL
4	PEMBERDAYAAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PELATIHAN KETERAMPILAN DAN BANTUAN PERMODALAN	20 %	75 ORANG	WANITA DISABILITAS POTENSIL

Sumber; Data Sekunder Dinas Sosial kota Makassar, 2017

Berdasarkan data diatas menunjukkan komitmen dari Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial kota Makassar dalam memberikan perhatian besar terhadap hak pemberdayaan bagi perempuan penyandang disabilitas, target sebesar 20% ini di dasari oleh jumlah

keberadaan perempuan penyandang disabilitas yang cukup banyak, terlebih lagi mengingat perempuan penyandang disabilitas yang rentan akan perlakuan kurang menyenangkan dari lingkungan sosialnya.

Komitmen untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup para penyandang disabilitas dan mendukung kemandirian ekonomi para perempuan penyandang disabilitas tidak hanya melalui pemberian pelatihan keterampilan saja.

Program Dinas Sosial kota Makassar yang lain seperti Program Pembinaan Disabilitas Menuju Kemandirian berfokus pada peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian Penyandang Disabilitas, Program ini berjalan dengan pemberian bantuan modal usaha dan pembinaan usaha-usaha yang sebelumnya telah dimiliki oleh Penyandang Disabilitas, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Program Pembinaan Disabilitas Menuju Kemandirian ini dimaksudkan Penyandang Disabilitas yang mempunyai usaha, punya embrio yang bisa ditingkatkan usahanya bentuk peningkatannya diberikan berupa jual-jualan misalnya Penyandang Disabilitas yang punya jualan yah kita tinggal menambah jualannya saja”. (wawancara, 10 Juni 2017)

4.5.5.2.4 Analisis Struktur Birokrasi (Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita)

Salah satu pengaruh pada aspek struktur birokrasi yang ditemukan pada proses pelaksanaan program yakni kendala pada

guideline prosedur yang tidak memiliki ketetapan terkait pelaksanaan program.

Berikut data jumlah Penyandang Disabilitas yang telah tersentuh oleh Dinas Sosial kota Makassar.

Tabel 4.7

**Data Jumlah Sementara Bantuan Dinas Sosial kota Makassar
terhadap Penyandang Disabilitas**

NO	JENIS KECACATAN	JUMLAH	KET
1	TUNA DAKSA	22 orang	Belum dapat Bantuan
2	TUNA NETRA	174 Orang	15 org telah dapat bantuan
3	TUNA RUNGU WICARA	165 Orang	10 org telah dapat bantuan
4	TUNA RUNGU	109 Orang	8 org telah dapat bantuan
5	DISABILITAS BERAT	445 Orang	Sudah dapat jaminan Kemensos
6	DISABILITAS RINGAN	100 Orang	Sudah dapat Bantuan dr APBD
7	EKS KUSTA	700 Orang	Sudah dapat bantuan
	JUMLAH	1.715 Orang	

Sumber; Data Sekunder Dinas Sosial kota Makassar, 2017

Berdasarkan data dari Dinas Sosial kota Makassar diatas menunjukkan bahwa hanya beberapa jumlah Penyandang Disabilitas yang sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial.

Waktu pelaksanaan Program Pemberdayaan yang tidak jelas menjadi penyebab belum terselenggaranya program pemberdayaan untuk tahun ini, menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat Dinas

Sosial kota Makassar, anggaran yang belum teralokasi menjadi penyebab program yang dianggap tidak memperhatikan keefisienan waktu.

4.5.5.2.5 Analisis Aspek Eksternal (Kondisi Lingkungan Sosial) Pada Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita.

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, Van Meter dan Horn (1975) mengaitkan antara variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap kinerja kebijakan, kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas yang sangat bergantung pada akses lingkungan dan respon masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah atau pelaksana kebijakan disini mempunyai peranan penting dalam menginformasikan peran masyarakat terhadap penyandang disabilitas bukan bergantung pada simpati yang kerap labil pada masyarakat. Persoalan stigma dan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi hal yang pelik dalam memperoleh keberhasilan dari capaian program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Stigma terburuk dialami oleh penyandang disabilitas eks-kusta.

Fenomena Penyandang Eks-Kusta di Kota Makassar belakangan ini memang cukup mengambil perhatian Dinas Sosial, hal ini dikarenakan ada permasalahan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas

Eks-Kusta selain keterbatasan fisiknya dan keterbatasan kemampuannya, stigma yang melekat kepada Penyandang Kusta mengakibatkan Penyandang kusta terkadang sulit diterima di masyarakat, baik dalam melakukan aktifitas sehari-hari, bekerja hingga bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Maka jalan yang biasanya dipilih oleh Penyandang Disabilitas adalah menjadi pengemis di jalanan. Maka pemberian jaminan berupa bantuan dianggap tepat oleh Pemerintah kota Makassar.

Pemerintah kota Makassar pun pernah memberdayakan Penyandang Disabilitas Kusta melalui pemberian pekerjaan seperti penyapu jalan dan pelatihan pembuatan keset kaki. Seperti yang di ungkapkan Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat berikut.

“Kami pernah mencoba memperkerjakan Penyandang Disabilitas Kusta sebagai penyapu jalan tapi sepertinya Penyandang Disabilitas tersebut kesulitan dan lebih memilih untuk kembali menjadi pengemis, karena penghasilannya sebagai penyapu jalan tidak cukup dibandingkan penghasilannya sebagai pengemis, kemudian kita juga pernah memberikan pelatihan keset kaki untuk Penyandang eks-Kusta tapi pelaksanaannya tidak optimal, dan pada saat itu adik-adik mahasiswa juga yang membantu penjualan keset kaki tersebut”. (wawancara, 10 Juni 2017)

Kesejahteraan melalui kemandirian untuk para Penyandang Disabilitas barulah bisa terwujud apabila peran Pemerintah kota dan Masyarakat mengetahui bagaimana cara memperlakukan Penyandang Disabilitas, menghapus stigma buruk melihat Penyandang Disabilitas dan tidak lagi melihat Disabilitas sebagai proyek kemanusiaan saja.

Matriks 4.2
Matriks Hasil Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di
kota Makassar

NO	ASPEK	TEMUAN WAWANCARA	HASIL ANALISIS	KESIMPULAN
1	Komunikasi	Dinas Sosial bersama HWDI Sulawesi Selatan membangun komunikasi yang bersifat konsultasi terkait kepersertaan sedangkan pada tahap pelaksanaan proses pendampingan menjadi ruang komunikasi antara peserta atau kelompok sasaran kebijakan dengan para pelaksana	Intensitas komunikasi antara Dinas Sosial dengan HWDI Sul-Sel relatif lancar, hubungan yang bersifat konsultatif antara kedua organisasi dan lembaga mampu menimalisir kecenderungan kelompok sasaran menjadi kelompok penentang kebijakan. Komunikasi yang intens tersebut menghasilkan jenis pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.	Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Sosial dan HWDI Sulawesi Selatan terlaksana melalui konsultasi-konsultasi yang dibangun kedua pihak.
2	Sumber Daya	Jumlah peserta dan jumlah penyandang disabilitas tidak berbanding lurus. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial untuk menjangkau seluruh Penyandang Disabilitas yang terdata. ketersediaan tenaga pendamping yang memang mempunyai kapasitas dalam kepelatihan-kepelatihan khusus perempuan menjadi pendukung program peningkatan kapasitas perempuan	Terbatasnya anggaran akan berdampak pada model keterampilan yang diberikan serta jumlah peserta yang diikuti, hal tersebut mempengaruhi tingkat keefesiensian pelaksanaan program yang bertujuan untuk pemerataan potensi keterampilan penyandang disabilitas Kemudian kemampuan staf dan tenaga pendamping yang cukup kapabel dalam mengarahkan peserta mampu menutupi kendala-kendala dalam sumber daya anggaran yang dihadapi	Aspek-aspek Sumber daya untuk pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas belum maksimal

		<p>penyandang disabilitas ini.</p> <p>Data keberadaan Penyandang disabilitas di kota Makassar belum akurat.</p>		
3	Disposisi	<p>Peserta yang diutamakan adalah peserta yang masih potensial dan memiliki tingkat ekonomi rendah. Ditiap tahunnya tahunnya peserta ikut dalam pelatihan keterampilan berbeda-beda, agar adanya pemerataan potensi terhadap penyandang disabilitas.</p>	<p>Langkah-langkah yang diambil oleh para pelaksana tersebut dalam menjaring peserta disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas terkait jenis pelatihan yang diberikan kemudian keterbatasan pendanaan untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang telah didata, meskipun tidak ter jelaskan dalam SOP program, penentuan sikap pelaksana dalam kebijakan yang berkaitan dengan sikap demokratis jika dikaitkan oleh aspek-aspek yang dijelaskan Edward III.</p> <p>Komitmen para pelaksana di Dinas Sosial kota Makassar pun dilihat melalui target pelaksanaan yang cukup besar dari program-program lain mengingat jumlah perempuan penyandang disabilitas di kota Makassar cukup besar.</p>	<p>Aspek disposisi seperti sikap dan komitmen pelaksana mendukung pelaksanaan pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Makassar</p>

4	Struktur Birokrasi	<p>Standar Operasional Prosedur tidak terlalu jelas dalam menetapkan guideline program.</p> <p>Kurangnya dukungan SKPD lain dalam mengoptimalkan jalannya kebijakan pemenuhan hak pemberdayaan penyandang disabilitas hal ini berkaitan pada belum terealisasinya tim koordinasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.</p>	<p>Guideline yang dimaksudkan ialah alokasi anggaran pemberdayaan yang lamban sehingga berdampak pada tidak efesiennya waktu pelaksanaan program, hal ini diakibatkan oleh SOP yang berlaku, range waktu yang lama mengakibatkan tidak efesiennya program berjalan.</p> <p>Kemudian persoalan dukungan dari SKPD lain ini berkaitan dengan optimalisasi capaian kebijakan, fragmentasi atas tugas dan fungsi para pelaksana (dinas-dinas) yang cenderung hanya fokus pada ranah kerja mereka saja berakibat pada tidak maksimalnya hasil pada proses pemberdayaan. (seperti promosi, sarana, prasarana)</p>	Aspek-aspek Struktur Birokrasi seperti SOP dan Fragmentasi menjadi penghambat tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan pemberdayaan.
5	Faktor Eksternal (Kondisi Lingkungan Sosial Masyarakat)	Persepsi masyarakat dalam melihat dan memperlakukan penyandang disabilitas masih minim, stigma negatif yang tumbuh pada masyarakat dalam menilai penyandang disabilitas terkungkup pada persoalan mitos-mitos yang berkembang	Stigma negatif yang berkembang berdampak pada sulitnya penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensinya, kemudian aksesibilitas yang sangat terbatas dan belum ramah ini menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas sangat tergantung kepada bantuan masyarakat.	Kondisi eksternal menjadi salah satu aspek yang memengaruhi jalannya kebijakan

Sumber ; hasil analisis primer, 2017

4.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Dalam hal pengimplementasian kebijakan, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penetapan kebijakan tersebut. Tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah dalam penetapan kebijakannya dan hal tersebut bisa saja diluar dari faktor-faktor yang bersifat prinsip.

Banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah pada saat proses pengimplementasian kebijakan. Pengertian Kebijakan Pemerintah (Kebijakan Publik) adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengimplementasian kebijakan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar ;

4.6.1 Faktor Pendukung

4.6.1.1 Komunikasi

Komunikasi dapat menjadi faktor pendukung apabila didalamnya arus komunikasi yang terjadi harus jelas dan tegas. Dan yang terpenting adalah adanya ketetapan dan keakuratan informasi kebijakan sehingga para pelaksana harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tujuan

yang sebenarnya ingin dicapai dari implementasi kebijakan tersebut, dan mereka dapat mengetahui dengan tegas dan jelas, apa yang seharusnya mereka lakukan. Oleh Karena itu agar implementasi dapat berjalan dengan baik jika komunikasi yang terjadi berjalan secara efektif. Komunikasi sangat penting dalam berlangsungnya suatu kebijakan agar tidak terjadi kebingungan diantara para pelaksana.

Sejauh ini Dinas Sosial kota Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kota Makassar menjalin hubungan komunikasi dengan baik dengan organisasi Penyandang Disabilitas. Komunikasi tersebut diwujudkan melalui hubungan kooperatif dan konsultatif antar 2 (dua) elemen tersebut, komunikasi yang baik akan menghasilkan kejelasan-kejelasan seputar program dan upaya Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan daerah tentang Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan.

“Dinas Sosial kota Makassar dalam melaksanakan program-program pemberdayaan sering mengajak HWDI sebagai mitra di tiap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan disabilitas di kota Makassar melalui pelatihan-pelatihan peningkatan skill atau keterampilan”. (wawancara, 12 Juni 2017)

Untuk mengefektifkan jalannya kebijakan, peran serta masyarakat sangat diperlukan bukan hanya Pemerintah sebagai Pelaksana atau *Stakeholder* yang dititik beratkan bagaimana kemudian kebijakan tersebut bekerja hingga tersentuh oleh masyarakat, salah satu penentunya yakni

bagaimana masyarakat mampu mengetahui maksud dari kebijakan tersebut dan ikut mendukung, agar kebijakan tersebut bisa memberikan efek baik untuk jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, upaya P2TP2A kota Makassar dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dibuktikan dengan pembentukan shelter warga, shelter warga diharapkan menjadi tempat penanganan awal bagi korban kekerasan dengan melibatkan partisipasi warga, shelter warga P2TP2A kota Makassar telah tersebar di 5 Kecamatan dan 6 Kelurahan di kota Makassar, Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hapidah Djalante selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, P2TP2A kota Makassar,

“kami sudah mengupayakan dan mengkomunikasikan dengan warga tentang bagaimana cara memberikan bantuan kepada korban yang mengalami kekerasan, mau itu KDRT, kekerasan seksual dan lain-lain, nah itulah mengapa ada shelter warga, tujuannya kan agar warga juga turut serta dalam menangani korban tindak kekerasan, dan juga sebagai langkah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak”. (wawancara, 7 Agustus 2017)

Komunikasi yang terjalin antara Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri menjadi poin penting bagaimana kebijakan mampu tersentuh dan dipahami didalam lingkungan kebijakan itu sendiri, terlebih kepada Penyandang Disabilitas yang memang butuh perhatian lebih dari 3 (tiga) elemen yang saling berkaitan tersebut.

4.6.1.2 Sumber Daya (Staf Pelaksana)

Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah kurangnya keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh staf pelaksana. Keberhasilan suatu program kerja pun dapat diukur dengan melihat sejauh mana pelaksana kebijakan mampu mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Staf disini melingkupi kemampuan implementor dalam memahami tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program, kemampuan menyampaikan dan mengarahkan program

Sejauh ini staf pelaksana yang ada di Dinas Sosial kota Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar berjalan sesuai dengan porsi-porsi kerjanya. Pada Dinas Sosial adanya tim pelaksanaan program yang membagi tugas dalam setiap tahapan didalam program menjadi salah satu bentuk pembagian tugas yang optimal dan efektif, kemudian adanya tim Reaksi Cepat Tanggap pada kedua instansi Dinas Sosial dan P2TP2A kota Makassar sekiranya menjadi salah satu keseriusan Pemerintah Kota dalam merespon informasi-informasi terkait Penyandang Disabilitas, senada yang dituturkan oleh Ibu Hasnah A. Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Jadi kami punya tim Reaksi Cepat Tanggap yang bergerak untuk merespon informasi-informasi yang masuk ke Dinas Sosial, mau itu keberadaan pengemis, anak jalanan ataupun informasi mengenai Penyandang Disabilitas yang butuh penanganan dari kami”. (wawancara, 10 Juni 2017)

Operasional tugas juga bekerja dengan baik pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar.

Adanya hubungan kooperatif yang dibangun P2TP2A kota Makassar dengan elemen-elemen lain seperti kepolisian, dokter, psikologi dan beberapa LSM seperti LBH, HWDI Sul-Sel, Pemerhati perempuan untuk tergabung dalam tim penanganan korban menjadi wujud nyata bekerjanya struktur birokrasi yang dianggap cukup maksimal dalam memberikan perhatian dan mengawal kasus dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari korban yang ditangani P2TP2A kota Makassar.

Perhatian khusus yang dilakukan P2TP2A kota Makassar dibenarkan oleh Ibu Maria Un, selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Sulawesi Selatan.

“Nah di dalam tim inilah terdiri dari beberapa elemen biasanya tergantung dari kebutuhan korban disabilitas, Kalau korban membutuhkan bantuan pendampingan tertentu, pihak dari P2TP2A kota Makassar akan memfasilitasinya, karena untuk komposisi tim yang menangani kasus yang masuk itu cukup berkerja dengan baik”. (wawancara, 12 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas apresiasi atas kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan kota Makassar disampaikan langsung oleh Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan.

“Yang bisa kami apresiasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan kota Makassar terkhusus untuk P2TP2A kota Makassar sudah tidak memposisikan kebutuhan disabilitas itu sebagai sesuatu yang spesifik tapi juga mengintegrasikan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam semua program yang tujuannya untuk perempuan dan anak disabilitas di kota Makassar, itu yang kami apresiasi”. (wawancara, 12 Juni 2017)

Untuk mengukur bagaimana kinerja struktur birokrasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya salah satunya dengan cara mengukur respon masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penilaian masyarakat menjadi catatan penting Pemerintah kota untuk berbenah dan memperbaiki kinerjanya dalam mengayomi masyarakat. Trend positif ditunjukkan oleh kinerja dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar, seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un. Selaku organisasi masyarakat khusus Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas.

“2 (dua) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang sudah mulai melakukan upaya-upaya dalam rangka mengimplementasikan amanat perda ini yaitu Badan Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sul-Sel & kota Makassar. Indikatornya adalah ketika mereka berbicara tentang isu perempuan dengan anak itu sudah menjadi bagian mereka untuk mengingat perempuan disabilitas dan anak kemudian melibatkan organisasi perwakilan masyarakat untuk masuk dalam tim-tim yang mereka bentuk dalam rangka mendiskusikan isu-isu perempuan dan anak, ketika mereka berbicara tentang perdagangan orang, penyandang disabilitas juga rentan didalamnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, perempuan disabilitas itu memiliki kebutuhan yang berbeda bukan untuk mengistimewakan tetapi ada

kebutuhan spesifik yang mungkin berguna untuk mendampingi mereka yaa dari organisasi penyandang disabilitas, cara pandang badan pemberdayaan perempuan yang seperti ini yang kita harapkan diikuti dengan SKPD lain. Sejak 2012 Badan Pemberdayaan Perempuan kota Makassar sudah mulai memperhatikan kelompok Disabilitas, itu menjadi hal yang sangat kami hargai”. (wawancara, 12 Mei 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pelayanan yang ramah dan aksesibel ditunjukkan oleh Dinas Sosial kota Makassar dalam bekerja menangani Penyandang Disabilitas, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“tentu pelayanan yang kami berikan kepada Penyandang Disabilitas haruslah ramah bagi mereka, kami tahu bagaimana kebutuhan-kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas”. (wawancara, 10 Mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan struktur birokrasi yang ada di kedua instansi tersebut berjalan dengan baik sesuai porsi-porsi kerja masing-masing, membangun pola kerja yang baik menjadi salah satu faktor agar proses pengimplementasian kebijakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mampu berjalan dengan baik.

4.6.1.3 Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus

dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan Peraturan Daerah Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar diperlukan komitmen para pelaksana dalam menjalankan maksud dan tujuan dari suatu program kebijakan, kemudian kecenderungan-kecenderungan sikap yang diambil oleh para pelaksana apakah cukup untuk mendukung jalannya proses pengimplementasian atau bahkan hanya akan menghambat jalannya proses pengimplementasin.

Beberapa poin yang menjadi tolak ukur dari hasil pembahasan diatas dalam melihat tingkat komitmen dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan dan memahami maksud dan tujuan dari kebijakan. *Pertama*, langkah yang diambil oleh para pelaksana program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita di Dinas Sosial dengan mengganti peserta pelatihan setiap kali pelatihan di adakan hal tersebut diharapkan agar potensi-potensi penyandang disabilitas yang lain dapat disamaratakan dan hal ini berkaitan sikap demokratis dan adil yang dimiliki oleh para pelaksana, *kedua*, target pelaksanaan program kerja pemberdayaan memiliki jumlah presentase besar dibandingkan dengan program-program

husus penyandang disabilitas di Dinas Sosial kota Makassar, hal ini menjadi tolak ukur perhatian lebih yang diberikan Dinas Sosial kepada perempuan penyandang disabilitas dan *ketiga*, pembagian penyandang disabilitas potensial untuk mengikuti pelatihan keterampilan berdasarkan beberapa pertimbangan menjadi poin penting dalam mengefektifkan jalannya program.

Komitmen Pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan hak perlindungan perempuan penyandang disabilitas, dilakukan melalui peran P2TP2A kota Makassar dalam merespon setiap kasus yang dialami oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas. Komitmen tersebut terlihat dari kepatuhan para pelaksana dalam menjalankan segala prosedur dalam memberikan perlindungan terhadap korban dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

4.6.2 Faktor Penghambat

Banyak hal yang mampu mengakibatkan jalannya kebijakan menjadi terkendala ataupun terhambat faktor seperti pembagian potensi, dukungan, pola komunikasi, struktur dan isi kebijakan yang tidak mampu dipahami oleh pelaksana kebijakan berdampak pada proses pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan hingga sasaran kebijakan yang tidak mampu memahami tujuan dari kebijakan tersebut.

Untuk merealisasikan Peraturan Daerah Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar diperlukan dukungan dari seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah, faktor penghambat lain ialah persepsi masyarakat yang selalu mengaitkan permasalahan Penyandang Disabilitas merupakan masalah dengan perspektif Disabilitas dengan persoalan kesehatannya saja, tidak mampu membuat penyandang disabilitas tersebut mengoptimalkan kemampuannya tanpa peran dari pihak-pihak lain.

Berikut penghambat faktor penghambat terealisasinya implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar.

4.6.2.1 Struktur Birokrasi (Fragmentasi)

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini berkaitan dengan fragmentasi yang dikemukakan oleh Edward III (1980), fragmentasi yang dimaksudkan disini adalah peluasan tanggung jawab oleh beberapa organ-organ pelaksana, sifat dari suatu kebijakakan biasanya multi dimensi tidak bertolak ukur hanya pada satu perangkat kerja saja, dukungan dari beberapa perangkat kerja lain disini sangat di perlukan agar kebijakan dapat terlaksana dengan mudah.

Mengapa faktor fragmentasi menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan ini disebabkan oleh pemerintah secara keseluruhan, Satuan Perangkat Kerja Daerah di kota Makassar belum mampu mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam ruang lingkup kerja mereka, jika mendengar istilah disabilitas maka yang dikaitkan adalah Dinas Sosial saja, padahal jika berbicara tentang penyandang disabilitas maka yang harus terkait adalah peran serta masyarakat di segala sektor kehidupan.

Ada berbagai macam peraturan serta kebijakan yang memayungi hak-hak penyandang disabilitas, namun hasilnya akan tidak optimal apabila tidak disertai dengan dukungan dari seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah kota Makassar. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un, berikut.

“Kami belum melihat SKPD-SKPD yang lain yang punya kaitan dengan Peraturan Daerah ini belum menyadari”.
(wawancara, 12 Juni 2017)

Dari keterangan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan diatas menunjukkan bahwa beberapa SKPD di kota makassar belum mampu memposisikan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut disetiap porsi-porsi kerja mereka, pembahasan tentang kebutuhan penyandang disabilitas belum mampu menjadi salah satu arus utama, padahal jumlah penyandang disabilitas di kota Makassar terbilang cukup besar, belum lagi keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang

disabilitas yang memang dianggap perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

Sikap pemerintah terhadap disabilitas pun masih mendua. Di satu sisi diakui adanya kesamaan hak antara disabilitas dan non disabilitas namun di sisi lain masih menempatkan disabilitas sebagai bagian dari PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Disabilitas masih dianggap sebagai masalah kesejahteraan belaka sehingga isu-isu disabilitas masih menjadi porsi dinas sosial saja. Padahal secara tegas dan jelas disebutkan dalam undang-undang yang ada bahwa masalah disabilitas bukan hanya masalah disabilitas dan kesejahteraan tetapi disabilitas juga membutuhkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kehidupan sosial, dan juga kemandirian. Semua kebutuhan disabilitas tidak akan pernah bisa selesai jika persoalan disabilitas hanya diurus oleh Dinas Sosial saja. Persoalan disabilitas merupakan persoalan yang multisektor dan membutuhkan kordinasi lintas instansi untuk menyelesaikannya.

Sebenarnya telah jelas peran serta seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2013 melalui pembentukan tim koordinasi lembaga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan amanah kebijakan tersebut, namun sampai sekarang tim koordinasi tersebut belum terealisasi seperti pernyataan dari Ibu Hasnah A. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Sampai saat ini tim koordinasi yang pembentukannya diamanahkan oleh Dinas Sosial belum disahkan oleh Walikota Makassar, untuk struktur dalam tim tersebut sudah selesai dan sekarang sudah ada dibagian hukum balaikota Makassar, sampai saat ini kami masih menunggu Surat keputusan dari Walikota Makassar”. (wawancara, 10 mei 2017)

Hingga saat ini Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai satuan pemerintah daerah tersebut belum terealisasi, tim koordinasi ini diharapkan mampu mengurus utamakan kebutuhan penyandang disabilitas di segala sektor kehidupan yang ada dan penyandang disabilitas tidak lagi dikesampingkan keberadaannya. Harapan yang besar terkait pembentukan tim koordinasi ini juga diutarakan langsung oleh Ibu Maria Un, yang juga menjadi aktifis dan pemerhati perempuan dan anak penyandang disabilitas.

“Kebutuhan penyandang disabilitas itu banyak ini alasannya mengapa tim koordinasi menjadi penting, karena berbicara tentang disabilitas bukan hanya satu isu di dalamnya, okelah Dinas Pemberdayaan Perempuan telah melakukan peningkatan atau pemberdayaan potensi disabilitas tapi setelah itu kita butuh perangkat-perangkat dinas lain untuk menguatkan pasca setelah pelatihan itu apakah dinas perindustrian, koperasi dll.”. (wawancara, 12 mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas jelas terlihat bagaimana penyandang disabilitas sangat mengharapkan perhatian pemerintah kota terhadap para penyandang disabilitas, hal tersebut bukan untuk memberikan tempat yang spesial bagi penyandang disabilitas tapi lebih kepada bagaimana pemerintah mengikut sertakan kebutuhan-kebutuhan penyandang

disabilitas yang menjadi salah satu bukti dari keragaman dan keberagaman masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Maria Un, seperti berikut.

“Dan sebenarnya prinsipnya itu ketika kita berbicara tentang disabilitas kita tidak ingin semuanya selalu spesial, justru yang kita dorong adalah isu disabilitas atau kebutuhan disabilitas itu terintegrasi, inklusif dengan apapun yang dilakukan karena, selama ini undang-undang atau kebijakan yang dulu meng *create* cara berpikir orang bahwa ketika berbicara disabilitas semuanya harus spesial sehingga ketika kita ngomong tentang pendidikan bagi disabilitas itu hanya sekolah luar biasa. Tidak pendidikan untuk disabilitas adalah persamaan hak dalam memilih sekolah yang sama dan sesuai yang di inginkan dan mengakui penyandang disabilitas sebagai bagian dalam keragaman dan keberagaman dengan siswa-siswi yang lain. Tetapi bukan berarti sekolah luar biasa tidak dibutuhkan, kita sebagai orang organisasi punya cara berpikir yang berbeda kita mendorong semua sekolah dari sd, paud hingga perguruan tinggi harus inklusif, tetapi SLB tetap dibutuhkan karena tidak dipungkiri ada proses misalnya untuk fisioterapi atau pengajaran penulisan braille atau belajar bahasa isyarat. Tetapi mungkin perlu di upgrade fungsi dari SLB itu tidak sebagai sekolah luar biasa tetapi mungkin untuk sebagai sekolah luar biasa tetapi mungkin untuk sebagai lembaga penyedia sumber daya untuk mendampingi sekolah-sekolah yang umum atau sekolah lain”.
(wawancara, 12 mei 2017)

Untuk benar-benar merealisasikan kebijakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar, diperlukan komitmen seluruh perangkat kerja daerah untuk lebih memperhatikan kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas tersebut.

4.6.2.2 Struktur Birokrasi (Standar Operasional Prosedur)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur terkait waktu pelaksanaan program Pemberdayaan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Wanita mengakibatkan program tidak berjalan dengan efisien, hal ini dipengaruhi oleh ketetapan terkait alokasi anggaran program yang belum dapat diprediksi dengan jelas.

4.6.2.3 Sumber Daya (anggaran)

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup beberapa bagian yakni sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar, yang peneliti temukan yakni sumber daya

(anggaran) dan data yang akurat tentang keberadaan penyandang disabilitas di kota Makassar.

Anggaran yang minim dan tidak sesuai dengan porsi kebutuhan akan mampu menghambat bahkan membuat jalannya kebijakan tersebut berjalan tidak efektif, salah satu dampak yang penulis temukan yakni proses pelaksanaan program yang berjalan dengan lama dan pemerataan proses pelaksanaan yang terhambat.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hasnah A. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat.

“Sebenarnya banyak yang bisa kami kerjakan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas namun lagi-lagi anggaran yang kami punya terbatas dan itupun kami harus memilah-milah program apa yang sesuai dan tepat untuk kita prioritaskan”. (wawancara, 12 mei 2017)

Kemudian persoalan yang dianggap sangat penting untuk segera ditindaki yakni data yang valid terkait keberadaan penyandang disabilitas, untuk skala kota Makassar ada 2 versi data yang peneliti dapatkan yakni versi Pemerintah kota dan Organisasi Masyarakat, pendataan ini sangat berdampak pada keberlangsungan program dan kebijakan agar mampu tersentuh oleh penyandang-penyandang disabilitas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia.

“Data tentang disabilitas belum akurat sehingga ada diantara mereka yang terlewatkan misalnya ada program jaminan sosial yang seharusnya mereka dapat mereka akhirnya tidak dapat karena tidak ada data mereka yang benar selain ada persoalan

teknis, ketika ada program jaminan sosial seperti, BPJS, KIS, KIP, RASKIN dll, Itu masalah data kita berharap banyak sih dengan adanya perda di kota makassar, bahwasalah satu yang bisa segera di siapkan oleh pemerintah kita merespon perda ini adalah melakukan pendataan yang berkaitan dengan keberadaan kaum difabel di kota makassar, kenapa data menjadi penting, data itu sebenarnya entry point untuk pemerintah agar bisa mendesaign program apa yang dibutuhkan oleh wargaku di kelurahan ini didalamnya ada sekian penyandang disabilitas karena beda ragam difabel beda juga kebutuhannya”. (wawancara, 12 mei 2017)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan terlebih dahulu dalam membetuk sebuah kebijakan terkait penyandang disabilitas maka penting untuk menyediakan data yang akurat terkait jumlah penyandang disabilitas karena ini menjadi point utama dalam menentukan kebijakan-kebijakan apa yang sesuai untuk penyandang disabilitas.

4.6.2.4 Aspek Eksternal (Kondisi lingkungan, Stigmatisasi dan Pengetahuan)

Saat ini penyandang disabilitas menghadapi persoalan pelik yang sejauh ini dianggap indikator penting terhambatnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal tersebut salah satunya adalah proses stigmasisasi yang berkembang di masyarakat, berdasarkan temuan peneliti dilapangan beberapa orang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai salah satu masalah sosial tanpa memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut, kemudian banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penyandang disabilitas tersebut adalah bagian dari keragaman dan keberagaman

masyarakat. Stigmatisasi yang lahir kemudian berdampak pada kurang diperhatikannya kemampuan penyandang disabilitas, yang berujung pada menjamurnya penyandang disabilitas yang menggantungkan hidupnya di jalanan, tanpa perhatian pemerintah penyandang disabilitas hanya akan menambah daftar panjang persoalan kesejahteraan masyarakat.

Istilah penyandang cacat dulu disematkan bagi orang-orang yang mempunyai perbedaan dan kelainan fisik, cacat selalu di identikkan dengan barang dan sesuatu yang tidak sempurna, namun secara lahiriah penyandang disabilitas adalah bukan persoalan yang menjadi kehendak person tersebut, akibat dari stigma negatif tersebut, penyandang disabilitas mendapatkan penilaian dan penerunan derajat dan kesetaraan hak nya dalam berkehidupan. Terlebih lagi stigma tersebut telah tereduksi menjadi sebuah “aib” anggota keluarga penyandang disabilitas tersebut. Mempunyai keluarga seorang penyandang disabilitas dianggap hal yang memalukan bagi keluarga dan karena hal tersebut, banyak penyandang disabilitas di pisahkan dari lingkungannya dan mempertambah parah kondisi dari penyandang disabilitas tersebut.

Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai bentuk pengucilan dan itu mempengaruhi mereka dalam berbagai tingkatan tergantung dari jenis disabilitas yang mereka alami, di mana mereka tinggal dan budaya serta kelas sosial mereka. Gender juga merupakan sebuah faktor penting. Anak-anak perempuan penyandang disabilitas juga kecil kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan

pelatihan kerja atau mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan anak laki-laki dengan disabilitas atau anak perempuan tanpa disabilitas.

Anak-anak penyandang disabilitas seringkali dianggap rendah, dan ini menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Diskriminasi karena disabilitas berujung pada marginalisasi dari sumber daya dan pembuatan keputusan, dan bahkan pada kematian anak. Pengucilan seringkali muncul dari invisibilitas. Tidak banyak negara yang memiliki informasi yang bisa diandalkan tentang berapa banyak warganya yang merupakan anak-anak penyandang disabilitas, disabilitas macam apa yang mereka alami atau bagaimana disabilitas ini mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, anak-anak yang dikucilkan tidak tahu dan oleh sebab itu terputus dari pelayanan publik yang sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkannya. Pembatasan ini bisa memiliki efek yang panjang – yang membatasi akses mereka ada pekerjaan atau partisipasi mereka dalam masalah-masalah kemasyarakatan di kemudian hari

Penyandang perempuan disabilitas bisa dikatakan sebagai kelompok penyandang disabilitas yang mempunyai hambatan berlapis-lapis dibanding dengan lelaki penyandang disabilitas. Ia tidak saja mengalami hambatan karena disabilitas yang disandanginya, tetapi sebagaimana juga kebanyakan perempuan lainnya, ia mengalami diskriminasi dan stereotipe perempuan pada umumnya. Misalnya dengan anggapan tidak berdaya, selalu tergantung pada orang lain, dan tidak bisa membuat keputusan.

Di banyak kasus, respons terhadap situasi anak penyandang disabilitas umumnya terbatas pada institusionalisasi, ditinggalkan atau ditelantarkan. Respons-respons semacam ini merupakan masalah, dan itu sudah mengakar dalam asumsi-asumsi negatif atau paternalistik tentang ketidakmampuan, ketergantungan dan perbedaan yang muncul karena ketidaktahuan.

Secara umum penyandang disabilitas di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama. Didalam keluarga, penyandang disabilitas sangat tergantung bagaimana keluarga memperlakukan kehidupannya sehari-hari. Keluarga merupakan tonggak utama dalam pertumbuhan jiwa dan perkembangan kapasitas. Jika keluarga tidak memiliki wawasan bagaimana memperlakukan anaknya yang disabilitas, sangat mungkin si penyandang disabilitas tidak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagaimana mestinya. Dan hal tersebut pun menjadi salah satu penyumbang bagaimana perlakuan diskriminasi diterima oleh penyandang disabilitas tersebut.

MATRIKS 4.3

Matriks Hasil Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar

NO	ASPEK	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	KESIMPULAN
1	Komunikasi	Adanya hubungan yang bersifat konsultatif dan kooperatif yang dibangun oleh ke 3 elemen dalam penelitian ini yakni ; Dinas Sosial, P2TP2A kota Makassar dan HWDI Sul-Sel	Persoalan yang menghambat yakni komunikasi lintas sektoral melingkupi tugas dan fungsi SKPD lain.	Aspek Komunikasi terimplementasi dengan baik
2	Sumber Daya	Pembagian struktur dan porsi kerja yang efisien. Responsibilitas terhadap kasus kekerasan yang masuk ke P2TP2A kota Makassar. Fasilitas pendukung pelaksanaan pemenuhan hak cukup dalam menoperasikan program atau kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan.	Anggaran yang terbatas mengakibatkan keterbatasan jumlah peserta, jenis pelatihan keterampilan dan bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Data terkait keberadaan penyandang disabilitas yang masih belum akurat	Aspek Sumber Daya Belum terimplementasi secara maksimal
3	Disposisi	Komitmen dan konsistensi Pelaksana yang baik dalam mentransformasikan dan melaksanakan maksud dari kebijakan dengan sikap demokratis yang dimiliki mendukung pelaksanaan program agar berjalan dengan efektif	Tidak terlihat kecenderungan-kecenderungan sikap yang bertentangan dengan maksud dari kebijakan	Aspek Disposisi terimplementasi dengan baik.

4	Struktur Birokrasi	Perangkat-perangkat struktur seperti divisi dan tim yang ada pada kedua pelaksana, Dinas Sosial dan P2TP2A kota Makassar efektif dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.	Kurangnya dukungan dari SKPD lain. Pembentukan Tim Koordinasi lembaga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang lambat. Prosedur terkait waktu pelaksanaan yang tidak jelas berdampak pada ketidak efisienan pelaksanaan program	Aspek Struktur birokrasi belum terimplementasi secara maksimal
5	Faktor Eksternal (Lingkungan Sosial)	Tidak ditemukan faktor eksternal yang mendukung pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar	Stigma negatif masyarakat dalam menilai dan menerima penyandang disabilitas. Tingkat Pengetahuan masyarakat yang rendah dalam memperlakukan penyandang disabilitas.	Faktor eksternal menjadi penghambat terimplementasinya kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar

Sumber ; hasil analisis primer, 2017

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perempuan di kota Makassar.

Upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan penyandang disabilitas di wujudkan melalui Program Pemberdayaan Wanita Penyandang Disabilitas berupa pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit, membuat kue, membuat bros dan pemberian bantuan modal usaha berupa paket yang sesuai dengan jenis pelatihan yang di ikuti. Program ini ditujukan untuk penyandang Disabilitas yang masih potensial dan masih mampu untuk diberdayakan.

2. Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak dalam Perlindungan Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak di kota Makassar.

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar

(P2TP2A kota Makassar), P2TP2A kota Makassar, bekerja memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan, melalui P2TP2A kota Makassar pelayanan dan pendampingan dalam mengawal korban kekerasan penyandang disabilitas bekerja sama dan bermitra dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas seperti interpreter dan psikolog melalui koordinasi dengan P2TP2A kota Makassar.

Perlindungan kepada korban dikawal oleh beberapa elemen-elemen terkait seperti pihak kepolisian, organisasi masyarakat, psikolog, tim medis (dokter), LSM, Lembaga bantuan hukum, pemerhati perempuan yang tergabung dalam tim gugus kerja P2TP2A kota Makassar guna menjamin kebutuhan dan perlindungan yang layak diterima oleh korban.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

1. Faktor Pendukung, faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah :

1) Faktor komunikasi.

Komunikasi yang berjalan antara struktur Dinas Sosial kota Makassar dan P2TP2A kota Makassar dengan HWDI Sulawesi Selatan berjalan cukup baik, hal tersebut terbukti dengan adanya rapat koordinasi yang selalu dibangun oleh pihak P2TP2A kota

Makassar dalam menangani kasus-kasus yang masuk di P2TP2A kota Makassar, begitupun sebaliknya, Dinas Sosial kota Makassar kerap berkonsultasi dengan HWDI Sulawesi Selatan terkait kebutuhan-kebutuhan dan saran-saran untuk jenis pelatihan yang akan dilaksanakan. Kemudian faktor berikutnya adalah

2) Faktor Sumber Daya (Staf Pelaksana)

Struktur birokrasi yang ada pada kedua struktur tersebut berjalan cukup baik sesuai dengan porsi-porsi kerja yang ditugaskan masing-masing.

3) Faktor Disposisi

Faktor ini terkait dengan tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap kebijakan yang ada pada Dinas Sosial kota Makassar dan P2TP2A kota Makassar, komitmen penuh yang diberikan terhadap pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas di kota Makassar

2. Faktor Penghambat, ada beberapa catatan penting yang menjadi faktor penghambat proses pelaksanaan kebijakan ini, diantaranya;

1) Faktor sumber daya (Anggaran)

Anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam memberikan pemberdayaan yang sesuai dan tepat untuk penyandang disabilitas, faktor penghambat terakhir adalah data yang valid yang tidak dimiliki oleh pemerintah kota dan mengakibatkan ada

beberapa penyandang disabilitas yang tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut.

2) Faktor Struktur Birokrasi

Faktor yang dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi birokrasi, Penentuan waktu pelaksanaan dalam prosedur pelaksanaan program berdampak pada ketidak efisienan pelaksanaan program pemberdayaan, kemudian dukungan terhadap program pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan belum sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah kota Makassar dengan melihat keterkaitan Satuan Perangkat Kerja Daerah lain terhadap proses pengimplementasian kebijakan untuk setiap sektor penghidupan.

3) Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Hal ini meliputi stigma masyarakat dalam melihat perempuan penyandang disabilitas yang mendiskreditkan keberadaan penyandang disabilitas, kemudian tingkat pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan guna dijadikan catatan penting untuk proses pengimplementasian kebijakan Tentang

Pemenuhan hak-hak-Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Sebagai berikut ;

1. Pengesahan tim koordinasi lembaga pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Tim ini mampu mengoptimalkan dan memperhatikan segala aspek-aspek kebutuhan penyandang disabilitas dengan mengintegrasikan dan mengarus utamakan ke dalam program-program yang ada.
2. Melakukan proses pemberian pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat dan anak-anak melalui *shelter warga* yang dibentuk oleh P2TP2A kota Makassar, hal ini sangat berguna untuk menekan stigma negatif yang tumbuh di masyarakat, agar lebih menghargai dan memahami posisi penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman dan keberagaman masyarakat, dan sebagai upaya untuk mengakhiri institusionalisasi kepada penyandang disabilitas yang kerap di eksklusifkan oleh keluarganya.
3. Menambah jumlah alokasi anggaran melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas, dengan melakukan pelatihan-pelatihan inovatif sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, hal ini mampu menghidupkan kemandirian penyandang disabilitas dan tidak bergantung pada orang lain.

4. Melakukan pendataan dan memperbaiki data terkait keberadaan penyandang disabilitas di kota Makassar, dengan menggadeng institusi statistik ataupun catatan sipil dan organisasi penyandang disabilitas di kota Makassar.
5. Mengakhiri mitos yang berkepanjangan dan berkembang di masyarakat terkait memandang penyandang disabilitas dan mendahulukan kebutuhan penyandang disabilitas karena mereka punya keterbatasan, yang semestinya kita perhatikan.

Daftar Pustaka

- Arinanto, Satya, 2008. *Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Maria, Farida, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup.
- Ali, Faried, Samsu Alam dan Sastro M.Wantu. 2012. *Studi Analisa Kebijakan*. Refika Aditama : Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edward III*. Lukman Offset YPAPI: Yogyakarta.
- Dunn, William N. 1998. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada
- Edi Suharto, Membangun Memperdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial, (Bandung: PT. Harindita, 1987)

Sulastri, Andi, Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014)

Ginanjar, Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta: CESINDO, 1996)

Data Sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2014 tentang jumlah penduduk di Kota Makassar.

Data Sensus Badan Pusat Statistik Tahun 2010 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.

Data Dinas Sosial kota Makassar 2017 tentang Jumlah Penyandang Disabilitas di kota Makassar

Undang- undang

1. Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
5. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar
6. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif
7. Peraturan Pemerintah No.43/1998 Tentang Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan & Transmigrasi No.205 Tahun 1995

Internet:

United nation,"Convention on The Rights of Persons with Disabilities",Un.org.

<http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166>,diakses tanggal 26 Januari 2017, pukul 15.18 Wita.

Matriks 4.4

Matriks Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

ASPEK	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR		FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MAKASSAR		KET.
	PERLINDUNGAN	PEMBERDAYAAN	PENDUKUNG	PENGHAMBAT	
1. KOMUNIKASI	Setiap tahapan proses pemberian perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar, P2TP2A sangat memperhatikan kebutuhan korban	Intensitas komunikasi antara Dinas Sosial dengan HWDI Sul-Sel relatif lancar, hubungan yang bersifat konsultatif antara kedua organisasi dan lembaga mampu menimalisir kecenderungan kelompok sasaran menjadi kelompok penentang kebijakan. Komunikasi yang intens menghasilkan jenis pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan.	Adanya hubungan yang bersifat konsultatif dan kooperatif yang dibangun oleh ke 3 elemen dalam penelitian ini yakni ; Dinas Sosial, P2TP2A kota Makassar dan HWDI Sul-Sel	Persoalan yang menghambat yakni komunikasi lintas sektoral melingkupi tugas dan fungsi SKPD lain.	Terimplementasi dengan baik
2. SUMBER DAYA	Sumber daya yang dimiliki oleh P2TP2A kota Makassar sejauh ini tidak menjadi kendala berarti dalam	Terbatasnya anggaran akan berdampak pada model keterampilan yang diberikan serta jumlah peserta yang diikuti, hal	Pembagian struktur dan porsi kerja yang efisien. Responsibilitas terhadap kasus kekerasan yang	Anggaran yang terbatas mengakibatkan keterbatasan jumlah peserta, jenis pelatihan keterampilan dan	Tidak terimplementasi dengan maksimal

	pelaksanaan meskipun beberapa aspek terkait sumber daya yang dianggap belum maksimal sepenuhnya dalam mendukung proses pemberian perlindungan	tersebut mempengaruhi tingkat ke efesiensian pelaksanaan program Kemudian kemampuan staf dan tenaga pendamping yang cukup kapabel dalam mengarahkan peserta mampu menutupi kendala-kendala dalam sumber daya anggaran yang dihadapi	masuk ke P2TP2A kota Makassar. Fasilitas pendukung pelaksanaan pemenuhan hak cukup dalam menoperasikan program atau kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan.	bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Data terkait keberadaan penyandang disabilitas yang masih belum akurat	
3. DISPOSISI	Komitmen dan konsistensi pelaksana di P2TP2A kota Makassar terbukti melalui prioritas, responsibilitas dan proteksi yang diberikan oleh pelaksana dalam memberikan pelayanan khusus terkait kebutuhan penyandang disabilitas melalui hubungan koordinasi dengan HWDI SulSel	Langkah-langkah yang diambil oleh para pelaksana tersebut dalam menjaring peserta disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas terkait jenis pelatihan yang diberikan kemudian keterbatasan pendanaan untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang telah didata, meskipun tidak ter jelaskan dalam SOP program, penentuan tersebut merupakan sikap pelaksana dalam kebijakan yang demokratis	Komitmen dan konsistensi Pelaksana yang baik dalam mentransformasikan dan melaksanakan maksud dari kebijakan dengan sikap demokratis yang dimiliki mendukung pelaksanaan program agar berjalan dengan efektif	Tidak terlihat kecenderungan-kecenderungan sikap yang bertentangan dengan maksud dari kebijakan	Terimplementasi dengan baik

4. STRUKTUR BIROKRASI	Efektivitas struktur yang terdapat di P2TP2A kota Makassar terwujud dengan digandengnya beberapa elemen-elemen yang berkaitan dengan proses pemberian perlindungan, struktur ini dianggap efektif dalam proses pendampingan dan penanganan kasus	Guideline pengalokasian anggaran pemberdayaan yang lamban berdampak pada tidak efesiennya waktu pelaksanaan program. Kemudian persoalan dukungan dari SKPD lain ini berkaitan dengan optimalisasi capaian kebijakan, fragmentasi atas tugas dan fungsi para pelaksana (dinas-dinas) yang cenderung hanya fokus pada ranah kerja mereka saja.	Perangkat-perangkat struktur seperti divisi dan tim yang ada pada kedua pelaksana, Dinas Sosial dan P2TP2A kota Makassar efektif dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas.	Kurangnya dukungan dari SKPD lain. Pembentukan Tim Koordinasi lembaga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang lambat. Prosedur terkait waktu pelaksanaan yang tidak jelas berdampak pada ketidak efisienan pelaksanaan program	Tidak terimplementasi dengan baik
5. FAKTOR EKSTERNAL (LINGKUNGAN SOSIAL)	Keluarga dari korban takut untuk melaporkan kasusnya dikarenakan pelaku tersebut biasanya adalah anggota keluarga bahkan orang terdekat korban. Penyandang disabilitas mudah mempercayai seseorang yang membuatnya merasa nyaman	Stigma negatif yang berkembang berdampak pada sulitnya penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensinya, kemudian aksesibilitas yang sangat terbatas dan belum ramah ini menjadi alasan mengapa penyandang disabilitas sangat tergantung kepada bantuan masyarakat.	Tidak ditemukan faktor eksternal yang mendukung pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar	Stigma negatif masyarakat dalam menilai dan menerima penyandang disabilitas. Tingkat Pengetahuan masyarakat yang rendah dalam memperlakukan penyandang disabilitas.	Tidak terimplementasi dengan baik

Sumber ; Hasil analisis primer, 2017

Lampiran-Lampiran



Wawancara Bersama Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial kota Makassar



Wawancara Bersama Ibu Maria Un, Selaku Ketua HWDI Sulawesi Selatan



Wawancara bersama Ibu Hapidah Djalante, Selaku Sekretaris P2TP2A kota Makassar (Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak BPPPA kota Makassar)